



**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 73 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2013 – 2018**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah laut, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLRI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang SPM Bidang Kesenian;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013 - 2018.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005- 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang disusun setiap tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

**BAB II**  
**RPJMD**  
**Pasal 2**

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

### **Pasal 3**

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan
- d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

### **Pasal 4**

- (1) RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada bagian tertentu masih terdapat target atau capaian indikator yang masih kosong karena keterbatasan data, waktu dan Sumberdaya Manusia (SDM). hal tersebut dimaknai sebagai suatu itikad untuk mencapai sasaran tersebut dan akan terus diisi/disempurnakan sesuai dengan kondisi terkini dan ketentuan yang berlaku dengan tidak mengurangi makna disahkannya Perda RPJMD ini.
- (3) Program dalam RPJMD beserta pagu indikatif merupakan rencana program dalam rangka pencapaian sasaran dalam penetapan kinerja. Apabila dalam proses pelaksanaan pembangunan nanti perlu adanya penambahan program atau pagu indikatif untuk mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat diakomodir sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.

(4) Target pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan target yang akan diupayakan secara sungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya upaya untuk dicapai. Karena situasi dan kondisi tertentu yang membuat beberapa target SPM belum dapat dicapai, harus ditetapkan melalui Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2013 - 2018.

#### **Pasal 6**

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

### **BAB III**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2008-2013 dinyatakan masih berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2013 - 2018 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2014, dan diberlakukan sebagai RPJMD Transisi untuk pedoman penyusunan RKPD Tahun 2019 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah RPJMD Tahun 2018-2023.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI TANAH LAUT,**

**ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**ttd**

**H.ABDULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013 NOMOR 203



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2013 - 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah laut, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018;

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLRI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang SPM Bidang Kesenian;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005  
– 2025;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13  
tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah  
Kabupaten Tanah Laut;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN

2013 - 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh

masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005- 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang disusun setiap tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## **BAB II**

### **RPJMD**

#### **Pasal 2**

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

#### **Pasal 3**

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan
- d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

#### **Pasal 4**

- (1) RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada bagian tertentu masih terdapat target atau capaian indikator yang masih kosong karena keterbatasan data, waktu dan Sumberdaya Manusia (SDM). hal tersebut dimaknai sebagai suatu itikad untuk mencapai sasaran tersebut dan akan terus diisi/disempurnakan sesuai dengan kondisi terkini dan ketentuan yang berlaku dengan tidak mengurangi makna disahkannya Perda RPJMD ini.
- (3) Program dalam RPJMD beserta pagu indikatif merupakan rencana program dalam rangka pencapaian sasaran dalam penetapan kinerja. Apabila dalam proses pelaksanaan pembangunan nanti perlu adanya penambahan program atau pagu indikatif untuk mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat diakomodir sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.
- (4) Target pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan target yang akan diupayakan secara sungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya upaya untuk dicapai. Karena situasi dan kondisi tertentu yang membuat beberapa target SPM belum dapat dicapai, harus ditetapkan melalui Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2014 - 2018.

#### **Pasal 6**

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD untuk penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

### **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 8**

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2009-2013 dinyatakan masih berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2013 - 2018 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2014, dan diberlakukan sebagai RPJMD Transisi untuk pedoman penyusunan RKPD Tahun 2019 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah RPJMD Tahun 2018-2023.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap/ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 22 Agustus 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

Cap/ttd

Drs. H. Abdullah. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (99/2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013 - 2018

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018, memuat Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-isu Strategis; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah

Laut pada setiap tahun anggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2014 tetap berlaku.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 - 2018.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

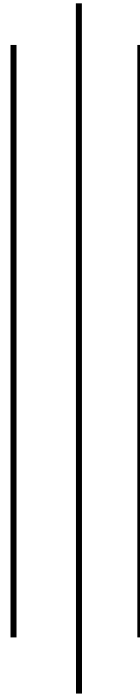
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR     TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013-2018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2013

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji dan syukur yang tidak terhingga kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-NYA jualah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 ini dapat diselesaikan. Setelah melalui perjalanan yang panjang dari penyusunan rancangan awal RPJMD, Forum Konsultasi Publik, Verifikasi Rancangan Renstra SKPD, Rapat dengan DPRD untuk dalam rangka menerima saran dan masukan, sampai dengan Musrenbang RPJMD, maka tersusunlah Peraturan Bupati Tanah Laut tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018.

Penetapan Peraturan Bupati ini merupakan suatu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan landasan bagi penyusunan perencanaan pembangunan di Tahun 2015 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD ini.

Makna dari suatu perencanaan adalah penetapan target dan sasaran yang akan dicapai dan program prioritas untuk mencapainya dalam kurun waktu kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada Tahun 2013.

Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam penyajian maupun kelengkapan data yang diperlukan. Keterbatasan data tidak menyurutkan kita semua untuk menyajikan RPJMD ini minimal mendekati apa yang dipersyaratkan oleh Regulasi yang berlaku.

Demikian Dokumen RPJMD ini dibuat sebagai bahan untuk proses lebih lanjut dalam perencanaan pembangunan di Tahun 2015, semoga segala upaya dan ikhtiar ini memperoleh rahmat dan ridho ALLAH SWT.

Pelaihari,       Desember 2013  
Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut

Drs. H. Abdullah, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591127 198103 1 013

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	8
2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI .....	8
2.1.1 Geografi .....	8
2.1.2. Topografi .....	10
2.1.3 Penggunaan Lahan .....	13
2.1.3.1 Lahan Hutan .....	13
2.1.3.2 Lahan Persawahan .....	13
2.1.3.3 Lahan Kering .....	14
2.1.4. Iklim .....	14
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	15
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	15
2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	16
2.2.2 Kesejahteraan Sosial .....	23
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM .....	26
2.3.1 Fokus Layanan urusan Wajib .....	26
1.3.1.1 Pendidikan .....	26
1.3.1.2 Kesehatan .....	28
1.3.1.3 Transportasi .....	30
1.3.1.4. Perumahan .....	31
1.3.1. 5 Lingkungan Hidup .....	33
1.3.1. 6 Komunikasi dan Informatika .....	34
1.3.1.7 Penataan Ruang .....	35
1.3.1. 8 Pemerintahan .....	36
2.3.2 Fokus Layanan urusan Pilihan .....	39
2.3.2.1. Pertanian .....	39

a. Pertanian Tanaman Pangan	39
b. Kehutanan	40
c. Kelautan Dan Perikanan	
d. Peternakan	
e. Perkebunan	
2.3.2.2. Pertambangan dan Energi	
a. Pertambangan	
b. Energi	
2.3.2. 3. Industri dan Perdagangan	
2.3.2. 4. Pariwisata	
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah	
2.4.2 Sumber Daya Manusia	
2.4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
2.4.4. Millenium Development Goals (MDGs)	
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
.....	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	
.....	
3.1.1. Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan	
.....	
3.1.1.1 PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	
.....	
3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut	
.....	
3.1.2.1. Penawaran Agregat	
.....	
3.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi	
.....	
3.1.2.3 Struktur Perekonomian	
.....	
3.1.2.4 PDRB per Kapita	
.....	
3.1.2.5 Indeks Harga Implisit	

.....  
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tanah Laut

.....  
3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah

.....  
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

.....  
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

.....  
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

.....  
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

.....  
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

.....  
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

.....  
4.1. Bidang ekonomi

.....  
4.2. Bidang sosbud

.....  
4.3. Bidang infrastruktur

.....  
4.4. Bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan penataan ruang

.....  
4.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

.....  
4.6. Prioritas dan Pembangunan

.....  
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

.....  
5.1. Uraian Rencana Program dan Kegiatan

.....  
5.1.1. Uraian Rencana Program dan Kegiatan Tematik

.....

5.1.2. Uraian Rencana Program dan Kegiatan Non Tematik

.....

5.2. Matrik Rencana Program dan Kegiatan

.....

BAB VI P E N U T U P

.....

LAMPIRAN II. MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA  
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN  
ANGGARAN 2012

.....

.....

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Tanah Laut merupakan Kabupaten yang memiliki posisi dan kondisi yang dipandang cukup strategis. Dari segi posisi terletak di antara jalur lalu lintas menuju dari Pusat Ibu Kota provinsi ke arah selatan yang terdiri dari Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Jarak dengan Fasilitas Transportasi udara bandara Syamsuddin Noor juga relatif dekat yaitu sekitar 50 kilometer sehingga memudahkan akses dari maupun ke luar daerah. Dari segi sumberdaya alam juga relatif kaya baik sumberdaya di bidang pertambangan, maupun pertanian dalam arti luas serta potensi pariwisata.

Untuk mengembangkan potensi-potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup yang didukung oleh pilar Aparatur atau Birokrasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2013. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, Draf Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 - 2033 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJMD.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini. Sedangkan pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi, misi dan program pembangunan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih, serta dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD.

Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam Musrenbang yang melibatkan para stakeholder, yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
- 17) Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut .....
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA**

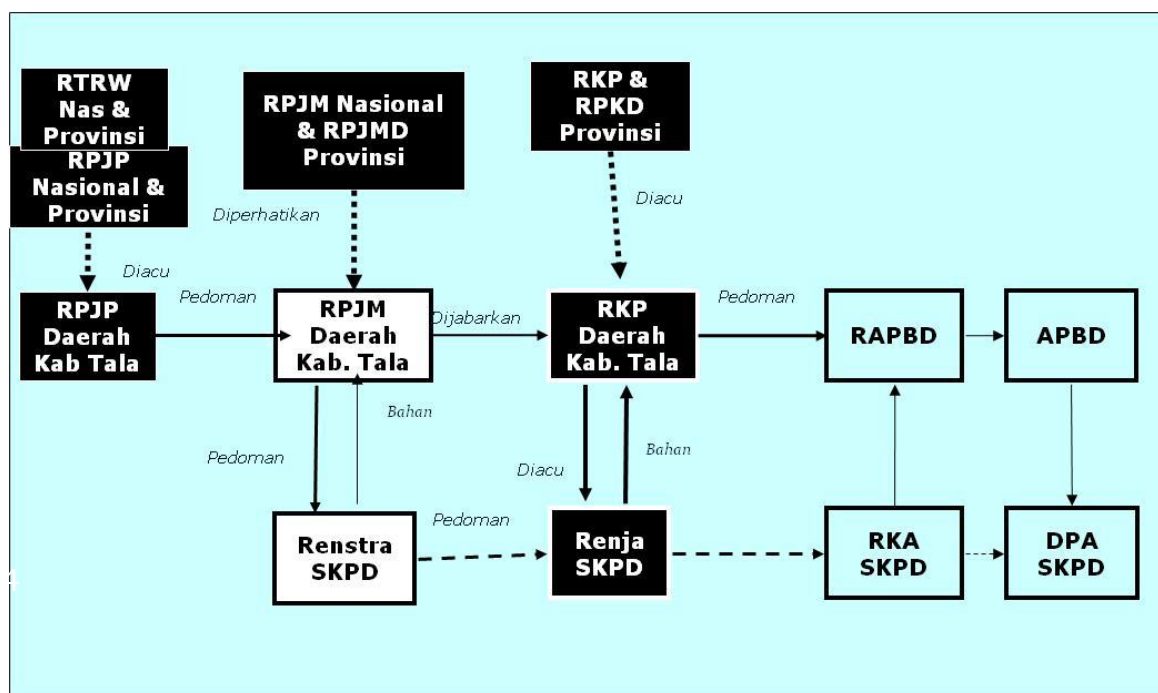
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015.

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Kabupaten Tanah Laut dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tanah Laut.

Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD dan RTRW, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti

Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Metropolitan Priority Area (MPA), target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu, RTRW Kabupaten Banjar, dan RTRW Kota Banjarbaru.

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar : Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 terdiri dari (10) sepuluh bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta maksud dan tujuan.

##### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bagian ini memaparkan gambaran umum kondisi Kabupaten Tanah Laut yang kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

##### **Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan**

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

##### **Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis**

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

##### **Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013 – 2017 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada

bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

### **Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

### **Bab VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah**

Bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, beserta kebutuhan pendanaannya.

### **Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai**

#### **Kebutuhan Pendanaan**

Bagian ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD, Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

### **Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan padaakhir periode RPJMD dapat dicapai.

### **Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**

Bagian ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati periode berikutnya, dan langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.

### **Bab XI Penutup**

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI**

##### **2.1.1. Geografis**

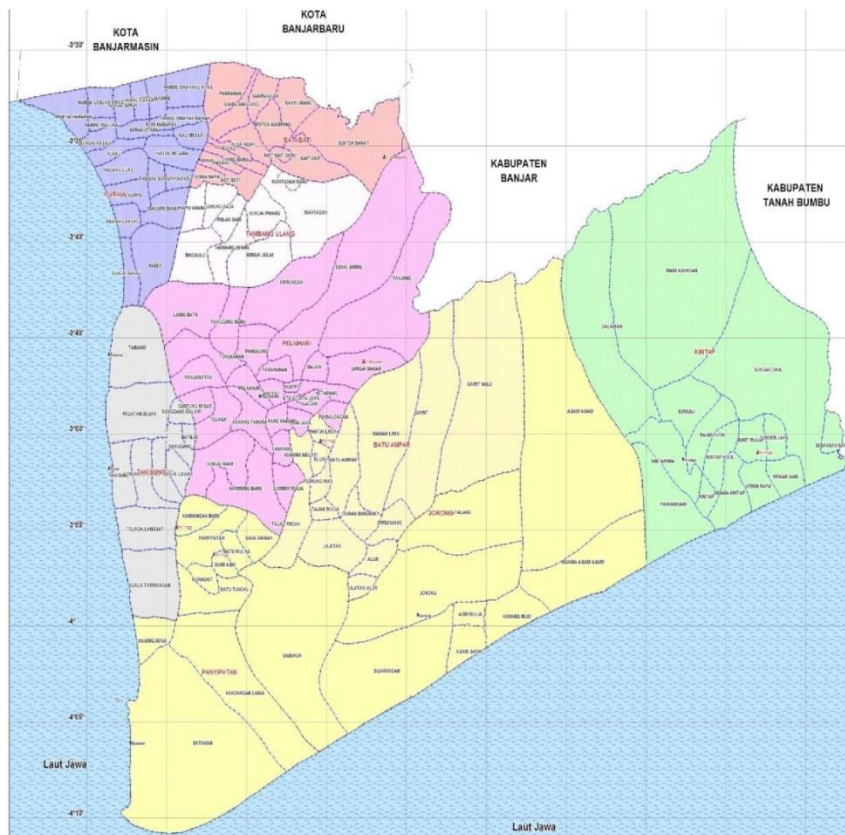
Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Fisik alami yang ada di kawasan berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk.

Kabupaten Tanah Laut terletak diantara 114o30'20" BT - 115o23'31" BT dan 3o30'33" LS - 4o11'38" LS. Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah Daratan 3.631,35 km<sup>2</sup> dan Lautan 1.440 km<sup>2</sup> (SK. Gubernur) atau hanya 9,71% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 Kecamatan dan 130 Desa dan 5 Kelurahan serta 1.504 RT. Kecamatan Panyipatan dengan luas wilayah 336 km<sup>2</sup> dengan Ibu Kota Desa Panyipatan jumlah desa dan RT yaitu 10 Desa dan 126 RT, Kecamatan Takisung dengan luas wilayah 343 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Desa Takisung jumlah desa dan RT yaitu 12 Desa dan 162 RT, Kecamatan Kurau dengan luas wilayah 127 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Desa Padang Luas jumlah desa dan RT yaitu 11 Desa dan 69 RT, Kecamatan Bumi Makmur dengan luas wilayah 141 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Handil Babirik jumlah desa dan RT yaitu 11 desa dan 73 RT, Kecamatan Bati Bati dengan luas wilayah 234,75 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Desa Pandahan jumlah desa dan RT yaitu 14 Desa dan 145 RT, Kecamatan Tambang Ulang dengan luas wilayah 160,75 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Desa Tambang Ulang jumlah desa dan RT yaitu 9 Desa dan

71 RT, Kecamatan Pelaihari dengan luas wilayahnya 379,45 dengan ibu kotanya Kelurahan Pelaihari jumlah desa/Kelurahan dan RT yaitu 5 Kelurahan dan 15 desa serta 261 RT, Kecamatan Bajuin dengan luas wilayahnya 196,30 km<sup>2</sup> dengan ibu kotanya Desa Bajuin jumlah desa dan RT yaitu 9 Desa dan 96 RT, Kecamatan Batu Ampar dengan luas wilayahnya 548,10 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Desa Batu Ampar jumlah desa dan RT yaitu 14 Desa dan 181 RT, Kecamatan Jorong dengan luas wilayahnya 628,00 km<sup>2</sup> dengan ibu kotanya Desa Jorong jumlah desa dan RT yaitu 11 Desa dan 157 RT, Kecamatan Kintap dengan luas wilayahnya 537,00 km<sup>2</sup> dengan ibu kotanya Desa Kintapura jumlah desa dan RT yaitu 14 Desa dan 163 RT.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa luas Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Jorong, kemudian Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kintap dengan luas, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau.



## **Gambar 2.1. Peta Kabupaten Tanah Laut**

### **2.1.2. Topografi**

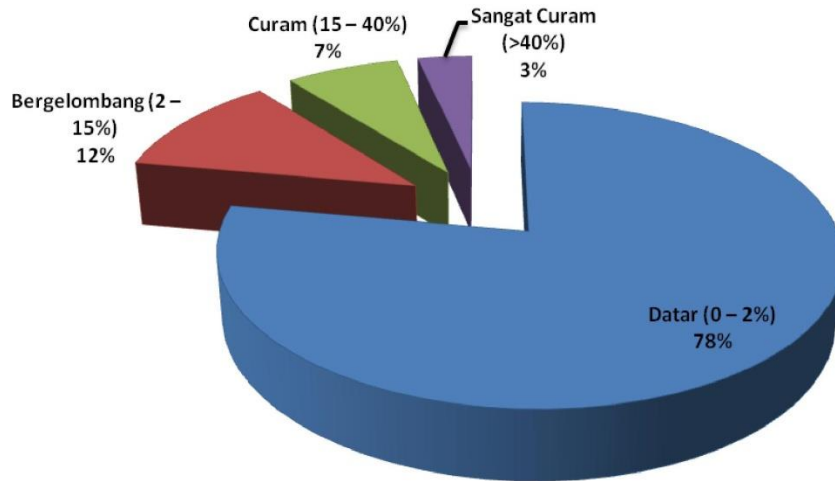
Kabupaten Tanah Laut umumnya merupakan daerah dataran tinggi dan bergunung-gunung yang terdapat dibagian Utara dan Timur, yaitu tersebar di Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Jorong, Batu Ampar, Tambang Ulang dan Kintap sampai ke perbatasan dengan Kab. Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak yaitu:

1. Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
2. Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
3. Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)
4. Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
5. Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
6. Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
7. Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
8. Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
9. Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Sedangkan dibagian Selatan dan Barat merupakan daerah dataran rendah, pantai, dan rawa-rawa yaitu terdapat di Kecamatan Kurau, Bumi Makmur, Takisung, dan Panyipatan.

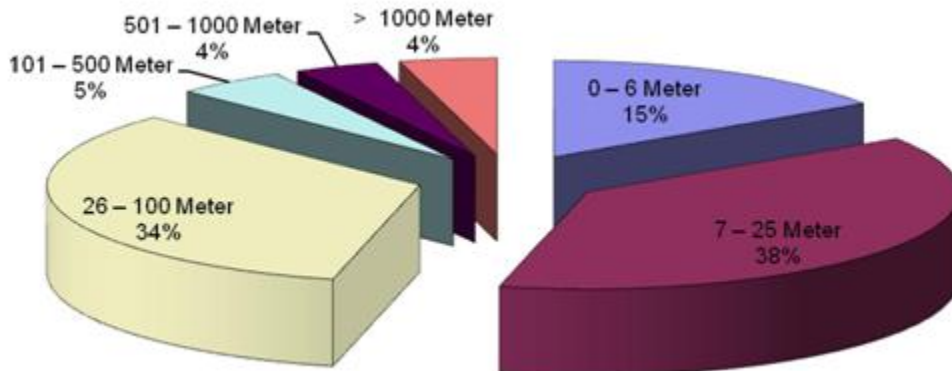
Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 Hektar (78%); wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 Hektar (12%); wilayah curam (kemiringan 15- 40%) sebesar 26.833 Hektar (7%); dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar (3%).

**Gambar. 2.2. Persentase Kemiringan Lahan Beserta Luasnya**



Kabupaten Tanah Laut mempunyai ketinggian diatas permukaan laut dapat diklasifikasikan dalam delapan kelompok, yaitu ketinggian 0 - 6 Meter sebesar 58.231 Hektar (16%), ketinggian 7 - 25 Meter sebesar 142.133 Hektar (37%), ketinggian 26 - 100 Meter sebesar 125.386 Hektar (34%), ketinggian 101 - 500 Meter sebesar 17.759 Hektar (5%), ketinggian 501 - 1000 Meter sebesar 13.661 Hektar (4%) dan ketinggian lebih dari 1000 Meter sebesar 15.760 Hektar (4%)

**Gambar 2.3. Persentase Tinggi Permukaan Laut**



### 2.1.3 Penggunaan Lahan

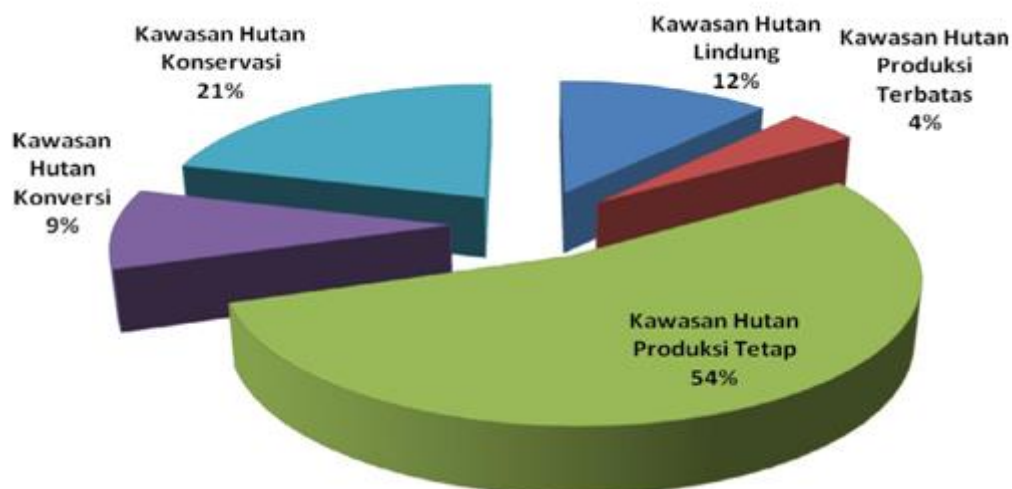
#### 2.1.3.1 Lahan Hutan

Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan suatu susunan tanah dan isinya. Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 132.645 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, hutan produksi tetap seluas 71.658 Ha, 12.174 Ha merupakan hutan produksi yang bisa di konversi, 5.290 Ha adalah hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan konservasi seluas 27.662 Ha.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2011 produksi kayu HTI sebesar 23.096 m<sup>3</sup> dan produksi kayu rakyat sebesar 1.045 m<sup>3</sup>.

Luas lahan kritis di Kabupaten Tanah Laut mencapai 54.929 Ha. Areal tersebut berada pada hutan di Kawasan hutan lindung 15.775 Ha dan di kawasan budidaya 39.154 Ha. Luas lahan sangat kritis mencapai 17.307 Ha, areal tersebut berada pada hutan di Kawasan hutan lindung 1.374 Ha dan di kawasan budidaya 15.933 Ha

**Gambar 2.4. Persentase Lahan Hutan**



#### 2.1.3.2 Lahan Persawahan

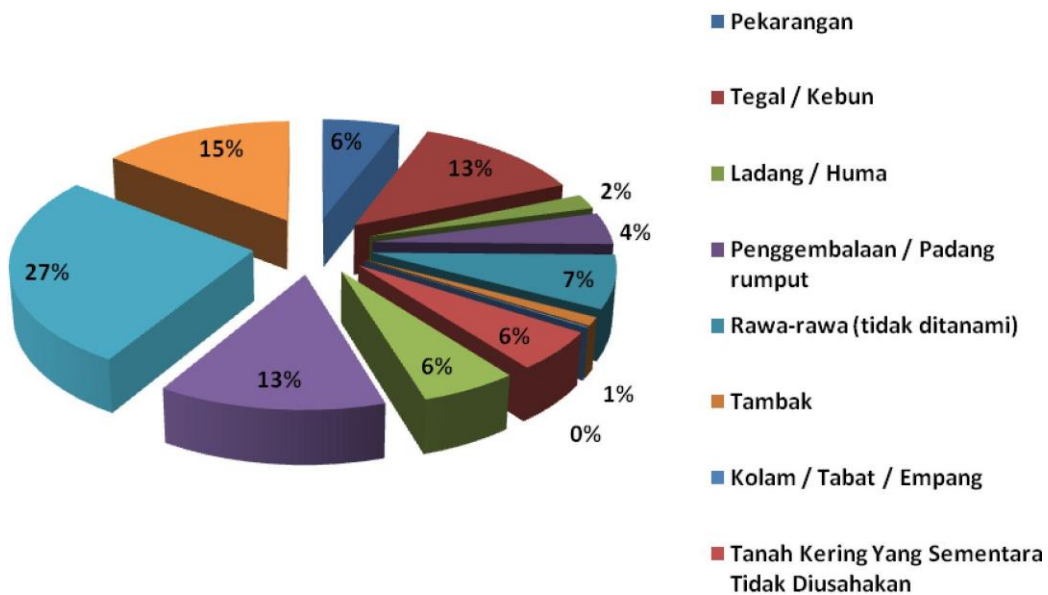
Lahan persawahan tercatat 76.143 Ha yang terbagi menjadi sawah irigasi 9.189 Ha, sawah tadah hujan/non irigasi 24.271

Ha, sawah pasang surut 15.363 Ha, sawah lainnya 27.320 Ha.

### 2.1.3.3 Lahan Kering

Lahan kering yang ada di Kabupaten Tanah Laut seluas 177.069 Ha, dengan perincian sebagai berikut pekarangan seluas 15.972 Ha, tegal/kebun seluas 35.389,5 Ha, Ladang/Huma seluas 5.679 Ha, penggembalaan/ padang rumput seluas 12.167 Ha, rawa-rawa (tidak ditanami) seluas 20.343 Ha, tambak seluas 3.167 Ha, kolam/tabat/empang seluas 417 Ha, tanah kering yang sementara tidak diusahakan seluas 15.064 Ha, Tanah yang ditanami kayu-kayuan/hutan rakyat seluas 15.730 Ha, hutan negara seluas 36.680 Ha, perkebunan seluas 73.233 Ha, dan lain-lain seluas 39.939 Ha.

**Gambar 2.5. Fisiografi lahan kering di kabupaten tanah laut**



### 2.1.4. Iklim

Iklim merupakan kondisi rata-rata dari semua peristiwa yang terjadi di atmosfer yang terdapat pada suatu daerah yang luas serta pada waktu relatif lama. Temperatur udara di Kabupaten Tanah Laut terendah (minimum) berkisar antara 20,0°C yang terjadi pada bulan Nopember dan Desember sampai dengan 23.3°C yang

terjadi pada bulan Januari dan temperatur udara tertinggi (maksimum) di Kabupaten Tanah Laut yaitu 29,2°C yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan 35,2°C yang terjadi pada bulan Maret dan Oktober dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 26,7°C yang terjadi pada bulan Juli sampai 28,1°C yang terjadi pada bulan April dan Mei. Kelembaban udara di Kabupaten Tanah Laut terendah 77,1 % yang terjadi pada Bulan Februari sedangkan tertinggi 85,2% yang terjadi pada Bulan Juni.

Sebagaimana musim di Indonesia pada umumnya, di Kabupaten Tanah Laut hanya dikenal dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Pada bulan Maret dan April arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Mei sampai dengan Desember arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan AprilMei dan Oktober-Nopember. Curah hujan di Kabupaten Tanah Laut yaitu sebesar 203,8 mm sedangkan curang hujan terendah sebesar 62,0 mm/th pada bulan April sedangkan curang hujan tertinggi sebesar 488,6 mm/th pada bulan Nopember.

Sedangkan untuk Kecepatan Angin di Kabupaten Tanah Laut rata-rata 2,30 knot, kecepatan angin terendah adalah 1,70 knot terjadi pada bulan Juni dan kecepatan angin tertinggi 3,70 knot terjadi pada bulan Desember.

## **2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Sebuah konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dan ditegaskan bahwa secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan,

pengelolaan dan pengawasan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sehingga tidak mengalami defisit fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan *fiscal capacity* daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah.

#### **2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian makro suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Pendapatan Regional. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Hasil penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dihitung menurut harga tahun dasar, dimana tahun dasar yang digunakan saat ini adalah tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan. Dengan demikian, PDRB merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan dapat pula digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Di samping itu, penghitungan PDRB ini menggunakan konsep

domestic, artinya seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di daerah/wilayah tertentu dihitung sebagai bagian dari nilai tambah yang dihasilkan daerah tersebut tanpa memperhatikan kepemilikan dari faktor produksi. Dengan kata lain, PDRB menunjukkan gambaran *Production Originated*.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut periode 2008-2013 rata-rata 6,0 – 6,2 % dan pada tahun 2013 ditargetkan mencapai 6,5 %. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Tanah Laut dalam kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Hambatan pertumbuhan pada periode ini adalah masalah energi (melonjkanya harga minyak dan terbatasnya pasokan listrik); dampak perubahan iklim dan harga produk pangan impor yang menjadi bahan baku industri pengolahan

Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun 2008 - 2012

	Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata 2008-2012
1	Pertanian	2,10	3,52	3,50	3,78	4,32	3,44
2	Pertambangan & Penggalian	6,53	6,55	7,80	8,30	5,45	6,93
3	Industri pengolahan	8,76	8,76	8,80	8,90	8,94	8,83
4	Listrik dan Air Bersih	4,48	4,62	4,86	5,31	6,12	5,08
5	Bangunan	10,63	10,65	9,53	9,34	9,68	9,97
6	Perdagangan, Hotel dan restoran	4,77	4,59	4,71	4,78	4,80	4,73
7	Transportasi & Komunikasi	4,79	5,15	5,80	7,20	7,38	6,06
8	Keuangan & Jasa Persh	11,70	7,95	8,59	8,36	8,34	8,98
9	Jasa-Jasa	8,66	8,60	9,42	9,13	8,24	8,81
	<b>PDRB</b>	<b>5,40</b>	<b>5,77</b>	<b>6,03</b>	<b>6,24</b>	<b>6,15</b>	<b>5,92</b>

Sumber : BPS Kalsel dan BPS Kabupaten Tanah Laut, beberapa Edisi  
Keterangan \* : angka sementara

Pada capaian lima tahun terakhir (2008-2012); pertumbuhan

sektor pertanian selama lima tahun terakhir semuanya di bawah rata-rata pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut walaupun trendnya terlihat meningkat. Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian hanya sebesar 3,44 % sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada periode yang sama 5,92 %. Masih relatif rendahnya pertumbuhan sektor pertanian ini disebabkan persoalan semakin terbatasnya lahan-lahan subur akibat alih fungsi lahan; perubahan iklim dan juga semakin berkurangnya jumlah petani. Pertumbuhan sektor pertanian sendiri utamanya didorong oleh sub sektor peternakan dan hasilnya, tanaman perkebunan dan tanaman bahan makanan.

Sektor lainnya yang peranannya tidak bisa diabaikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan pertambangan dan penggalian terutama didorong oleh batubara dan biji besi. Rata-rata pertumbuhan sektor ini masih diatas rata-rata pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut. Pada periode tahun 2008-2012; pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mencapai rata-rata 6,93 % sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada periode yang sama hanya 5,92 %.

Pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil pada periode 2008-2012 adalah sektor industri pengolahan. Pertumbuhan sektor ini terutama didorong oleh masuk dan beraneka ragamnya industri yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Rata-rata pertumbuhan sektor ini jauh diatas rata-rata pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut. Pada periode tahun 2008-2012; pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai rata-rata 8,83 % sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada periode yang sama hanya 5,92 %. Kinerja pertumbuhan sektor industri pengolahan ini semakin menegaskan bahwa Kabupaten Tanah Laut sedang menuju daerah industri. Hanya saja pertumbuhan sektor ini masih terlihat stagnan sehingga dari tahun 2008 sampai tahun 2012 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Ke depan; industri Kabupaten Tanah Laut perlu lebih meningkatkan upaya pengembangan industri kecil dan menengah.

Sektor listrik dan air bersih mengalami pertumbuhan yang rendah dalam lima tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan sektor ini pada periode 2008-2012 hanya 5,08 % sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada periode yang sama 5,92 %. Rendahnya pertumbuhan sektor ini karena sub sektor air bersih dan atau sistim air perpipaan masih belum mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Seperti halnya sektor industri pengolahan maka sektor bangunan juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Pada periode tahun 2008-2012; pertumbuhan sektor bangunan mencapai rata-rata 9,97 % sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada periode yang sama hanya 5,92 %. Hal ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan untuk pelayanan publik oleh pemerintah maupun juga pembangunan oleh pihak swasta telah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran ternyata pertumbuhannya selama periode tahun 2008-2012 hanya mencapai rata-rata 4,73 %; dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut yang mencapai 5,92 % pada periode yang sama. Rendahnya pertumbuhan sektor ini (terutama perdagangan) menunjukkan bahwa hasil utama dari sumberdaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut tidak di transaksikan di Kabupaten Tanah Laut tetapi di bawa keluar untuk selanjutnya transaksi perdagangannya terjadi diluar. Pada sisi lain, Kabupaten Tanah Laut yang sesungguhnya mempunyai tempat tujuan wisata yang cukup banyak ternyata belum mampu menumbuhkan sub sektor hotel dan restoran.

Sektor pengangkutan dan komunikasi utamanya tumbuh cukup baik yaitu rata-rata 6,06 % dengan trend yang meningkat. Pertumbuhan sektor ini terutama didorong oleh komunikasi yang memang terus berkembang.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa juga menunjukkan pertumbuhan yang baik dan diatas rata-rata Kabupaten Tanah Laut.

Pada periode tahun 2008-2012; pertumbuhan sektor ini mencapai 8,98 %. Pertumbuhan sektor ini utamanya didorong oleh perbankan dan persewaan. Hal yang sama juga pada sektor jasa didorong oleh kegiatan pemerintahan umum.

Sektor pertanian pertumbuhannya diharapkan stabil yang merupakan refleksi kemandirian pada sektor pertanian. Pertumbuhan diharapkan dari efek pengembangan keunggulan daerah baik keunggulan kompetitif maupun komparatif. Sektor yang diharapkan tumbuh dan masuk ke dalam sektor unggulan adalah Industri, perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa-jasa. Namun pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 5,92 % tersebut ternyata masih belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tiap tahun semakin meningkat. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa pencari kerja terdidik mencapai 6.805 orang, meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya 6001 orang atau ada peningkatan sebanyak 804 orang. Memang tahun 2011 mengalami penurunan hanya 1.268 orang, namun diperkirakan penurunan tersebut karena sebagian besar dari pencari kerja tersebut tidak memperbaharui lagi pencatatannya di Dinas Tenaga Kerja atau pergi keluar dari Kabupaten Tanah Laut untuk mencari kerja. Selain itu ditengarai bahwa pengangguran terselubung (bekerja hanya paruh waktu) di Kabupaten Tanah Laut masih cukup besar (tabel 4.1.b). Ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Tanah Laut yang dicapai sekarang masih dominan didorong oleh investasi padat modal. Sektor pendorong pertumbuhan ekonomi juga terbatas pada beberapa sektor saja terutama tambang dan perkebunan.

Tabel 4.1b. Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan 2011

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)	5	2	7
2. Sekolah Dasar/Sederajat	25	2	27

3.	SLTP/Sederajat	98	12	110
4.	SLTA/Sederajat	667	226	893
5.	Sarjana Muda	44	88	132
6.	Sarjana	53	46	99
<b>Jumlah</b>		<b>892</b>	<b>376</b>	<b>1 268</b>
<b>2010</b>		<b>3 363</b>	<b>3 442</b>	<b>6 805</b>
<b>2009</b>		<b>3 580</b>	<b>2 421</b>	<b>6 001</b>

Bila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan maka dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012); rata-rata pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih diatas rata-rata Kalimantan Selatan. Rata-rata Kabupaten Tanah Laut mencapai 5,92 % sedangkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan hanya mencapai 5,84 % seperti terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Data Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2012 Menurut Wilayah

Waktu	Prov. Kalimantan Selatan	Kab. Tanah laut
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2008	6,45	5,40
2009	5,29	5,77
2010	5,59	6,03
2011	6,12	6,24
2012	5,73	6,15
<b>Rata-rata</b>	<b>5,84</b>	<b>5,92</b>

Sumber : BPS Prov. Kalsel

Selain pertumbuhan ekonomi; sasaran makro lainnya juga menunjukkan hasil yang mengembirakan khususnya PDRB Perkapita seperti terlihat pada Tabel 4.3. PDRB perkapita menunjukkan trend meningkat dan tahun 2011 sudah mencapai Rp 15.511.318 (harga berlaku) dan Rp 7.952.240 (harga konstan). Pada RPJPD Kabupaten

Tanah Laut tahun 2005-2025 disebutkan bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan, salah satu indikatornya adalah pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebesar 3000 dollar atau dengan kurs sekarang sekitar Rp 33 juta. Bila trend peningkatan PDRB perkapita dapat terus dipertahankan maka sasaran RPJPD tersebut sudah akan tercapai hanya pada tahun 2020-an, lebih cepat dari prediksi semula. Hanya perlu diwaspadai adalah penurunan ekspor sektor tambang (batubara); kemungkinan kenaikan BBM di masa datang dan fluktuasi harga sawit. Bila hal ini terjadi maka akan menghambat laju peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tanah Laut pada masa yang akan datang.

Tabel 4.3. Pendapatan Regional Kabupaten Tanah Laut 2009 - 2011

Rincian Items	2009	2010*	2011*
PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	3 586 420 384	4 143 985 741	4 706 599 249
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rp)	2 142 793 728	2 272 020 607	2 412 948 034
PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	12 369 569	13 984 220	15 511 318
Indeks Perkembangan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (%)	212,21	239,91	266,11
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (%)	109,60	113,05	110,92
PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rp)	7 390 498	7 667 120	7 952 240
Indeks Perkembangan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)	126,79	131,53	136,43
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)	103,26	103,74	103,72

Sumber : BPS Kalsel dan BPS Kabupaten Tanah Laut, beberapa Edisi

Keterangan \* : angka sementara

Bila dilihat dari struktur ekonomi yaitu peranan komponen kegiatan ekonomi yang membentuk ekonomi suatu wilayah, maka ketiga pembentuk kelompok struktur ekonomi yaitu kelompok primer (pertanian dan pertambangan penggalian); kelompok sekunder (industri) dan kelompok tersier (perdagangan dan jasa-jasa) menunjukkan besaran yang relatif tidak terlalu berbeda. Walaupun

demikian, kelompok primer masih dominan yaitu sumbangannya pada tahun 2012 yang mencapai 38, 23 %; kelompok sekunder 22,79 % dan kelompok tersier 38,99 %. Pada jangka pendek, struktur ekonomi lebih menggambarkan corak perekonomian suatu daerah. Memang sudah terjadi pergeseran struktur perekonomian namun sektor pertanian dan pertambangan (primer) masih relatif besar dan dalam kurun waktu lima tahun terakhir relatif stagnan. Padahal yang diharapkan adalah terjadinya perubahan struktur dimana kontribusi sektor primer menurun dan sektor sekunder (industri) meningkat. Sesuai visi dalam RPJPD tahun 2005-2025; Kabupaten Tanah Laut dirancang dan dicitakan menjadi daerah industri dan pelabuhan. Oleh sebab itu seharusnya sektor industri menjadi prioritas terutama melalui pengembangan industri kecil berbasis pertanian. Ke depan agar terjadi pergeseran atau transformasi struktur maka diperlukan pengembangan industri rumahtangga, kecil dan menengah.

Salah satu indikator makro ekonomi lainnya adalah inflasi. Ada kelemahan bila menganalisis indikator pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan melihat angka inflasi karena pengukuran angka inflasi tersebut hanya dilakukan di Banjarmasin. Namun walau demikian, angka-angka inflasi yang dihasilkan tersebut tetap dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pendekatan. Inflasi berdasar data bulanan wilayah Banjarmasin tahun 2012-2013 telah menunjukkan trend penurunan setelah meningkat pada bulan Juli dan Agustus yaitu saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri (Tabel 4.4).

Tabel 4.4. Data Inflasi Bulanan Tahun 2012-2013 Kota Banjarmasin

Waktu	<b>Kota Banjarmasin</b>	
	<b>Inflasi Bulanan</b>	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Januari	2,92	1,14
Februari	-0,31	0,43
Maret	-0,14	0,19
April	-0,01	0,04
Mei	-0,29	-0,64
Juni	0,59	0,41
Juli	0,87	2,24

Agustus	0,70	1,99
September	-0,20	-0,60
Oktober	-0,03	-0,22
November	0,91	0,62
Desember	0,85	-

Selain sasaran makro tersebut, kaitannya dengan sektor ekonomi keuangan adalah kecukupan kebutuhan fiskal untuk pembangunan daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Sebuah konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dan ditegaskan bahwa secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan daerah. Selama ini APBD Kabupaten Tanah Laut terus meningkat dan belanja pembangunan sudah lebih besar dibanding belanja rutin. Kedepan, Tanah Laut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar terus mampu mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sehingga masa yang akan datang tidak mengalami defisit fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan *fiscal capacity* daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah.

### 2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM disusun salah satunya untuk mengukur kualitas pelaksanaan program dan melihat dampak (*outcome*) terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. IPM Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun terakhir sudah diatas rata-rata Kalimantan Selatan. Tabel berikut (Tabel 4.5) menyajikan estimasi sasaran pencapaian IPM dan variabel pembentuknya.

Tabel 4.5. IPM dan variabel pembentuknya di Kabupaten Tanah Laut tahun 2008-2012 serta perbandingannya dengan Kalimantan Selatan

Variabel	Prov. Kalimantan Selatan					Kab. Tanah laut				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Angka Harapan Hidup</b>	63,1 0	63,4 5	63,8 1	64,1 7	64,5 2	67,9 0	68,1 4	68,3 9	68,7 5	69,1 1
<b>Angka Melek Huruf</b>	95,3 0	95,4 1	95,9 4	96,1 4	96,4 3	93,1 8	93,2 8	93,8 9	95,1 2	96,4 4
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>68,7 2</b>	<b>69,3 0</b>	<b>69,9 2</b>	<b>70,4 4</b>	<b>71,0 8</b>	<b>70,4 0</b>	<b>70,6 2</b>	<b>71,6 2</b>	<b>72</b>	<b>72,7 5</b>
<b>Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) (Ribu Rupiah)</b>	630, 83	634, 59	637, 46	640, 73	643, 66	632, 18	632, 86	633, 74	634, 93	638, 23
<b>Rata-Rata Lama Sekolah</b>	7,44	7,54	7,65	7,68	7,89	6,61	6,62	6,88	7,26	7,27

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2013

Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan pencerminan Kualitas Sumberdaya Manusia tentunya didesign untuk menciptakan kemandirian dan keunggulan dalam suasana yang religius. Indeks pendidikan diharapkan tumbuh seiring dengan peningkatan Angka Partisipasi Murni, Angka Melek huruf dan Lamanya Sekolah (*life of Education*).

#### **4.2.1. Perkembangan Komponen IPM**

Secara konseptual, pembangunan manusia diukur dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang komponennya adalah : (a) lamanya hidup yang didekati dengan angka harapan hidup; (b) tingkat pendidikan yang didekati dengan angka melek huruf dan lama sekolah; (c) standar hidup yang didekati dengan kemampuan daya beli atau pengeluaran RT.

##### **4.2.1.1. Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup erat kaitannya dengan sektor kesehatan. Faktor kesehatan sebagai modal dasar untuk meng-*create* perekonomian yang lebih maju, maka Indeksnya terus dipacu untuk ditingkatkan. Indeks kesehatan yang dicerminkan dari Angka Kesakitan penduduk, lamanya sakit, angka harapan hidup, persalinan yang ditolong bidan dan indikator lainnya.

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, klinik bidan praktek swasta, klinik dokter praktek swasta, toko obat dan apotek. Pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut masih belum dapat memenuhi rasio kecukupan fasilitasi pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk. Meskipun rumah sakit Boeyasin yang berada di Kabupaten Tanah Laut terus dikembangkan namun jumlah tempat tidur yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat.

Angka harapan hidup di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan sejalan dengan membaiknya perekonomian dan sejalan pula dengan semakin membaiknya fasilitas serta layanan bidang kesehatan. Pada Tabel 4.5 diatas terlihat bila pada tahun 2008 angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Tanah Laut masih 67,90 tahun maka pada tahun 2012 sudah mencapai 69,11 tahun atau mengalami penambahan sebesar 1,21 tahun dalam kurun waktu empat tahun. Penambahan tersebut terbilang sangat berarti. Bila dibandingkan dengan Kalimantan Selatan maka angka harapan hidup di Kabupaten Tanah Laut pada periode 2008-2012 selalu lebih tinggi.

#### **4.2.1.2. Angka Melek Huruf**

Seperti juga halnya dengan angka harapan hidup; maka angka melek huruf sebagai salah satu komponen pembentuk IPM juga menunjukkan trend yang terus meningkat. Walau peningkatan tersebut relatif kecil namun cukup berarti karena sebelumnya diketahui bahwa angka melek huruf masih relatif rendah. Pada tahun 2012 angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut sudah mencapai angka 96,44 yang berarti hanya tinggal 3,56 % saja penduduk yang buta huruf.

#### **4.2.1.3. Pengeluaran Per Kapita**

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Tanah Laut juga semakin meningkat walaupun penambahannya relatif sedikit. Pengeluaran dihitung sebagai proxy dari pendapatan masyarakat. Pada tahun 2008; pengeluaran per kapita masyarakat mencapai Rp 632.000 dan tahun 2012 ternyata hanya mengalami peningkatan menjadi hanya sebesar Rp. 638.000. Terjadi stagnasi peningkatan pengeluaran pada tahun 2009 dan 2010.

#### **4.2.1.4. Rata-rata Lama Sekolah**

Salah satu indikator yang juga menjadi komponen penyusun IPM adalah rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2008; rata-rata lama sekolah anak-anak di Kabupaten Tanah Laut baru mencapai 6,61 tahun. Namun pada tahun 2012 sudah mencapai 7,27 tahun. Peningkatan ini dapat menjadi modal untuk terus ditingkatkan sehingga Kabupaten Tanah Laut dapat menuntaskan wajib belajar 9 tahun dimana rata-rata lama sekolah sudah mendekati angka 9 tahun.

#### **4.2.2. Perbandingan Angka IPM antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kalimantan Selatan**

Bila angka IPM Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan jelas terlihat bahwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2012; angka IPM Kabupaten Tanah Laut selalu lebih tinggi dibanding angka Provinsi Kalimantan Selatan (lihat Tabel 4.5). Namun bila dilihat dari komponen pembentuknya maka komponen angka melek huruf; pengeluaran perkapita dan rata-rata lama sekolah masih dibawah rata-rata Kalimantan Selatan (Tabel 4.5). Angka melek huruf pada tahun 2012 sudah mampu menyamai rata-rata Kalimantan Selatan setelah pada tahun-tahun sebelumnya dibawah rata-rata Kalimantan Selatan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembuat kebijakan di Kabupaten Tanah Laut sehingga komponen ini dapat meningkat lebih tinggi lagi dan

otomatis juga akan meningkatkan angka IPM lebih tinggi lagi.

## **2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **2.3.1 Fokus Layanan urusan Wajib**

#### **1.3.1.1 Pendidikan**

Pendidikan merupakan proses sosialisasi sekaligus pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial, pendidikan juga dapat menjadi instrument utama dalam internalisasi, adaptasi, akulturasi, dan penciptaan budaya baru, disamping sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan terbukti dapat memacu pertumbuhan suatu Negara atau daerah, peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan produktivitas yang nantinya akan meningkatkan pendapatan. Hal ini pada gilirannya akan membuat kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat dapat diturunkan, sehingga kesejahteraan dapat terwujud.

Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan, peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional agar seluruh rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan dimanapun berada dapat mengikuti pendidikan paling tidak sampai jenjang pendidikan dasar (wajib belajar Sembilan tahun). Selain itu pemerintah terus berupaya memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan agar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan, serta management pelayanan pendidikan yang transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel.

#### **a. Pendidikan Umum**

Fasilitas pendidikan yang ada meliputi Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan umum meliputi TK, SD, SLTP, SLTA baik negeri maupun swasta, di Kabupaten Tanah Laut

juga sudah ada memiliki 1 unit Pendidikan Tinggi, yaitu Politeknik Industri (Politri) Tanah Laut.

Semua fasilitas pendidikan ini, sudah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. Berikut ini dijelaskan tentang jumlah dan penyebarannya.

1. Fasilitas Taman Kanak-Kanak berjumlah 209 buah terdiri dari TK Negeri sebanyak 4 buah dan TK Swasta sebanyak 205 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 9.958 siswa dan guru sebanyak 1.057 guru
2. Fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 3 buah terdiri dari SLB Negeri sebanyak 1 buah dan SLB Swasta sebanyak 2 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 99 siswa dan guru sebanyak 37 guru.
3. Fasilitas SD sebagian besar adalah merupakan milik pemerintah yaitu sejumlah 230 buah dan hanya 4 buah SD swasta, dengan jumlah siswa sebanyak 38.820 siswa dan guru sebanyak 2.980 guru.
4. Fasilitas SLTP berjumlah 48 buah terdiri dari SLTP Negeri sebanyak 46 buah dan SLTP Swasta sebanyak 2 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 10.964 siswa dan guru sebanyak 816 guru.
5. Fasilitas SLTA berjumlah 13 buah terdiri dari SLTA Negeri 9 buah dan SLTA Swasta 4 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 4.919 siswa dan guru sebanyak 310 guru.
6. Fasilitas SMK berjumlah 6 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 2.452 siswa dan guru sebanyak 183 guru.
7. Pendidikan Tinggi 1 buah Politeknik Industri Tanah Laut terletak di kecamatan Pelaihari, dengan jumlah siswa sebanyak 107 mahasiswa dan jumlah dosen sebanyak 17 dosen.

#### **b. Pendidikan Keagamaan**

Fasilitas pendidikan keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Selain itu, di Kabupaten Tanah Laut. Semua fasilitas pendidikan ini, sudah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. Berikut ini dijelaskan tentang jumlah dan penyebarannya.

1. Jumlah fasilitas pendidikan agama madrasah ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 18 buah yang terdiri dari 5 MI negeri dan 13 MI swasta, dengan jumlah siswa sebanyak 3.727 siswa dan guru sebanyak 256 guru
2. Fasilitas pendidikan agama Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebanyak 17 buah, terdiri dari MTs Negeri sebanyak 5 buah dan
3. MTs Swasta sebanyak 12 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 4.613 siswa dan guru sebanyak 334 guru.
4. Madrasah Aliyah tercatat sebanyak 7 buah, terdiri dari MA Negeri sebanyak 1 buah dan MA Swasta sebanyak 6 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 1.294 siswa dan guru sebanyak 116 guru.

#### **1.3.1.2. Kesehatan**

Kesehatan merupakan hak semua warga Negara yang dijamin oleh undangundang (UU). Kesehatan juga merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM), selain tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk itu pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Peningkatan kualitas layanan kesehatan telah dilakukan dengan mengembangkan kemampuan layanan RSUD Boejasin, peningkatan kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas, serta penambahan SDM di bidang kesehatan, membebaskan biaya berobat kepada penduduk miskin, perberlakuan kartu sehat bagi para masyarakat miskin, seniman,

pemangku, lansia dan veteran, serta subsidi obat-obatan. Disamping pembangunan pusat-pusat layanan kepada masyarakat telah banyak dilakukan oleh pihak swasta, seperti klinik, rumah bersalin dan yang sejenisnya. Dimasa yang akan datang upaya peningkatan kualitas layanan dengan biaya layanan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah akan diprioritaskan.

Sarana kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut yaitu RSUD H. Boejasin yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Ruang Bersalin, Dokter, dan Bidan. Keberadaan fasilitas kesehatan pada wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Jumlah Posyando di Kabupaten Tanah Laut selalu bertambah tiap tahunnya dikarenakan tingginya kebutuhan akan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2010 jumlah posyandu sebesar 267 unit dan bertambah menjadi 273 unit pada tahun 2011. Posyandu ini terletak tersebar di seluruh desa di Kabupaten Tanah Laut.
2. Polindes di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebanyak 58 unit tersebar di masing-masing kecamatan.
3. Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Pada tahun 2011 Puskesmas sebanyak 17 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 60 Unit dan Puskesmas keliling sebanyak 17 Unit
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan rumah sakit tipe C dengan jumlah 1 unit di Kecamatan Pelaihari.
5. Jumlah klinik dan praktek dokter sebanyak 43 Unit
6. Jumlah desa yang terlayani air bersih hingga tahun 2011 adalah sebanyak 60.265 Rumah Tangga.

Industri Farmasi di Kabupaten Tanah Laut tercatat 13 buah yang terdiri dari Farmasi 1 buah dan apotik dan toko obat 11 gudang farmasi 1 buah. Jumlah orang sakit jiwa tercatat sebanyak 834 orang. Jumlah penderita narkoba tercatat sebanyak 0 orang dan jumlah anak balita (0-3 tahun) tercatat sebanyak 31.351 orang

Secara umum jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut 1.176,90 orang. sebagian besar tenaga kesehatan yang ada adalah perawat, dukun anak dan bidan. Jumlah dokter umum yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 44 orang, dokter gigi sebanyak 11 orang dan dokter spesialis sebanyak 5 orang. Perawat sebanyak 272 orang dan bidan sebanyak 227 orang.

#### **1.3.1.3. Transportasi**

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting dan strategis untuk memperlancar aktivitas roda perekonomian. Semakin meningkatnya usaha pembangunan antar wilayah di Tanah Laut menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain.

Panjang jalan di Tanah Laut dibagi menjadi 3 yaitu : Jalan Nasional dengan panjang jalan yaitu 140,76 km, Jalan Provinsi dengan panjang jalan yaitu 104,907 km, dan Jalan Kabupaten dengan panjang jalan yaitu 1.380,45 km. Dan untuk kondisi jalan yaitu ; kerikil sepanjang 390,6 km, aspal sepanjang 641,28 km, dan Tanah sepanjang 348,41 km.

Penyediaan infrastruktur jalan khususnya yang berkualitas selalu menjadi fokus perhatian dalam setiap pembangunan akan tetapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih pula memiliki jalan yang mengalami rusak berat sepanjang 159,63 km, rusak ringan sepanjang 124,66 km, ditambah beban pemeliharaan rutin terhadap jalan-jalan yang sudah beraspal lapen dan hotmix.

Keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur wilayah.

Keadaan jembatan yang di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2011 berjumlah 427 buah dengan panjang jembatan 21.755 km.

#### **1.3.1.4. Perumahan**

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, setelah pangan, sandang, air bersih, pendidikan dan kesehatan. Rumah adalah tempat berlindung, sekaligus tempat membangun suatu keluarga yang sejahtera. Memiliki rumah yang layak huni merupakan dambaan setiap keluarga, sehingga seiring dengan semakin bertambahnya penduduk kebutuhan akan perumahan juga semakin meningkat.

Dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan perumahan merupakan sasaran yang penting. Sejalan dengan usaha ini akan ditingkatkan pula usaha untuk perbaikan lingkungan pemukiman dan perbaikan sarana prasarana pengairan dan lain sebagainya.

Rumah sehat disertai fasilitas yang memadai merupakan kebutuhan bagi setiap keluarga, karena dapat mempengaruhi keadaan penghuninya dan secara tidak langsung mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Masalah yang berkaitan dengan kondisi perumahan sering ditemui di Indonesia baik diperkotaan maupun pedesaan. Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang dihuni, menunjukkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan hasil Susenas 2012 dari keseluruhan rumah tangga yang ada, rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri sekitar 85,10 persen, sisanya tinggal di rumah kontrakan, sewa,

dinas dan lainnya.

Berdasarkan luas lantai rumah yang didiami, rumah tangga yang mendiami rumah dengan luas lantai kurang dari 21 m<sup>2</sup> ada sekitar 3,86 persen, yang tinggal pada rumah dengan luas lantai 21-35 m<sup>2</sup> ada sebanyak 19,82 persen, sedangkan jumlah rumah tangga yang tinggal pada rumah dengan luas lantai 36-70 m<sup>2</sup> ada sekitar 51,45 persen dan sisanya sebanyak 24,87 persen tinggal pada rumah dengan luas lantai lebih dari 70 m<sup>2</sup>.

Fasilitas-fasilitas lainnya yang menjadi pendukung perumahan seperti air minum, tempat pembuangan air besar dan sumber penerangan perlu diketahui juga perkembangan keberadaannya. Fasilitas - fasilitas ini dapat dipakai sebagai variabel pendukung yang dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Berdasarkan jenis sumber air minum yang digunakan nampaknya penduduk Kabupaten Tanah laut masih banyak yang mengkonsumsi air minum yang berasal dari sumber air minum yang rentan terhadap pencemaran, misalnya sumur tak terlindung dan air sungai. Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum yang berasal dari sumur tak terlindung dan air sungai mencapai 62,03 persen dari keseluruhan rumah tangga.

Ditambah lagi jarak sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga terhadap tempat penampungan tinja masih ada yang kurang dari 10 meter, padahal syarat minimum untuk jarak sumber air minum dengan tempat penampungan tinja adalah minimal 10 meter. Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum yang berasal dari sumber air minum sumur baik yang terlindung maupun tak terlindung dan mata air tak terlindung yang jaraknya dengan penampungan tinja kurang dari 10 meter sekitar 18,57 persen.

Salah satu fasilitas lainnya yang hendaknya juga dimiliki oleh rumah tangga adalah tempat buang air besar. Sekitar 66,73 persen

rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri, sedangkan yang menggunakan fasilitas buang air besar secara bersama atau milik umum berjumlah 22,39 persen dan yang tidak memiliki fasilitas ini sebesar 10,87 persen.

Masih besarnya persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar ini perlu diberi perhatian lebih lanjut karena dengan tidak adanya fasilitas buang air besar mengakibatkan orang untuk melakukannya di sembarang tempat, yang nantinya akan berdampak pada pencemaran lingkungan sehingga akan membuat orang sekitarnya menjadi rawan terserang penyakit.

#### **1.3.1.5 Lingkungan Hidup**

Pesatnya pembangunan dan penambahan penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menimbulkan permasalahan lingkungan antara lain sanitasi lingkungan yang rendah, pelanggaran dan perambahan kawasan yang berfungsi lindung, penyimpangan pemanfaatan ruang, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem dan sumberdaya alam lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Tanah Laut dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan, meliputi pembenahan sarana dan prasarana, pembuatan peraturan, dan pedoman pengelolaan lingkungan, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, pemantauan lingkungan. Dalam praktek, beberapa upaya yang telah dilakukan seperti penghijauan, pengelolaan persampahan, pembinaan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Disamping prakarsa dari pemerintah, upaya pelestarian lingkungan juga dilakukan oleh masyarakat baik secara kelompok maupun individu.

Di Kabupaten Tanah Laut lahan potensial kritis seluas 54.929 Ha, terdapat pada areal kawasan sungai dan ditumbuhi

alang-alang. Dari tahun 2009 sampai 2011 telah dilakukan rehabilitasi lahan potensial kritis.

Lingkungan Hidup hal yang harus dilestarikan sebagai penyeimbang alam dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten baik itu pertumbuhan penduduk, kawasan permukiman maupun kawasan perdagangan dan jasa serta industri.

### **1.3.1. 6 Komunikasi dan Informatika**

Ditengah persaingan informasi yang ditandai menjamurnya sarana telekomunikasi, kecepatan dan infrastruktur komunikasi multak diperlukan. PT Pos Indonesia sebagai salah satu bagian dari BUMN yang berwenang dalam melayani dan mengendalikan arus informasi serta komunikasi, memiliki andil besar dalam menciptakan banyak kemudahan dalam berkomunikasi bagi masyarakat luas.

Tidak hanya itu, lembaga ini juga berperan dalam delivery maupun pengiriman surat-surat, paket pos, wesel dan lain sebagainya. Namun dari segi prasarana yang ada ternyata jumlah kantor pos yang ada tidak mengalami perubahan dari tahun 2009 hingga tahun 2011, yaitu sebanyak 8 unit.

Perangkat surat mungkin salah satu sarana untuk berkomunikasi, namun masih banyak sarana lainnya seperti telepon kabel, telepon seluler, telegram, fax ataupun telex bahkan di era serba elektronik, teknologi informasi juga memegang peranan penting melalui internet dan emailnya. Apalagi sekarang ini kepemilikan telepon seluler sampai ke pelosok desa, hal ini sebagai alternative untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak terjangkau dengan telepon kabel.

Jumlah pelanggan telepon kabel yaitu sebanyak 2.813 pelanggan dan jumlahp pelanggan internet (speedy) yaitu sebanyak 799 pelanggan, serta jumlah warnet adalah sebanyak 29

buah.

### **1.3.1.7 Penataan Ruang**

Perencanaan tata ruang terutama penggunaan lahan sangat dibutuhkan, karena dengan perencanaan tata ruang yang baik segala ketidakteraturan dalam penggunaan lahan dapat dicegah sejak dini.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut Tahun 1993 - 2003 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Dati II Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1993, dalam penerapannya mengalami berbagai masalah, kendala, dan tantangan akibat dari hampir seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki nilai strategis dan sangat potensial untuk dikembangkan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari pesatnya pembangunan akibat laju pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah ada, sehingga menimbulkan tekanan pada lingkungan hidup, pada akhirnya mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.

Luas kawasan lindung berupa hutan di Kabupaten Tanah Laut adalah 15.861 Ha atau sekitar 4,37% dari luas Kabupaten Tanah Laut, sedangkan luas kawasan lindung setempat tercatat sebesar 9.691,48 Ha atau sekitar 2,67% luas Kabupaten Tanah Laut. Luas kawasan permukiman 6.131,30 Ha atau 1,69%, luas kawasan industri 7.262,00 Ha atau 2,00%, luas lahan kritis sebesar 54.929 Ha.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan penataan ruang wilayah telah memprioritaskan 5 kawasan dengan masing-masing fungsi dan potensi strategisnya, yaitu :

1. Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Jorong

2. Kawasan pertanian dipusatkan di Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap
3. Kawasan Perikanan dipusatkan di Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap
4. Kawasan pertambangan dipusatkan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap
5. Kawasan wisata dipusatkan di Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Bajuin.

### **1.3.1. 8 Pemerintahan**

#### **a. Administrasi Pemerintahan**

Bidang pemerintahan terbagi menjadi administrasi pemerintahan, aparatur Negara dan organisasi daerah. Secara administratif Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 Kecamatan yaitu Panyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap, 130 Desa dan 5 Kelurahan, dan 1.504 Rukun Tetangga. Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2011 sebesar 74.766 rumah tangga. Jumlah rumah tangga terbanyak terdapat di Kecamatan Pelaihari yakni sebanyak 15.922 rumah tangga. Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Laut sebesar 274.526 jiwa.

Adanya pembentukan Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Tanah Laut yaitu Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Bajuin menyebabkan meningkatnya jumlah Kecamatan, Desa dan RT yang ada di Kabupaten Tanah Laut hal sampai pada tahun 2008 masih 9 Kecamatan, 133 Desa dan 5 Kelurahan, pada tahun 2009 menjadi 11 Kecamatan dan jumlah desa bertambah 135 desa dan 5 Kelurahan. Jumlah desa terbanyak

terdapat di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 20 desa dan 5 Kelurahan.

#### **b. Aparatur Negara**

Aparatur Negara/Pegawai Negeri Sipil ( PNS) pada tahun 2011 ini sebanyak 6.031 orang, untuk golongan I sebanyak 174 orang, golongan II sebanyak 1.974 orang, golongan III sebanyak 2.622 orang dan golongan IV sebanyak 1.261 orang, dilihat dari data tersebut proporsi terbanyak PNS golongan III, jumlah PNS ini mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2010 sebanyak 5.939 orang.

Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, Formasi Jabatan Struktural dan Fungsional Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut tercatat sejumlah 4.610 orang, dengan rincian jumlah Pejabat Struktural sebanyak 631 orang dan Pejabat Fungsional sebanyak 4.059 orang serta jumlah pensiunan PNS sebanyak 123 orang.

#### **c. Organisasi Daerah**

Organisasi Daerah Kabupaten Tanah Laut dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yang bertempat di Kantor Bupati Tanah Laut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Kepala Sekretariat Daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 Asisten yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum dan kelompok Jabatan Fungsional, al mana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 8 Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

### **9. Ketenagakerjaan**

Dalam teori ekonomi makro, variable tenaga kerja merupakan variable terpenting untuk mengukur tingkat output suatu perekonomian. Model-model ekonomi juga selalu akan membedakan perekonomian yang full employment dengan perekonomian yang berada dibawah tingkat full employmet. Kedua model itu

tentu juga harus dibahas dalam pendekatan yang berbeda. Karena itu, dalam pembuatan kebijakan ekonomi, variabel tenaga kerja harus diperhitungkan, agar kebijakan ekonomi yang terbentuk dapat secara komprehensif memecahkan berbagai persoalan ekonomi, yang kerap kali berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.

Di Kabupaten Tanah Laut masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Tanah Laut diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Kalimantan Selatan khususnya Tanah Laut merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun juga. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan berpengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif.

Berdasarkan data pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan yaitu: Pencari kerja SD/ sederajat berjumlah 33 orang, pencari kerja SLTP/ sederajat berjumlah 405 orang, pencari kerja SLTA/ sederajat berjumlah 3.873 orang, pencari kerja Serjana Muda berjumlah 1.408 orang dan pencari kerja Sarjana berjumlah 1.086 orang.

### **2.3.2 Fokus Layanan urusan Pilihan**

#### **1. Pertanian**

##### **a. Pertanian Tanaman Pangan**

Pembangunan pertanian dalam arti luas mencakup pembangunan tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, peranan sektor pertanian adalah meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat petani, meningkatkan produksi dan

nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan penduduk dari kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan antar antar daerah dan antar golongan masyarakat, serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memegang peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok masyarakat yang terbesar, disamping mendukung pertumbuhan industri.

Areal pertanian di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar digunakan untuk menanam padi, jagung, kedelai serta singkong dan umbi-umbian. Tanaman Padi dengan luas areal produksi (panen) 43.838 Ha, dengan jumlah produksi gabah 175.669 ton dan beras 103.114 ton dan jumlah konsumsi beras 41.228 ton/tahun, sedangkan jagung luas areal produksi (panen) sebesar 11.099 Ha, dengan jumlah produksi sebesar 62.467 ton dan jumlah konsumsinya sebesar 62.467 ton/tahun, tanaman kedelai dengan luas areal produksi (panen) sebesar 727 Ha, dengan jumlah produksi sebesar 1.080 ton dan jumlah konsumsi sebesar 1.080 ton, industri pengolahan hasil pertanian sebanyak 20 buah, untuk singkong dan umbi-umbian dengan luas areal produksi (panen) sebesar 2.703 ha, dengan jumlah produksi sebesar 47.152 ton.

Luas kesesuaian lahan pertanian adalah lahan pasang surut/irigasi sebesar 24.552 Ha, lahan basah sebesar 76.143 Ha, lahan kering sebesar 177.069 Ha, lahan kelapa sebesar 1.179 Ha, lahan kelapa sawit sebesar 91.355 Ha, lahan karet sebesar 20.729 Ha, dan lahan kopi robusta sebesar 281 Ha.

## **b. Kehutanan**

Kabupaten Tanah Laut memiliki areal hutan seluas 156.291,97 Ha, yang terdiri dari hutan kawasan lindung dengan luas 15.861 Ha, hutan suaka alam dan wisata dengan luas 27.662 Ha, hutan produksi tetap dengan luas 71.658 Ha, hutan produksi terbatas

dengan luas 5.290, hutan yang dapat dikonversi dengan luas 12.174 Ha, hutan bakau dengan luas 9.121,97 Ha, dan hutan rakyat dengan luas 14.525 Ha. Hutan di Kabupaten Tanah Laut menghasilkan kayu bulat rata-rata 13.346,10 m<sup>3</sup> dan kayu gergajian rata-rata 17.116,13 m<sup>3</sup>.

Luas lahan kritis pada areal hutan di Kabupaten Tanah Laut sebesar 54.929 Ha dan sangat kritis sebesar 17.307 Ha. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius sehingga diharapkan lahan kritis di Kabupaten Tanah Laut tidak bertambah.

### **c. Kelautan Dan Perikanan**

Pada tahun 2011 produksi perikanan laut tercatat sebanyak 37,483 ton dan produksi perikanan perairan umum tercatat sebanyak 4.708 ton. Jumlah kapal penangkap ikan tahun 2011 mencapai 1.929 unit. Guna mendukung armada penangkapan di laut perlu dukungan peralatan penangkapan bagi nelayan untuk dapat memanfaatkan potensi secara maksimal. Luas perikanan darat di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2011 adalah seluas 9.174,3 m<sup>3</sup> dengan jumlah rumah tangga produksi sebesar 231 ton. Produksi perikanan perairan umum sebesar 4.708 ton.

### **d. Peternakan**

Menurut jenisnya usaha peternakan dibedakan atas ternak besar (sapi, kuda dan kerbau), ternak kecil (babi, kambing, domba) dan ternak unggas (ayam dan itik). Ternak sapi merupakan primadona komoditi peternakan Kabupaten Tanah Laut yang mengalami peningkatan populasi. Selain ternak sapi sebagai sumber suplai komoditas daging, Kabupaten Tanah Laut juga banyak memiliki jenis ternak Kerbau dan kambing. Jumlah ternak yang dipotong di Kabupaten Tanah Laut tahun 2010 yaitu Sapi sebanyak 3.236 ekor, Kerbau sebanyak 193 ekor, dan Kambing sebanyak 3.504 ekor.

Populasi ternak kecil di Kabupaten Tanah Laut yaitu Kambing sebanyak 17.234 ekor, Domba sebanyak 387 ekor dan Babi sebanyak 66 ekor. Untuk populasi ternak besar adalah Sapi Perah sebanyak 28 ekor, Sapi Potong sebanyak 81.594 dan Kerbau sebanyak 5.993 ekor. Populasi ternak Unggas di Kabupaten Tanah Laut yaitu Ayam Buras sebanyak 1.032.427 ekor, Ayam Petelor sebanyak 2.342.776 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 9.948.924 ekor dan Itik sebanyak 198.873 ekor

Untuk produksi daging ternak di Kabupaten Tanah Laut yaitu Sapi sebanyak 499.961,5 Kg, Kerbau sebanyak 30.880 Kg, Kambing sebanyak 35.040 Kg, Domba sebanyak 250 Kg, dan Babi sebanyak 200 Kg. Produksi ternak Unggas yaitu Ayam Buras sebanyak 337.994,50 Kg, Ayam Petelor sebanyak 390.399 Kg, Ayam Pedaging sebanyak 1.218.999 Kg, dan Itik sebanyak 39.557,25 butir.

#### **e. Perkebunan**

Luas areal perkebunan di Kabupaten Tanah Laut mencapai 21.954,00 Ha, terdiri dari luas tanaman belum menghasilkan sebesar 12.715 Ha, luas tanaman menghasilkan sebesar 8.854,50 Ha, dan luas tanaman tua/rusak sebesar 384,50 Ha. Dengan produksi sebesar 60.714,76 ton.

Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan dewasa ini adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Produksi tanaman kelapa sawit mencapai 35.117 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 134 kw per hektar dan akan semakin besar di tahun-tahun mendatang mengingat luas lahan yang belum menghasilkan yang luasnya mencapai 5.444 Ha.

Produksi tanaman karet mencapai 17.690 ton dengan tingkat produktivitas 41 Kw per hektar. Produksi karet ini juga masih mempunyai potensi yang cukup besar jika melihat luasnya lahan tanaman karet yang sudah ditanam tapi belum menghasilkan

sebesar 6.942 Ha.

## **2. Pertambangan dan Energi**

### **a. Pertambangan**

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir sudah mengambil peranana dalam perekonomian Tanah Laut. Berdasarkan data produksi tahun 2011 adalah Batubara sebanyak 7.574.553,547 MT, Bijih besi sebanyak 226.878,707 MT, dan Bijih Nikel sebanyak 11.341,219 MT.

Sektor pertambangan mengambil peranan dalam perekonomian Tanah Laut, berdasarkan data yang diperoleh tercatat, yaitu :

1. Batubara, berlokasi di Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Batu Ampar, BatiBati dan Takisung, dengan luasan 185.134,17 Ha
2. Batu Besi, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Panyipatan, dengan luasan 479.814,87 Ha
3. Emas, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, Tambang Ulang, Bati-Bati dan Kurau, dengan luasan 587,05 Ha
4. Nikel, berlokasi di Kecamatan Bati-Bati, dengan luasan 5.535,00 Ha
5. Kromit, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, dengan luasan 4.679,00 Ha
6. Andesit, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, dengan luasan 125,19 Ha
7. Batu Gamping, berlokasi di Kecamatan Kintap, dengan luasan 2.246,48 Ha
8. Intan, berlokasi di Kecamatan Bati-Bati dan Kurau, dengan luasan 190,43 Ha
9. Mangan, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Tambang Ulang, dengan luasan 3.009,96 Ha
10. Marmer, berlokasi di Kecamatan Kintap, Jorong dan Pelaihari, dengan luasan 784,88 Ha
11. Oker, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Panyipatan, dengan luasan 556,32 Ha
12. Pasir Kuarsa, berlokasi di Kecamatan Jorong dan Panyipatan, dengan luasan 3.802,17 Ha

13. Peridotit, berlokasi di Kecamatan Panyipatan, dengan luasan 60,05 Ha

14. Tanah Liat, berlokasi di Kecamatan Jorong, Penyipatan, Batu Ampar dan Pelahhari, dengan luasan 1.895,39 Ha.

#### **b. Energi**

Penggunaan tenaga listrik dewasa ini semakin luas. Tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, melainkan juga sebagai sarana produksi. Tenaga listrik di Kabupaten semakin banyak digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri.

Sebagai sarana produksi, tersedianya tenaga listrik dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta terjamin kontinuitasnya akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor industri maupu bidang lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas terpasang dan perluasan jangkauan pelayanan menjadi sasaran penting bagi pengembangan sumber energy tersebut. Faktor layanan juga merupakan hal penting untuk menjamin kesinambungan suplai aliran listrik secara kontinyu.

Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik di Tanah Laut dipenuhi oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarmasin. Jumlah pelanggan listrik PLN selama tahun 2011 tercatat sebanyak 43.009 pelanggan dengan KWH terjual 77.705.080 KWH. Ketersedian air minum yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat, berdasarkan data yang diperoleh air minum yang terjual adalah sebesar 692.513 m<sup>3</sup>

### **3. Industri dan Perdagangan**

#### **a. Industri**

Pembangunan sektor industri Tanah Laut dititikberatkan pada pengembangan industri kecil dan menengah yang didalamnya termasuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia disamping dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan. Industri kecil dan menengah

mempunyai peranan penting dalam mendukung berlangsungnya pertumbuhan industri, produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan peranana ekspor nonmigas dalam perekonomian Tanah Laut.

Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan dalam menopang perekonomian di daerah. Berdasarkan data yang diperoleh yang membedakan kelompok industri dalam tiga kelompok yaitu : industri logam mesin dan kimia, industri aneka dan industri hasil pertanian dan kehutanan.

Jumlah perusahaan industri formal (berizin) dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu : Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 1 buah dengan tenaga kerja sebanyak 60 orang, Industri logam mesin dan kimia (ILMK) sebanyak 1 buah dengan tenaga kerja sebanyak 10 orang.

Jumlah perusahaan industri non formal dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu : Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 212 buah dengan tenaga kerja sebanyak 835 orang, Industri logam mesin dan kimia (ILMK) sebanyak 101 buah dengan tenaga kerja sebanyak 232 orang, Industri Aneka (IA) sebanyak 77 buah dengan tenaga kerja sebanyak 233 orang

Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa kawasan industri yang tersebar di Wilayah Kabupaten Tanah Laut, diantaranya Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap.

## **b. Perdagangan**

Perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Oleh karena itu pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekspor non

migas

Perusahaan perdagangan di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 377 perusahaan yang terdiri dari perdagangan besar sebanyak 2 buah, perdagangan menengah sebanyak 26 buah, perdagangan kecil sebanyak 228 buah, dan perdagangan mikro sebanyak 117 buah.

Untuk mendukung industri perdagangan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, penyediaan sarana perdagangan juga merupakan suatu yang amat penting dalam rangka mempercepat perkembangan perekonomian wilayah. Sarana perdagangan yang meliputi pasar baik itu pasar umum maupun pasar desa memegang peran yang sangat strategis. Jumlah pasar desa yang ada saat ini di wilayah Tanah Laut sebanyak 90 buah. Sedangkan pasar umum sebanyak 13 buah, dimana aktivitas pasar mampu memberikan peluang bagi hasil bumi di Tanah Laut.

#### **4. Pariwisata**

Sejarah perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut sudah berlansung sejak lama. Sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun masyarakat berupaya untuk membangun pariwisata dikarenakan potensi wilayah Tanah Laut di sektor pertambangan atau energy mulai berkurang.

Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat. Jumlah obyek wisata alam di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 17 buah dan obyek wisata buatan 8 buah dengan jumlah wisatawan sebanyak 147.158 orang pada tahun 2011. Fasilitas penginapan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 15 buah.

### **2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH**

#### **2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah**

Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya dana yang cukup dengan penyaluran yang baik oleh lembaga keuangan (perbankan). Implementasi otonomi daerah membuat pelaksanaan pembangunan sangat

ditentukan oleh kemampuan masing-masing daerah, khususnya dalam pembiayaan pembangunan. Disamping itu keberhasilan pembangunan ekonomi peluang meningkatnya penerimaan daerah, penerimaan tersebut selanjutnya dimanfaatkan kembali dalam bentuk pembiayaan pembangunan di berbagai bidang guna meningkatkan kesejahteraan yang makin baik bagi masyarakat. Guna memenuhi pembiayaan pelaksanaan pembangun di Kabupaten Tanah Laut, maka diusahakan terutama dari kemampuan daerah sendiri yang berasal dari PAD, disamping bantuan dari pemerintah propinsi dan pusat baik yang berasal dari dana rupiah maupun bantuan luar negeri. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber dana dalam pembiayaan pembangunan terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah.

Secara garis besar bahwa kebijakan keuangan umum keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut adalah; terkait dengan Pendapatan Daerah pemungutannya didasarkan atas Peraturan Daerah yang berlaku dengan melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam intensifikasi berupaya mengoptimalkan penerimaan dan dalam rangka ekstensifikasi berupaya merevisi Perda-perda pendapatan yang sudah tidak sejakan dengan UU No 28 tahun 2009 dan penyesuaian tarif Pajak dan retribusi sesuai dengan perkembangan sekarang. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan sumber dana dalam rangka membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat tercukupi. Berkaitan dengan dengan kebijakan belanja telah diuraikan pada sub Bab di atas, namun juga yang perlu disadari bahwa belanja-belanja yang dilaksanakan harus memenuhi akuntabilitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan, agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Laut mendapat Opini minimal WDP dengan tetap terjadi pengurangan untuk pengecualiannya. Disamping itu bahwa sumber pendanaan harus tetap dapat

mencukupi belanja wajib dan mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan bagi gaji/tunjangan pegawai.

Realisasi Pendapatan Pemkab Tanah Laut selama tahun anggaran 2011 mencapai Rp 854.821.977.285,00,- atau mengalami peningkatan sebesar 24,99% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 683.908.713.789,75, Pendapatan Daerah tahun 2011 ini yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 55.816.398.056,00, Dana Perimbangan sebesar Rp 733.632.214.307,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 65.373.364.922,00. Sementara itu Belanja Daerah pada tahun 2011 mencapai Rp 614.727.279.976,19 atau meningkat sebesar 11,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 550.710.427.435,00, Belanja Daerah tahun 2011 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 351.247.874.678,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 263.479.405.298,19

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007—2011**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2007	372.697.166.955,00	399.125.757.113,00	107,09
2008	438.429.276.455,00	487.876.580.787,00	111,28
2009	500.435.506.094,00	600.928.005.583,00	120,08
2010	559.858.485.186,00	682.756.883.889,75	121,95
2011	670.656.039.184,00	839.889.700.655,00	125,23

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 PAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 55.816.398.056,00 atau meningkat sebesar 17,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 47.705.762.048.75. Penerimaan PAD tahun 2011 yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp 5.238.621.626,00, Retribusi Daerah sebesar Rp 4.121.980.346,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 4.415.920.042,00, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 42.039.876.042,00.

**Tabel 2.6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 – 2011**

Pendapatan	Tahun		
	2009 (Rp )	2010 (Rp )	2011 (Rp )
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>43.821.192.066,00</b>	<b>47.705.762.048,75</b>	<b>55.816.398.056,00</b>
1. Pajak Daerah	4.358.201.888,00	3.646.828.521,00	5.238.621.626,00
2. Retribusi Daerah	24.810.908.547,00	19.561.798.728,00	4.121.980.346,00
3. Hasil Pengol	1.685.668.268,00	3.378.054.739,75	4.415.920.042,00
4. Lain-lain PAD yang Sah	12.966.413.363,00	21.119.080.060,00	42.039.876.042,00
<b>Dana</b>	<b>541.094.119.280,00</b>	<b>610.759.191.787,00</b>	<b>733.632.214.307,00</b>
1. Bagi Hasil Pajak	31.481.855.103,00	34.044.033.550,00	30.722.579.248,00
2. Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	133.723.734.225,00	161.153.709.736,00	258.009.585.021,00
3. DAU	292.068.725.000,00	292.241.151.200,00	327.723.639.000,00
4. DAK	43.325.000.000,00	53.541.600.000,00	15.419.100.000,00
5. Dana penyesuai	15.237.790.187,00	37.661.816.211,00	64.602.211.205,00
6. Bantuan keuangan	25.257.014.765,00	32.116.881.090,00	37.155.099.833,00
<b>Lain-lain Pendapatan</b>	<b>16.012.694.237,00</b>	<b>25.443.759.954,00</b>	<b>50.427.773.292,00</b>
1. Pendapatan Hibah	14.638.694.237,00	17.338.359.504,00	1.900.000.000,00
2. Dana bagi hasil pajak dari propinsi	1.374.000.000,00	730.000.000,00	13.045.591.630,00
3. Pendapatan lainnya		7.375.400.450,00	50.427.773.292,00
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>600.928.005.583,00</b>	<b>683.908.713.789,75</b>	<b>854.821.977.285,00</b>

Walaupun ada kecenderungan peningkatan volume dalam PAD pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 839.889.700.655,00 atau dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp 682.756.883.889,00 dengan rata-rata pertumbuhan (2010 dan 2011) sebesar 18,32 persen, namun diakui 62,26 persen sumber penerimaan Kabupaten Tanah Laut di sektor publik masih berasal dari alokasi pusat (DAK dan DAU), hal tersebut terjadi pengurangan dibandingkan tahun 2010 sebesar 70,69 persen. Hal yang menggembarakan dalam hal pembiayaan pembangunan Kabupaten adalah, jika sebelumnya sebagian besar program pembangunan yang disediakan oleh pemerintah pusat dialokasikan dalam bentuk dana inpres (regional) maupun dan DIP (sektorial), maka saat ini sebagian besar sudah dalam bentuk bantuan spesifik (specific blok grant), dan blok grant yang langsung diterima dan dikelola oleh daerah.

Pemanfaatan sebagian besar dana perimbangan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut digunakan untuk pengembangan jaringan infrastruktur terpadu, termasuk pemeliharannya. Dengan keterpaduan tersebut infrastruktur yang dibangun benar-benar memperlancar arus barang dan jasa antar daerah sehingga dapat menggerakkan kegiatan sosial ekonomi yang berkembang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten, sekaligus memperkecil ketergantungan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat. Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Lima Tahun Terakhir.

Kebijakan belanja daerah selain diprioritaskan dan diarahkan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah (belanja langsung), juga dialokasikan untuk membiayai belanja tidak langsung yang juga tidak kalah penting dan urgensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja hibah, belanja bantuan sosial,

belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga.

Sebagai gambaran berdasarkan informasi terbaru dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah DPPKA Realisasi pendapatan di tahun 2012 secara total sudah melebihi angka 1 (satu) triliun yaitu mencapai Rp. 1.109.798.690.735,22 atau meningkat sebesar 30% dari capaian pendapatan di tahun 2011.

#### **2.4.2 Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2011 sebanyak 303.430 jiwa yang terdiri dari 156.035 jiwa penduduk laki-laki dan 147.395 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke-11 Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Komposisi penduduk menurut kelompok usia dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu usia produktif dan non produktif, sedangkan untuk usia non produktif sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) lagi, yaitu usia belum produktif (usia sekolah) dan usia tidak produktif. Kelompok usia belum produktif (usia sekolah adalah antara 0 - 14 tahun yang merupakan tanggungan orang tua, karena mereka belum bisa bekerja), sedangkan yang termasuk dalam usia tidak produktif adalah usia 60 tahun keatas. Adapun untuk usia produktif adalah usia antara 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun. Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur, maka kelompok umur tertinggi adalah kelompok umur 15 - 64 tahun dengan jumlah penduduk 202.129, sedangkan kelompok umur terkecil adalah kelompok umur di atas 65 tahun dengan jumlah penduduk 10.983 jiwa.

Kondisi lahan terbangun yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh permukiman yang tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Laut, tetapi mempunyai tingkat kepadatan yang berbeda-beda. Wilayah yang mempunyai kepadatan atau sebaran permukiman yang padat yaitu daerah pusat kota (Kecamatan Pelaihari)

Kepadatan penduduk kawasan perkotaan terpadat terdapat di Kecamatan Pelaihari, yaitu sebesar 379,45 orang/KM<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah yaitu di Kecamatan Jorong sebesar 127,00 orang.Km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut rata-rata tahun 2009-2011 adalah sekitar 270.082 pertahun dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu tahun 2010 sebesar 0,34%,

#### **2.4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Dalam UU 32/2004 pada pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis di bawah koordinasi dari Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Sampai dengan saat ini pemerintah telah menetapkan 15 SPM dengan 10 petunjuk teknisnya, yaitu:

- 1) SPM di Bidang Perumahan Rakyat
- 2) SPM di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
- 3) SPM di Bidang Sosial
- 4) SPM di Bidang Kesehatan
- 5) SPM di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

- 6) SPM di Bidang Lingkungan Hidup
- 7) SPM di Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera
- 8) SPM di Bidang Ketenagakerjaan
- 9) SPM di Bidang Pendidikan
- 10) SPM di Bidang Pekerjaan Umum
- 11) SPM di Bidang Ketahanan pangan
- 12) SPM di Bidang Kesenian
- 13) SPM di Bidang Komunikasi dan Informasi
- 14) SPM di Bidang Perhubungan
- 15) SPM di Bidang Penanaman Modal

Pelaksanaan penerapan SPM meliputi 9 bidang SPM yakni perumahan rakyat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pekerjaan umum, ketahanan pangan, kesenian, dan perhubungan. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Integrasi ke dalam dokumen perencanaan dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Hal yang pertama perlu dilakukan adalah menyusun rencana pencapaian SPM dengan menghitung kondisi awal tingkat pencapaian SPM setelah itu menghitung target pelayanan dasar yang akan dicapai kemudian disesuaikan dengan target-target sasaran di dalam dokumen perencanaan. Dikarenakan kegiatan ini merupakan satu kesatuan, yang

dimulai dari penyusunan data dasar dan setting target maka kegiatan tersebut dilakukan setelah kegiatan penyusunan data dasar dan penentuan target dilaksanakan.

#### **2.4.4. Millenium Development Goals (MDGs)**

MDGs merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagaimana telah diketahui, Pemerintah Indonesia bersama-sama 188 negara lainnya telah berpartisipasi dan menandatangani Deklarasi Milenium pada KTT Milenium\_PBB yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2000. Deklarasi ini kemudian menyepakati tujuan-tujuan pembangunan global yang tertuang dalam MDGs. Sebagai salah satu penandatanganan deklarasi millennium, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk merealisasikan dan memantau perkembangan pencapaian MDGs tersebut.

Dengan adanya MDGs, kondisi Indonesia dapat diperbandingkan dengan negara-negara lain secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan kerjasama pembangunan antara negara miskin dan berkembang dengan negara maju menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Secara nasional, MDGs mempunyai peranan sebagai salah satu alat ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan terkait bidang-bidang yang tercakup dalam MDGs. Oleh karena itu, MDGs menjadi masukan yang penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Saat ini target-target MDGs telah diarusutamakan dalam berbagai dokumen perencanaan Kabupaten Tanah Laut (RPJPD, RPJMD, RKPD), perencanaan SKPD (Renstra, Renja SKPD) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (DPA). Dalam konteks inilah maka Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu daerah

otonom diwilayah NKRI, secara bersama-sama dengan daerah lainnya mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan dan mensukseskan pencapaian MDGs tersebut dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

MDGs terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

1. Memberantas kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem;
2. Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua;
3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Menurunkan Angka Kematian Anak;
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil;
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan; dan
8. Mengembangkan Kemitraan Global Untuk Pembangunan.

Waktu pencapaian kedelapan tujuan tersebut adalah 25 tahun dengan tahun dasar 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan pada tahun 2015 dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, bahkan dapat dicapai lebih cepat. Akan tetapi target yang dikejar oleh Pemerintah Provinsi hanya sampai dengan target yang ke tujuh karena target yang ke 8 menjadi domain pemerintah pusat. Adapun untuk lebih detailnya mengenai tujuan dan target MDGs dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

- Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 2005-2015
- Target 1B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda
- Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 2005-2015

Tujuan 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua

- Target 2A : Menjamin pada 2015 semua anak, laki – laki maupun

perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Tujuan 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

- Target 3A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 ,dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.

Tujuan 4. Menurunkan angka kematian anak

- Target 4A : Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 2005-2015

Tujuan 5. Meningkatkan kesehatan ibu

- Target 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 2005-2015
- Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

- Target 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkannya jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015
- Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010
- Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

Tujuan 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup

- Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang.
- Target 7B : Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya.
- Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015
- Target 7D : Mencapai peningkatan yang significant dalam kehidupan

penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020

Tujuan 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

- Target 8A: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif
- Target 8B : Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang.

### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Dalam merencanakan suatu program/kegiatan sudah barang tentu harus disertai dengan ketersediaan dana, karena tanpa dana perencanaan yang ada tidak akan dapat terealisasi. Hal ini bukan berarti bahwa pencapaian suatu sasaran harus melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam belanja langsung. Perlu juga diingat bahwa untuk sasaran non fisik bisa jadi dapat dicapai tanpa melalui program/kegiatan, karena secara jelas sudah kita ketahui bersama bahwa PNS sudah mendapat gaji untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jadi dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran dapat dicapai melalui kombinasi antara belanja tidak langsung dan langsung dan sudah barang tentu yang tidak dapat dikesampingkan adalah swadaya masyarakat, keterlibatan pihak swasta dan sumber lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

### 3.1. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

#### 3.1.1. Pendapatan Daerah

Otonomi daerah berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Perkembangan pendapatan daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 Kabupaten Tanah Laut seperti terlihat pada tabel c.1.1 sebagai berikut :

#### C.1.1. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah  
Tahun 2009 s/d Tahun 2013 Kabupaten Tanah Laut

No	URAIAN	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan s/d 2012 (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>600,946,561,739.00</b>	<b>684,408,713,699.75</b>	<b>854,833,567,802.00</b>	<b>1,109,798,690,735.22</b>	<b>820,682,584,848.00</b>	<b>22.9%</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>36,411,064,419.00</b>	<b>48,205,761,958.75</b>	<b>55,857,988,573.00</b>	<b>78,978,534,688.22</b>	<b>48,456,719,109.00</b>	<b>19.1%</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4,358,201,888.00	3,646,828,431.00	5,238,621,626.00	6,905,138,950.00	5,296,825,000.00	25.2%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	17,382,224,744.00	20,061,798,728.00	4,121,980,346.00	3,934,102,980.00	3,835,829,000.00	-28.0%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,685,668,268.00	3,378,054,739.75	4,415,920,042.00	2,686,007,887.00	3,791,171,856.00	-2.8%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12,984,969,519.00	21,119,080,060.00	42,081,466,559.00	65,453,284,871.22	35,532,883,253.00	51.6%
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>500,599,314,328.00</b>	<b>540,980,494,486.00</b>	<b>631,874,903,269.00</b>	<b>802,918,740,221.00</b>	<b>628,883,917,739.00</b>	<b>14.6%</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	31,481,855,103.00	34,044,033,550.00	30,722,579,248.00	383,749,933,221.00	170,080,798,739.00	379.8%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	292,068,725,000.00	292,241,151,200.00	327,723,639,000.00	398,795,857,000.00	439,195,379,000.00	11.3%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	43,325,000,000.00	53,541,600,000.00	15,419,100,000.00	20,372,950,000.00	19,607,740,000.00	-13.0%

No	URAIAN	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan s/d 2012 (%)
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>25,849,68 1,227.00</b>	<b>25,443,75 9,954.00</b>	<b>65,343,36 4,922.00</b>	<b>227,901,41 5,826.00</b>	<b>143,341,9 48,000.00</b>	<b>135.2 %</b>
1.3. 1	Pendapatan Hibah	14,638,69 4,237.00	17,338,35 9,504.00	50,397,77 3,292.00	76,183,325, 076.00	45,440,00 0,000.00	80.6%
1.3. 2	Dana Darurat						
1.3. 3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25,257,01 4,765.00	32,116,88 1,090.00	37,155,09 9,833.00	96,942,832, 250.00	42,050,00 0,000.00	58.9%
1.3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	12,829,48 7,000.00	37,661,81 6,211.00	64,602,21 1,205.00	54,775,258, 500.00	53,951,94 8,000.00	18.8%
1.3. 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1,374,000, 000.00	730,000,0 00.00	1,900,000, 000.00	-	1,900,000, 000.00	20.1%

Dengan melihat kondisi data di atas bahwa perkembangan pendapatan daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2012 selalu mengalami kenaikan. Adapun data tahun 2013 yang lebih kecil dari tahun 2012 adalah angka target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Dengan melihat data terakhir di bulan oktober yang melebihi dari angka 1 triliyun pendapatan sampai dengan bulan September 2013 masih sangat berpotensi untuk terus meningkat mengingat berdasarkan pengalaman tahun lalu diakhir tahun dana transfer akan terus direalisasikan.

Dalam melakukan perhitungan pertumbuhan pertambahan pendapatan, untuk tahun 2013 tidak diperhitungkan karena angkanya belum fix dan hampir pasti akan lebih besar realisasinya sampai dengan bulan Desember 2013. Dalam ini hanya menggunakan data tahun 2009 sampai dengan 2012.

Dari segi pendapatan retribusi daerah memang mengalami tren yang menurun. Hal ini karena adanya regulasi yaitu UU No.28/ 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menganut sistem daftar tertutup (close

list) di mana Daerah tidak boleh memungut Pajak Daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Dengan melihat data dari tahun 2009 sampai dengan 2012 Dana perimbangan masih mendominasi sumbangan pendapatan daerah yaitu sebesar 76,20%. Sedangkan sumbangan Pendapatan asli daerah secara rata adalah sebesar 6,74% dari total pendapatan. Sumbangan dari lain-lain pendapatan yang sah rata-rata sebesar 10,6%. Dengan melihat kondisi ini masih dapat dikatakan bahwa ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat masih sangat besar atau dengan kata lain masih di atas 50%.

Kemampuan keuangan daerah secara riil dapat dilihat bahwa besarnya adalah berkisar dengan angka 1 (satu) triliun dengan melihat data terakhir pendapatan di tahun 2012 yang mencapai Rp. 1,109,798,690,735.22. Memang nantinya jika ada defisit dapat ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

### 3.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Perkembangan belanja daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 sebagai berikut :

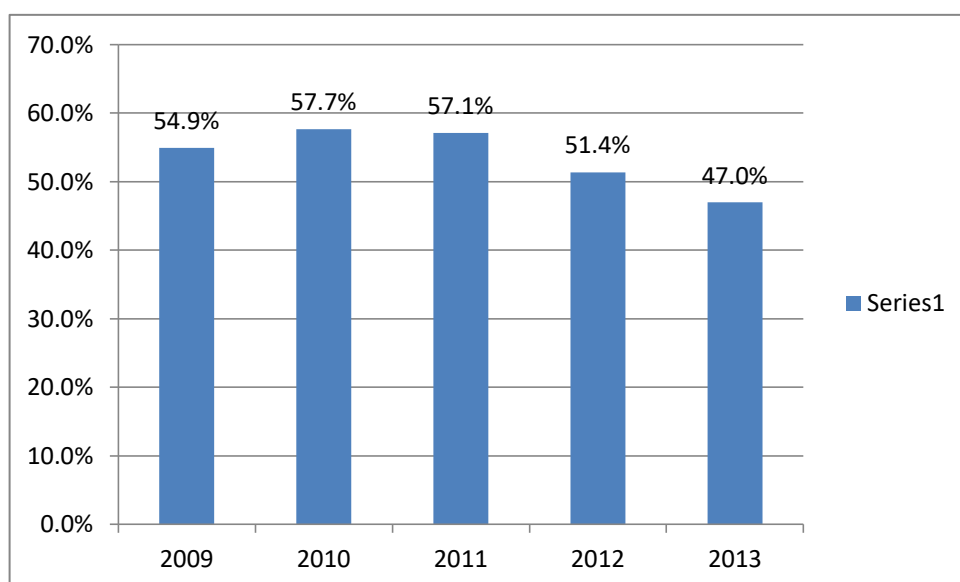
Tabel. C.1.2  
Proporsi realiasi Belanja terhadap Anggaran Belanja  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Proporsi Belanja				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	54.9%	57.7%	57.1%	51.4%	47.0%
2	Belanja Pegawai	44.7%	50.1%	51.3%	45.5%	41.7%
3	Belanja Hibah	4.9%	2.8%	1.7%	3.3%	2.6%
4	Belanja Bantuan Sosial	1.9%	1.4%	1.3%	0.1%	0.2%
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa	0.4%	0.4%	0.3%	0.2%	0.2%

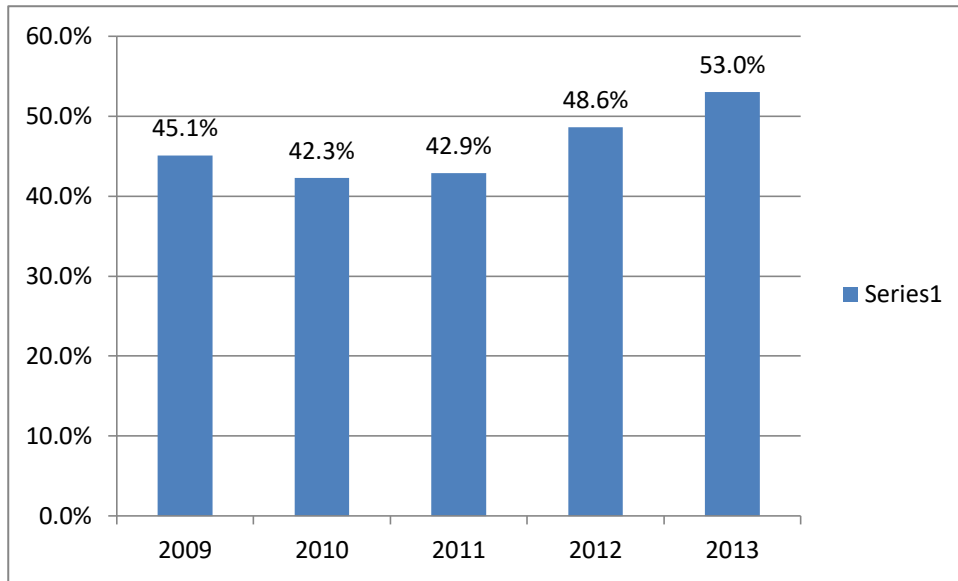
No.	Uraian	Proporsi Belanja				
		2009	2010	2011	2012	2013
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	2.8%	2.9%	2.5%	2.2%	1.8%
7	Belanja Tidak Terduga	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.4%
8	BELANJA LANGSUNG	45.1%	42.3%	42.9%	48.6%	53.0%
9	Belanja Pegawai	7.1%	6.1%	6.4%	5.2%	5.5%
10	Belanja Barang dan Jasa	24.0%	14.4%	21.4%	23.2%	20.7%
11	Belanja Modal	14.0%	21.8%	15.1%	20.2%	26.8%

Secara grafis perkembangan proporsi Belanja Tidak Langsung, Belanja langsung, dan belanja modal dapat dilihat pada grafik berikut ini :

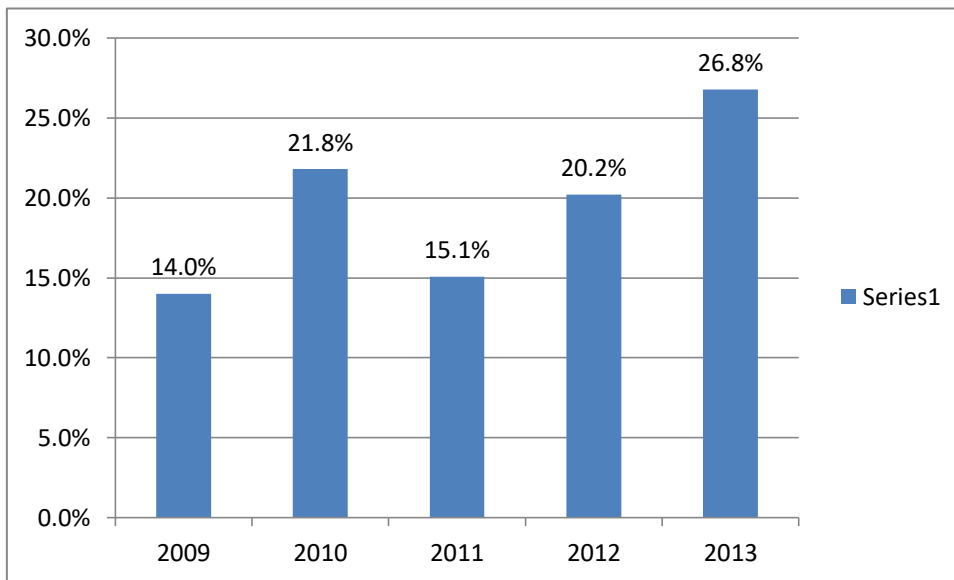
Gambar C.1.1. Grafik Perkembangan Belanja Tidak Langsung



Gambar C.1.2. Grafik Perkembangan Belanja Langsung



Gambar C.1.2. Grafik Perkembangan Belanja Modal



Dari melihat perkembangan belanja tersebut di atas dapat dipetakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perkembangan belanja tidak langsung dalam tiga tahun terakhir cenderung menunjukkan tren yang menurun dan bahkan di tahun 2013 sudah kurang dari setengahnya (50%) dari proporsi belanja secara keseluruhan.
2. Demikian sebaliknya untuk belanja langsung trennya dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat dan di tahun 2013 sudah melebihi dari 50% dari total anggaran belanja.

3. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja program/kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dapat dikatakan mengalami tren yang positif. Meskipun dalam hal perlu lebih kritis lagi tentang alokasi belanja dalam belanja langsung ini.
4. Jika melihat lagi perkembangan belanja modal dalam belanja langsung juga menunjukkan tren yang positif yaitu terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Belanja modal dapat dikatakan sudah mendekati riil belanja yang benar-benar berkaitan dengan kepentingan publik seperti infrastruktur, belanja modal untuk peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas dan lain sebagainya. Pada tahun 2013 sudah mencapai angka 26,8%.
5. Hal ini dapat dikatakan sudah berada di jalur yang cukup baik untuk menuju tahun-tahun mendatang mengingat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, bagian lampiran 1 poin 4.a yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.
6. Memang dalam belanja modal ini perlu masih ditelaah dan dikritisi secara mendalam terkait dengan belanja modal untuk kebutuhan aparaturnya seperti : mobil dan kendaraan dinas, laptop, dan lain sebagainya.

#### **3.1.2.1. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur**

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur merupakan belanja yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang wajib dianggarkan seperti gaji dan tunjangan dan belanja untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas aparaturnya. Terhadap belanja untuk gaji dan tunjangan sudah barang tentu merupakan hal yang wajib untuk

dianggarkan karena hal sudah menjadi kewajiban daerah untuk menganggarkannya dan alokasi dananya adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan untuk belanja untuk mendukung pelaksanaan tugas PNS perlu untuk ditelaah lagi dan dapat dilakukan efisiensi sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya. Dari data pada tabel C.2.3 terlihat bahwa untuk belanja langsung, alokasi terbesar adalah pada belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman, belanja bahan pakai habis kantor, dan kursus/bimbingan teknis aparat.

Ke depan untuk belanja ini harus lebih dicermati agar alokasinya benar-benar selektif dan yang benar-benar dapat meningkatkan kinerja aparatur.

Tabel C.2.3 Realisasi Belanja Pemenuhan kebutuhan  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Realisasi dan anggaran belanja				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>224,032,241,0 67.00</b>	<b>276,148,148,5 76.00</b>	<b>315,222,534,1 21.00</b>	<b>370,388,404,6 84.00</b>	<b>458,722,476,0 17.35</b>
1	Gaji dan Tunjangan	189,451,328,48 9.00	213,348,378,81 6.00	243,673,059,99 0.00	266,683,269,90 7.00	318,400,574,75 2.35
2	Tambahan Penghasilan PNS	32,062,093,453. 00	48,385,979,745. 00	41,072,975,984. 00	51,899,070,561. 00	56,861,272,000. 00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,861,619,300.0 0	1,862,000,000.0 0	1,799,400,000.0 0	1,812,000,000.0 0	1,812,000,000.0 0
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	657,199,825.00	787,679,315.00	1,134,796,747.0 0	586,708,066.00	946,967,225.00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	264,053,750.00	264,053,750.00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	136,579,590.00	163,260,290.00
7	Tunjangan Profesi Guru	0.00	11,764,110,700. 00	27,542,301,400. 00	49,006,722,810. 00	80,274,348,000. 00
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>65,681,867,39 0.00</b>	<b>58,073,165,74 0.00</b>	<b>78,197,180,58 6.00</b>	<b>89,059,738,07 9.00</b>	<b>135,012,562,6 89.00</b>
a	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>15,549,654,65 0.00</b>	<b>12,729,927,65 0.00</b>	<b>15,012,140,27 6.00</b>	<b>15,020,144,15 0.00</b>	<b>20,372,446,50 0.00</b>
1	Honorarium PNS	14,125,258,175. 00	10,164,917,250. 00	11,837,239,250. 00	11,380,114,650. 00	12,518,543,500. 00
3	Uang Lembur	1,424,396,475.0 0	2,565,010,400.0 0	3,158,151,026.0 0	3,523,329,500.0 0	7,657,903,000.0 0
4	Belanja Pegawai BLUD	0.00	0.00	16,750,000.00	116,700,000.00	196,000,000.00
b	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>43,854,409,24 0.00</b>	<b>40,535,090,49 0.00</b>	<b>56,325,161,20 3.00</b>	<b>64,410,250,14 2.00</b>	<b>103,741,521,3 35.00</b>
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,895,109,402.0 0	5,260,696,492.0 0	5,746,051,150.0 0	7,502,046,660.0 0	9,225,878,887.0 0
2	Belanja Premi Asuransi	75,000,000.00	0.00	413,987,750.00	227,753,600.00	750,000,000.00
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	297,370,000.00	324,250,000.00	407,850,000.00	296,670,000.00	486,800,000.00
6	Belanja Makanan dan Minuman	8,965,789,948.0 0	6,821,137,998.0 0	8,678,106,448.0 0	9,221,622,565.0 0	15,146,588,276. 00
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,073,075,000.0 0	611,975,500.00	625,353,250.00	201,425,000.00	925,588,276.00
8	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	622,412,000.00	461,617,000.00	429,639,500.00	441,367,400.00	1,180,937,100.0 0

No.	Uraian	Realisasi dan anggaran belanja				
		2009	2010	2011	2012	2013
9	Belanja Perjalanan Dinas	22,235,467,190.00	21,658,364,500.00	31,962,610,605.00	39,055,245,917.00	66,868,161,296.00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0.00	1,500,300,000.00	1,440,700,000.00	2,418,400,000.00	1,968,300,000.00
11	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3,690,185,700.00	3,896,749,000.00	6,484,154,500.00	5,032,824,000.00	7,074,162,500.00
12	Belanja Pemulangan Pegawai	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
13	Belanja Pengadaan Komputer	0.00	0.00	37,783,000.00	6,005,000.00	57,091,000.00
14	Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	98,925,000.00	3,890,000.00	58,014,000.00
c.	<b>Belanja Modal</b>	<b>6,277,803,500.00</b>	<b>4,808,147,600.00</b>	<b>6,859,879,107.00</b>	<b>9,629,343,787.00</b>	<b>10,898,594,854.00</b>
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4,596,858,000.00	2,671,395,500.00	4,124,551,200.00	7,751,166,225.00	7,563,730,604.00
2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	926,178,500.00	1,557,217,600.00	1,931,390,008.00	708,486,187.00	1,306,173,500.00
3	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	754,767,000.00	579,534,500.00	803,937,899.00	1,169,691,375.00	2,028,690,750.00
	<b>Total</b>	<b>289,714,108,457.00</b>	<b>334,221,314,316.00</b>	<b>393,419,714,707.00</b>	<b>459,448,142,763.00</b>	<b>593,735,038,706.35</b>

### 3.1.2.2. Belanja Wajib dan Mengikat serta prioritas utama

Tabel C.2.4 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2011	2013
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>228,138,321,996.00</b>	<b>217,314,458,886.00</b>	<b>247,488,975,092.00</b>	<b>270,364,712,417.00</b>	<b>321,374,002,457.35</b>
1	Gaji dan Tunjangan	224,032,241,067.00	213,348,378,816.00	243,673,059,990.00	266,575,233,907.00	318,400,574,752.35
2	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,861,619,300.00	1,862,000,000.00	1,799,400,000.00	1,812,000,000.00	1,812,000,000.00

No	Uraian	2009	2010	2011	2011	2013
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Belanja Bunga	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	382,153,824.00	394,461,522.00	377,230,370.00	370,460,460.00	662,799,824.00
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1,862,307,805.00	1,709,618,548.00	1,639,284,732.00	1,607,018,050.00	498,627,881.00
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>50,217,141,248.00</b>	<b>44,889,301,173.00</b>	<b>65,334,162,354.00</b>	<b>49,709,810,451.00</b>	<b>80,955,295,694.00</b>
1	Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis	14,125,258,175.00	2,661,968,500.00	2,912,271,000.00	2,258,687,400.00	12,518,543,500.00
2	Honorarium Non PNS	20,072,901,525.00	20,883,371,200.00	24,237,996,000.00	27,154,979,050.00	40,423,690,070.00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	1,500,300,000.00	1,440,700,000.00	2,418,400,000.00	1,968,300,000.00
4	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti Listrik, Air, Telepon dan sejenisnya)	16,018,981,548.00	19,843,661,473.00	36,743,195,354.00	17,877,744,001.00	26,044,762,124.00
5	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	-	<b>34,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500,000,000.00</b>
1	Pembentukan dana Cadangan	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pembayaran Pokok Utang	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kewajiban dgn Pihak ke-3	-	34,250,000.00	0.00	0.00	0.00
4	Penyertaan Modal	-	0.00	0.00	0.00	8,500,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>278,355,463,244.00</b>	<b>262,238,010,059.00</b>	<b>312,823,137,446.00</b>	<b>320,074,522,868.00</b>	<b>410,829,298,151.35</b>

Belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan belanja yang tidak bisa dihindari untuk terus dialokasikan karena jika tidak dialokasikan dapat berdampak terhadap kinerja pembangunan. Perlu lebih ditekankan

lagi bahwa untuk belanja Honorarium Non PNS merupakan belanja yang dipandang juga menjadi prioritas karena hal ini menyangkut gaji untuk para guru honorer atau guru pendidikan agama yang juga merupakan bagian dari Anggaran untuk Pendidikan yang merupakan urusan wajib dan menjadi prioritas untuk memenuhi alokasi dana 20% dari APBD.

### 3.1.2.3. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Proyeksi ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap pertumbuhan rata-rata pada lima tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebelumnya yaitu sebesar 11.04%. Namun untuk mengantisipasi agar hal ini tetap dapat dicukupi maka diambil angka yang relatif aman yaitu 20%.

Tabel C.2.5 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tanah Laut 2014-2018

No	Uraian	Tahun Dasar (2013)	Tingkat Pertumbuhan	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>							
1	Gaji dan Tunjangan	318,400,574,752.35	20.00	382,080,689,702.82	458,496,827,643.38	550,196,193,172.06	660,235,431,806.47	792,282,518,167.77
2	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,812,000,000.00	20.00	2,174,400,000.00	2,609,280,000.00	3,131,136,000.00	3,757,363,200.00	4,508,835,840.00
3	Belanja Bunga	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	662,799,824.00	20.00	795,359,788.80	954,431,746.56	1,145,318,095.87	1,374,381,715.05	1,649,258,058.06
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi	498,627,881.00	20.00	598,353,457.20	718,024,148.64	861,628,978.37	1,033,954,774.04	1,240,745,728.85

No	Uraian	Tahun Dasar (2013)	Tingkat Pertumbuhan	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Daerah Kepada Pemerintahan Desa							
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>							
1	Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis	12,518,543,5 00.00	20.00	15,022,252,200 .00	18,026,702,640.0 0	21,632,043,168.0 0	25,958,451,801.6 0	31,150,142,161. 92
2	Honorarium Non PNS	40,423,690,0 70.00	20.00	48,508,428,084 .00	58,210,113,700.8 0	69,852,136,440.9 6	83,822,563,729.1 5	100,587,076,474 .98
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,968,300,00 0.00	20.00	2,361,960,000. 00	2,834,352,000.00	3,401,222,400.00	4,081,466,880.00	4,897,760,256.0 0
4	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti Listrik, Air, Telepon dan sejenisnya)	26,044,762,1 24.00	20.00	31,253,714,548 .80	37,504,457,458.5 6	45,005,348,950.2 7	54,006,418,740.3 3	64,807,702,488. 39
5	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>							
1	Pembentukan dana Cadangan	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pembayaran Pokok Utang	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	Uraian	Tahun Dasar (2013)	Tingkat Pertumbuhan	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Kewajiban dgn Pihak ke-3	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penyertaan Modal	8,500,000,00 0.00	20.00	10,200,000,000 .00	12,240,000,000.0 0	14,688,000,000.0 0	17,625,600,000.0 0	21,150,720,000. 00
		410,829,298, 151.35		492,995,157,78 1.62	591,594,189,337. 94	709,913,027,205. 53	851,895,632,646. 64	1,022,274,759,1 75.97

Tabel C.2.5 Penutupan Defisit Riil Anggaran  
Kabupaten Tanah Laut 2009-2013

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	600,946,561,739. 00	684,408,713,699. 75	854,833,567,802. 00	1,109,798,690,735. 22	820,682,584,848. 00
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	500,954,881,473. 00	550,710,427,435. 00	614,727,279,976. 19	814,149,255,805.1 6	1,099,488,371,50 1.27
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		-	14,000,000,000.0 0	5,000,000,000.00	8,500,000,000.00
A	Defisit riil	(99,991,680,266. 00)	(133,698,286,264 .8)	(240,106,287,825. 8)	(295,649,434,930.0 6)	278,805,786,653. 27
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan					
4	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	190,618,563,129. 01	290,601,323,395. 01	424,265,129,283. 76	651,182,997,775.5 7	370,500,000,000. 00
5	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-

7	Penerimaan Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	190,618,563,129.01	290,601,323,395.01	424,265,129,283.76	651,182,997,775.57	370,500,000,000.00
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	290,610,243,395.01	424,299,609,659.76	664,371,417,109.57	946,832,432,705.63	91,694,213,346.73

Dari data tabel Tabel C.2.5 tersebut di atas terlihat bahwa pada kenyataannya dalam realisasi anggaran tidak terjadi defisit karena realisasi belanja dari tahun 2009 sampai dengan 2012 lebih kecil dari realisasi pendapatan. Hal ini tentu menyebabkan akumulasi SILPA dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Tentu hal ini nanti akan menjadi bahan untuk melakukan proyeksi terhadap ketersediaan pendanaan untuk lima tahun mendatang. Perlu dipikirkan tentang penganggaran belanja modal dengan sistem multi years untuk memanfaatkan dana yang tersimpan dari akumulasi SILPA tersebut.

Tabel C.2.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tanah Laut 2009-2013

No.	Uraian	2009		2010		2011		2012		rata-rata pertumbuhan
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
1	Jumlah SILPA	99,991,680,266.00	-	133,664,036,264.75	-	650,371,417,109.57	-	941,832,432,705.63	-	155%
2	Pelampauan Penerimaan PAD	(8,858,886,576.00)	8.86	14,003,924,395.75	10.48	12,522,609,021.00	1.93	22,942,471,073.05	2.44	

No.	Uraian	2009		2010		2011		2012		rata-rata pertumbuhan
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
3	Pelampauan Penerimaan dana Perimbangan	92,060,589,328.00	92.07	110,090,999,686.00	82.36	133,489,408,819.00	20.53	169,843,158,516.00	18.03	
4	Pelampauan Penerimaan lain-lain Pendapatan daerah yang sah	2,090,899,614.00	2.09	10,097,074,010.00	7.55	9,983,657,863.00	1.54	21,340,872,809.05	2.27	
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	-	0	-		-		-		
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0	34,250,000.00	0.0256	-		-		
7	Kegiatan lanjutan	-	0	-		-		-		

Tabel C.2.6 Sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan Kabupaten Tanah Laut 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Saldo Kas Neraca Daerah	290,601,323,395.01	424,257,988,758.76	647,221,284,200.47	936,291,753,408.10
	Dikurangi:				
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	34,250,000.00	-	-
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-
	Sisa lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	290,601,323,395.01	424,223,738,758.76	647,221,284,200.47	936,291,753,408.10

Tabel C.2.7 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran  
Kabupaten Tanah Laut 2014-2017

No	Uraian	Data tahun dasar (2012) (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Saldo kas neraca daerah	936,291,753,408.10	20.00	187,258,350,681.62	224,710,020,817.94	269,652,024,981.53	323,582,429,977.84	388,298,915,973.41
	dikurangi			-	-	-	-	-
1	Kewajiban Kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan		20.00	-	-	-	-	-
2	Kegiatan Lanjutan		20.00	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran							

Tabel C.2.7 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Untuk mendanai Pembangunan Daerah  
Kabupaten Tanah Laut 2014-2018

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Pendapatan	984,819,101,817.60	1,181,782,922,181.12	1,418,139,506,617.34	1,701,767,407,940.81	2,042,120,889,528.98
2	Pencairan Dana Cadangan					

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	(sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	444,000,000,000.00	532,800,000,000.00	639,360,000,000.00	767,232,000,000.00	920,678,400,000.00
	Total Penerimaan	1,428,819,101,817.60	1,714,582,922,181.12	2,057,499,506,617.34	2,468,999,407,940.81	2,962,799,289,528.98
	Dikurangi:					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	454,686,729,697.62	545,624,075,637.14	654,748,890,764.57	785,698,668,917.49	942,838,402,700.99
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	974,132,372,119.98	1,168,958,846,543.98	1,402,750,615,852.77	1,683,300,739,023.33	2,019,960,886,827.99

Adapun dengan memperhatikan realiasi pendapatan dari tahun 2009 sampai dengan 2012 rata-rata pertumbuhannya adalah 22,9% namun dengan memperhatikan hal-hal lain yang tidak dapat diprediksi, maka rata-rata pertumbuhan ini mengambil angka moderat yaitu 20% saja dengan data dasar pada tahun 2013

Tabel C.2.7 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2014-2018

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 Rp	Tahun 2015 Rp	Tahun 2016 Rp	Tahun 2017 Rp	Tahun 2018 Rp
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	974,132,372,120	1,168,958,846,544	1,402,750,615,853	1,683,300,739,023	2,019,960,886,828
2	Rencana alokasi Pengeluaran prioritas I	799,616,118,981	1,059,539,342,7	1,371,447,211,3	1,745,736,653,5	2,194,883,984,3

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 Rp	Tahun 2015 Rp	Tahun 2016 Rp	Tahun 2017 Rp	Tahun 2018 Rp
			77	32	99	18
3	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I	174,516,253,139	109,419,503,767	31,303,404,521	(62,435,914,575)	(174,923,097,490)
4	Rencana alokasi pengeluaran Prioritas II	86,304,009,139	6,219,655,541	(90,834,509,688)	(208,503,626,885)	(351,228,070,442)
5	Belanja Tidak Langsung untuk Tambahan penghasilan	56,861,272,000	71,848,876,226	90,786,942,209	114,716,740,310	144,954,000,951
6	Belanja Hibah dan Bansos	31,350,972,000	31,350,972,000	31,350,972,000	31,350,972,000	31,350,972,000
7	Total rencana Pengeluaran Prioritas III	88,212,244,000	103,199,848,226	122,137,914,209	146,067,712,310	176,304,972,951
8	Surplus anggaran riil atau berimbang	-	-	-	-	-

Untuk perhitungan alokasi pada prioritas I adalah dengan melakukan proyeksi berdasarkan data belanja langsung tahun dasar 2013 dengan kenaikan secara gradual 20% plus dengan pelaksanaan program strategis dalam visi dan misi bupati terpilih sebesar 200 milyar per tahun.

Hal tersebut adalah dengan melihat bahwa untuk belanja urusan wajib dan mengikat telah terpenuhi berdasarkan data pada Tabel C.2.7 tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah, sehingga sisanya untuk belanja langsung.

### **3.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

#### **Prioritas I**

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Program prioritas I adalah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti untuk pemenuhan 15 Standar Pelayanan Minimum (SPM).

#### **Prioritas II**

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta

tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

### Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

### **3.3. ARAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Arah pengelolaan keuangan daerah antara lain pada :

1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah.
2. Menjamin ketersediaan pendataan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional.
3. Menjamin ketersediaan pendanaan khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan, dengan alternatif melakukan pinjaman kepada pihak-pihak lainnya dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan resiko fiskal lainnya.
4. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.
5. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.

6. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran

### **3.3. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, maka kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

#### **3.3.1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Terkait dengan pos pendapatan daerah, dalam lima tahun ke depan perlu diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah, antara lain menyangkut permasalahan: aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga perbankan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita agar kinerja perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target dan skenario yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Tanah Laut, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- a. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.
  - b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
  - c. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan penerimaan daerah pada umumnya.
  - d. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
2. Perbaikan manajemen Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur.

Salah satu upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pengembangan BUMD dan BLUD. Strategi pengembangan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah melalui penyertaan modal yang dialokasikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Terdapat 2 BUMD yaitu PDAM dan PD Baratala.

Bagi PDAM, penyertaan modal dipergunakan untuk mengoptimalkan potensi dan diversifikasi produk, sehingga cakupan luas wilayah yang terlayani meningkat dan kualitas produk meningkat.

Bagi PD Baratala, penyertaan modal dipergunakan untuk menambah modal usaha agar dapat memperoleh keuntungan yang memadai.

Sedangkan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk lebih fleksibel dalam pelayanan termasuk pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerapkan mekanisme PPK – BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Boejasin.

### 3. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan-kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten maupun antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.

#### 4. Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat dilaksanakan dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai melalui perbaikan administrasi aset, peningkatan turnover, bekerjasama dengan swasta, dan perlu didukung rencana untuk membentuk badan usaha baru.

Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan asli daerah, dapat berdampak yang tanpa disadari akan melupakan substansi dari nilai-nilai pelayanan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2013 – 2018 dilakukan dengan terlebih dahulu menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut yang kemudian diformulasikan menjadi isu-isu strategis. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan yang dimaksud dengan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah / masyarakat dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis ini dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut**

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan ini dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi dan perumusan permasalahan baik untuk penentuan program pembangunan daerah maupun untuk kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut kedepan didasarkan pada gambaran umum kondisi kabupaten

Tanah Laut saat ini atau kondisi “existing”; Selain itu; permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah Laut diidentifikasi berdasarkan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala Kabupaten, Provinsi; Regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Perumusan permasalahan ini penting agar mampu mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### **4.1.1. Aspek Infrastruktur dan Tata Ruang**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang Kabupaten Tanah Laut adalah :

##### **a. Prasarana jalan dan jembatan**

Panjang jalan di Tanah Laut berdasar data tahun 2011 dibagi menjadi 3 yaitu : Jalan Nasional dengan panjang jalan yaitu 140,76 km, Jalan Provinsi dengan panjang jalan yaitu 104,907 km, dan Jalan Kabupaten dengan panjang jalan yaitu 1.380,45 km. Dan untuk kondisi jalan yaitu ; Berbatu sepanjang 376,58 km, Hotmix sepanjang 588,72 km, Tanah sepanjang 241,79 km, dan tidak dirinci sepanjang 173,35 km. Dari rincian tersebut kondisi tidak terlalu baik (sedang) untuk jalan Provinsi masih sepanjang 10,07 km dan jalan Kabupaten sepanjang 178,25 km. Kondisi jalan yang rusak mencapai 171,96 km dan rusak berat mencapai 174,35 km. Permasalahan yang dihadapi dalam hal infrastruktur jalan ini adalah keperluan perbaikan dan pemeliharaan; peningkatan kualitas; serta pelebaran jalan untuk memenuhi kelancaran transportasi darat yang disebabkan makin bertambahnya kendaraan. Keterbatasan dana oleh pemerintah menjadi masalah utama dalam hal infrastruktur jalan ini termasuk juga masalah pembebasan lahan. Peran serta swasta dalam hal ini juga masih sangat terbatas. Padahal

infrastruktur jalan juga memegang peranan penting guna menjadi pengungkit dan pengunci pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi termasuk kepariwisataan.

Keadaan jembatan yang di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan data tahun 2011 berjumlah 427 buah dengan panjang jembatan 21.755 km. Permasalahan yang dihadapi dalam hal infrastruktur jembatan ini adalah keperluan perbaikan dan pemeliharaan serta pelebaran untuk memenuhi mendukung kelancaran transportasi. Sama dengan infrastruktur jalan; masalah utama adalah keterbatasan dana pemerintah.

#### **b. Irigasi**

Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan irigasi. Data tahun 2011 memperlihatkan bahwa Kabupaten Tanah Laut tidak mempunyai irigasi teknis. Irigasi setengah teknis hanya mencakup area tanam padi dua kali setahun seluas 430 ha dan tanam padi sekali setahun seluas 865 ha. Sisa lahan yang terairi oleh irigasi setengah teknis hanya dicakup oleh irigasi sederhana dan irigasi desa. Perlu peningkatan cakupan irigasi setengah teknis. Permasalahan lain yang juga dihadapi dalam hal irigasi ini adalah keperluan perbaikan dan pemeliharaan serta pembangunan irigasi baru termasuk kegiatan pendukungnya seperti hulu air irigasi dan percetakan sawah.

#### **c. Air Minum dan Listrik**

Masih rendahnya pemerataan dan kualitas pelayanan air minum. Ketersediaan air minum yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat, berdasarkan data yang diperoleh sampai tahun 2011, air minum yang terjual adalah sebesar 707.621 m<sup>3</sup> dengan jumlah pelanggan 5.672 pelanggan. Hanya saja tingkat pemerataan pelayanan belum merata dimana sebagian besar pelanggan berada di

Kecamatan Pelaihari; Bati-Bati dan Jorong serta Takisung. Sedangkan Kecamatan lain seperti Kurau dan Bumi Makmur tidak ada data yang menunjukkan telah dilakukan pelayanan air bersih oleh PDAM. Kinerja PDAM selaku perusahaan daerah harus lebih ditingkatkan lagi untuk lima tahun ke depan terutama untuk pelayanan pelanggan dan pemeliharaan jaringan. Permasalahan lain adalah terbatasnya penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum baik secara kualitas maupun kuantitas dalam rangka memenuhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air bersih. Kemampuan finansial rumah tangga di perdesaan untuk membayar harga air minum juga menjadi masalah sehingga perlu pemikiran untuk melakukan adanya subsidi silang. Kemampuan dan kualitas air perpipaan di masa lima tahun yang akan datang akan menjadi salah satu indikator pelayanan publik yang penting.

Tersedianya tenaga listrik dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta terjamin kontinuitasnya akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor industri maupun bidang lainnya. Permasalahan yang dihadapi dalam hal tenaga listrik adalah kontinuitas pasokan sehingga masih sering terjadi pemadaman bergilir pada waktu-waktu tertentu; masih kurangnya peningkatan kapasitas terpasang dan perluasan jangkauan pelayanan. Jaringan listrik yang dapat dibangun oleh PLN juga masih sangat terbatas. Jumlah pelanggan listrik PLN selama tahun 2011 tercatat sudah sebanyak 47.339 pelanggan dengan KWH terjual 89.115.713 KWH. Masih ada kelompok masyarakat yang tidak terlayani listrik secara langsung.

#### **d. Perumahan**

Lahan untuk kawasan permukiman akan semakin banyak diperlukan guna pengembangan kebutuhan permukiman kedepan serta peningkatan kualitas permukiman yang ada. Permintaan lahan yang tinggi untuk perumahan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan itu sendiri akan mengakibatkan harga lahan yang tinggi sehingga berpotensi mendorong semakin cepatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan untuk perumahan. Pertambahan perumahan dan permukiman juga memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak dengan lingkungan yang sehat, sanitasi yang baik, aman, dan teratur namun terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Masalah sampah dan limbah pemukiman sampai saat ini juga masih belum teratasi secara tuntas dan kedepan masalah ini akan terus terjadi dengan kuantitas yang semakin banyak.

#### **e. Tata Ruang**

Fungsi pengendalian dan penataan ruang dirasa sampai saat ini masih belum konsisten. Salah satu penyebab adalah belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektoral. Akibat lain dari adanya penyimpangan tata ruang adalah terjadinya degradasi lingkungan. Aspek penegakan hukum juga belum berjalan terhadap pelanggaran aturan tata ruang. Masih tingginya potensi konflik dalam hal pemanfaatan ruang. Oleh sebab itu aspek aspek pengendalian ruang, seperti sumberdaya manusia, perangkat hukum (sanksi), insentif disinsentif, perizinan, dan *zoning regulation* dalam lima tahun kedepan harus dijalankan. Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang juga masih rendah. Masih belum optimalnya

pemanfaatan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam mengendalikan fungsi tata ruang. Persyaratan IMB selama ini hanya berlaku di daerah perkotaan khususnya di Kecamatan Pelaihari sedangkan di daerah perdesaan belum terlaksana. Masih tingginya disparitas antar wilayah dan semakin tingginya konversi (alih fungsi) lahan pertanian.

#### **f. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Jumlah sarana angkutan penumpang berdasar data tahun 2011 adalah taksi sebanyak 56 buah, bus sebanyak 8 buah. Sedangkan untuk mobil barang yaitu truk sebanyak 758 buah dan pick up sebanyak 963 buah. Kualitas pelayanan angkutan umum untuk mendukung kebutuhan akan pelayanan transportasi darat yang mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut sekaligus juga menunjang kegiatan pariwisata masih perlu ditingkatkan. Penegakan aturan terhadap kelebihan muatan angkutan barang belum berjalan sebagai mana seharusnya termasuk uji kelayakan terhadap angkutan umum. Perlunya peningkatan prasarana dan fungsi terminal Tanah Habang yang aktivitasnya sudah sangat padat walaupun hanya melayani angkutan antar Kabupaten/Kota, maupun angkutan pedesaan di Kabupaten Tanah Laut. Masih perlunya penambahan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, dan pengaman jalan. Di bidang perhubungan laut; perlunya percepatan pembangunan pelabuhan laut sebagai pintu gerbang arus barang dari luar daerah baik untuk Kabupaten Tanah Laut maupun Provinsi Kalimantan Selatan.

Di bidang komunikasi; rasio jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut yang dapat terlayani oleh jaringan komunikasi telepon rumah, rasionya masih rendah serta tidak merata. Data tahun 2011

menunjukkan bahwa jumlah pelanggan telepon rumah berjumlah 3.105 yang tersebar utamanya hanya pada tiga kecamatan saja yaitu kecamatan Pelaihari, Bati-Bati dan Takisung. Demikian pula halnya dengan jumlah pelanggan internet yang hanya sebanyak 1.071 pelanggan dengan warung internet sebanyak 27 buah yang juga terkonsentrasi hanya di Kecamatan Pelaihari, Bati-Bati dan Takisung. Pada masa lima tahun kedepan; diprediksi keberadaan jasa pelayanan teknologi informasi internet akan semakin meningkat sehingga perlu adanya kontrol untuk meminimalkan terjadinya cultural shock dan dampak sosial lainnya terutama bagi anak-anak usia sekolah. Keterbatasan penggunaan telepon rumah dewasa ini dapat diatasi dengan semakin berkembangnya penggunaan telepon selular yang sekarang sudah dapat diakses di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. Infrastruktur komunikasi yang juga berperan penting adalah keberadaan PT. Pos. Jumlah kantor pos yang ada di Kabupaten Tanah Laut tidak mengalami perubahan dari tahun 2009 hingga tahun 2011, yaitu sebanyak 8 unit. Masih ada tiga kecamatan yang belum terdapat kantor Pos yaitu kecamatan Bumi Makmur, Tambang Ulang dan Bajuin. Diharapkan dalam lima tahun kedepan; seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut masing-masing sudah mempunyai kantor Pos sehingga pelayanan untuk berkomunikasi baik melalui pengiriman surat-surat, paket pos, wesel dan lain sebagainya bagi masyarakat luas termasuk masyarakat perdesaan dapat lebih baik.

#### **4.1.3. Aspek Perekonomian**

##### **a. Bidang Ekonomi**

Salah satu unsur penting dalam bidang ekonomi Kabupaten Tanah Laut yang perlu dijaga dan dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi untuk masa lima tahun kedepan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. RPJP Kabupaten Tanah Laut 2007 – 2025 mengarahkan perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

yaitu pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada sektor riil serta mampu mengurangi pengangguran.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya memperoleh tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan berkualitas tersebut memerlukan sumber pembiayaan yang tidak mungkin dipenuhi oleh investasi pemerintah saja tetapi juga harus dari investasi swasta. Memang dalam kurun waktu lima tahun terakhir; investasi swasta di Kabupaten Tanah Laut termasuk yang tinggi di Kalimantan Selatan. Namun investasi tersebut lebih banyak disektor pertambangan primer sehingga pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sektor pertambangan primer tersebut yang umumnya memang padat modal. Bila sumberdaya tambang tersebut habis atau harga komoditas pertambangan menurun di pasar dunia maka akan berdampak terhadap kondisi ekonomi. Kondisi akhir-akhir ini dan juga dalam satu atau dua tahun kedepan tidak lagi mudah mengingat tekanan nilai tukar rupiah yang sewaktu-waktu “bergejolak” serta makin langkanya ketersediaan energi yang ditandai oleh tingginya harga minyak di pasar dunia.

Permasalahan lain bidang ekonomi adalah masih belum kuatnya keterkaitan antara sektor peranian dengan industri untuk menghasilkan nilai tambah produk. Indikator ini terlihat dari lambatnya perubahan struktur ekonomi dimana sektor pertanian selaku sektor primer masih tetap dengan persentase yang cukup tinggi sementara sektor sekunder terutama sektor industri pertambahan persentasenya dalam PDRB Kabupaten Tanah Laut lima tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi struktural seperti yang diinginkan oleh RPJP Kabupaten Tanah Laut; RPJP Kalsel maupun RPJMN tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

## **b. Bidang Pertanian**

### **b.1. Tanaman Padi dan Palawija**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi tanaman padi palawija seperti padi, jagung, dan singkong secara kontinu mengalami surplus. Periode lima tahun kedepan adalah mempertahankan dan meningkatkan produksi sehingga kondisi surplus tersebut tetap terjaga.

Salah satu komoditas yang masih perlu ditingkatkan produksinya adalah tanaman kedelai mengingat tanaman ini menjadi bahan dasar pembuatan tahu dan tempe yang permintaannya terus bertambah setiap tahun dan harganya terus menaik.

Dalam hal tanaman padi; infrastruktur jaringan irigasi masih menjadi kendala. Produktivitas tanaman padi sawah yang rata-rata masih sekitar 4,0 ton/ha (data tahun 2011) masih memungkinkan untuk ditingkatkan pada periode lima tahun kedepan. Jalan usahatani juga perlu terus ditambah dan diperbaiki guna kelancaran kegiatan usahatani. Lemahnya kelembagaan harus diperbaiki sehingga posisi tawar petani menjadi lebih kuat. Lahan pengusahaan petani pangan dan palawija relatif makin sempit akibat perpecahan lahan maupun akibat alih fungsi sehingga pendapatan yang diperoleh pada sebagian petani tidak mencukupi kebutuhan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi.

Kabupaten Tanah Laut selama ini menjadi sentra pertanaman dan produksi jagung di Kalsel dan hal ini agar terus dipertahankan untuk masa lima tahun kedepan. Dalam hal produksi jagung; selain mempertahankan ketersediaan lahan yang ada untuk produksi juga dapat dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur potensial. Kualitas hasil produksi jagung masih perlu ditingkatkan terutama membenahan fase pasca panen sehingga hasil produksi jagung Kabupaten Tanah Laut sebagian besar mampu memenuhi kriteria

yang disyaratkan oleh para pembeli terutama pihak pabrik makanan ternak. Fungsi dan peranan kelembagaan untuk tanaman jagung agar ditingkatkan lagi.

Tantangan dalam hal produksi padi dan palawija adalah alih fungsi lahan baik dari lahan pertanian ke pertanian maupun dari lahan pertanian ke non pertanian. Perlu tindak lanjut dalam hal mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan seperti yang diamanatkan oleh UU No 41 tahun 2009. Adanya perubahan iklim, selain berpengaruh terhadap produksi akibat cuaca juga mengakibatkan mudahnya terjadi serangan hama penyakit. Oleh sebab itu hal ini diantisipasi, salah satunya melalui kegiatan sekolah lapang untuk mengedukasi petani untuk mampu mengatasi dampak perubahan iklim ini. Masalah lainnya juga adalah harga sarana produksi pada tanaman pangan dan palawija cenderung terus meningkat karena berbagai faktor ekonomi di luar pertanian sementara harga produksinya berfluktuatif.

## **b.2. Tanaman Perkebunan**

Kabupaten Tanah Laut juga merupakan sentra tanaman perkebunan terutama Kelapa Sawit dan Karet. Tanaman karet sebagian besar dipunyai oleh petani perseorangan sehingga jenis karet yang diusahakan serta sistim pemeliharaan termasuk pengolahannya sangat beragam. Hal ini mengakibatkan produktivitas dan kualitas karet yang dihasilkan rendah yang berakibat juga pada harga jual yang rendah. Produksi karet ini juga masih mempunyai potensi yang cukup besar jika melihat luasnya lahan tanaman karet yang sudah ditanam tapi belum menghasilkan. Selain diakibatkan rendahnya kualitas, masalah pemasaran dan tawar menawar harga karet adalah Kurangnya informasi pasar dan serta belum berfungsinya kelembagaan. Tidak ada dan tidak berfungsinya pasar lelang juga merupakan salah satu masalah dalam pemasaran.

Tanaman kelapa sawit di Kabupaten Tanah Laut utamanya diusahakan oleh perkebunan besar swasta dan terpusat pada kecamatan Jorong, Kintap dan Batu Ampar. Harga selama ini sangat ditentukan juga oleh harga CPO di pasar dunia sehingga bila harga dunia mengalami penurunan maka harga kelapa sawit juga mengalami penurunan. Bila hal ini terjadi akan berpengaruh pada pendapatan petani plasma. Perluasan areal tanaman sawit di Kabupaten Tanah Laut jangan sampai melanggar aturan tata ruang. Proporsi alokasi lahan kelapa sawit untuk kebun plasma juga harus ditaati oleh perusahaan swasta yang membuka perkebunan sawit di Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal pemeliharaan infrastruktur jalan untuk kepentingan umum; perlu tindakan tegas bila armada angkutan sawit ada yang merusak jalan karena kelebihan tonase angkutan.

Masalah lainnya dalam hal perkebunan rakyat adalah banyaknya perkebunan rakyat yang sudah tua dan rusak, yang perlu diremajakan seperti misalnya kelapa dalam. Produktivitas perkebunan rakyat juga rendah karena tidak menggunakan bibit unggul. Terbatasnya akses petani ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha. Masih rendahnya penggunaan sarana teknologi baik untuk budidaya, maupun pengolahan hasil produksi perkebunan

### **b.3. Peternakan**

Populasi ternak besar di Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sapi potong dan kerbau. Hanya saja populasi sapi potong tahun 2011 menurun sebesar 35% dibanding populasi tahun 2010. Semakin tingginya permintaan akan daging serta adanya kebijakan pemerintah pusat untuk swasembada daging tahun 2015; memberi peluang

cukup besar untuk mengembangkan populasi ternak besar ini. Permasalahan yang dihadapi petani adalah permodalan; mahal nya harga sapi bakalan; serta lahan untuk ditanami pakan semakin berkurang karena digunakan untuk tanaman lain. Kedepan; perlu memberi peluang kepada pihak swasta untuk mengembangkan ternak sapi dengan memanfaatkan lahan-lahan yang selam ini masih belum termanfaatkan.

Ternak unggas di Kabupaten Tanah Laut di dominasi oleh ayam pedaging dan petelur serta ayam buras. Masalah yang dihadapi meliputi : harga biaya produksi (terutama pakan); serangan penyakit; ketersediaan lahan yang jauh dari pemukiman.

#### **b.4. Perikanan**

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Kabupaten utama di Kalsel yang menjadi pemasok ikan laut. Pada tahun 2011 produksi perikanan laut tercatat sebanyak 37,483 ton dan produksi perikanan perairan umum tercatat sebanyak 4.708 ton. Jumlah kapal penangkap ikan tahun 2011 mencapai 1.929 unit. Masalah utama adalah keterbatasan jumlah armada penangkapan di laut dan juga keterbatasan kemampuan kapal nelayan untuk melakukan penangkapan secara maksimal. Masalah lainnya adalah kenaikan harga BBM jenis solar yang semakin menambah biaya produksi bagi para nelayan. Selama ini hasil perikanan laut di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar dijual dalam bentuk segar dan aspek penawetan serta pengolahan belum banyak berperan dalam meningkatkan nilai tambah hasil laut yang diperoleh nelayan.

Luas perikanan darat di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2011 adalah seluas 9.174,3 m<sup>3</sup> dengan jumlah rumah tangga produksi sebesar 231 ton. Produksi perikanan perairan umum sebesar 4.708 ton. Masih terbuka peluang untuk meningkatkan produksi perikanan darat melalui ekstensifikasi usaha. Masalah dalam

pengembangan usaha perikanan darat ini salah satunya adalah permodalan dan masalah pakan (kontinuitas ketersediaan dan harganya). Masalah lain dalam perikanan adalah kegiatan ilegal seperti masih maraknya penyetruman.

### **C. Bidang Ketahanan Pangan**

Masalah umum ketahanan pangan meliputi : (a) akses pangan; (b) penyerapan pangan; (c) ketersediaan pangan; serta (d) keamanan pangan. Masalah spesifik yang dihadapi dalam hal ketahanan pangan dalam lima tahun terakhir adalah : (a) terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan produktif; (b) Penurunan kesuburan lahan pangan produktif; (c) Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap bahan pangan karena rendahnya pendapatan; (d) terjadinya bencana alam sehingga merusak areal lahan pertanian dan juga mengakibatkan gagal panen; (e) adanya dampak perubahan iklim; dan (f) masih adanya rumahtangga yang rawan pangan. Upaya diversifikasi pangan sebagai substitusi beras juga belum terlaksana dengan baik sehingga konsumsi beras setiap tahun terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

### **d. Bidang Kehutanan**

Kabupaten Tanah Laut memiliki areal hutan berdasar data tahun 2011 seluas 132.645 Ha. Luas lahan kritis pada areal hutan di Kabupaten Tanah Laut sebesar 54.929 Ha dan sangat kritis sebesar 14.543 Ha. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius sehingga diharapkan lahan kritis di Kabupaten Tanah Laut tidak bertambah. Selain itu areal kawasan hutan lindung yang mencapai luasan 15.861 ha harus tetap dijaga. Produksi kayu olahan pada tahun 2011 hanya tinggal pada kayu gergajian saja. Diharapkan pada lima tahun kedepan, jenis kayu olahan lebih variatif lagi sejalan dengan program peningkatan dari hutan produksi sehingga nilai tambah dari kegiatan produksi kayu olahan ini lebih besar. Pelaksanaan program

rehabilitasi hutan dan lahan terutama untuk hutan mangrove serta hutan lindung harus terus ditingkatkan. Berbagai masalah lain dalam periode lima tahun terakhir meliputi : (a) masih terjadinya deforestasi akibat perambahan hutan dan *illegal logging*, serta ancaman kebakaran hutan; (b) Masih rendahnya Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengawasan dan pengelolaan hutan; (c) Masih Kurangnya tenaga personil pembinaan dan pengamanan hutan; (d) Tingginya ancaman terhadap kerusakan keanekaragaman hayati.

#### **e. Bidang Pertambangan**

Sektor pertambangan merupakan sektor yang berperan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut. Ada empat jenis bahan tambang utama yaitu batubara; bijih besi; mangaan dan bijih nikel. Selain itu juga ada emas, nikel, batu kromit dll. Satu sisi tidak dipungkiri pertambangan telah mampu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat; namun pada sisi lain harus diakui pula terjadi penurunan kualitas lingkungan akibat dampak kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang tidak terkelola dengan baik. Masalah degradasi lingkungan akibat pertambangan ini selama lima tahun terakhir ini belum teratasi dengan baik.

Secara rinci; permasalahan fisik yang diakibatkan oleh pertambangan adalah (a) penurunan kualitas udara; (b) Fisiografi dan Tanah; (c) Hidrologi dan Kualitas Air; (d) Tata Ruang dan Tata Guna Lahan; serta (e) Flora dan fauna serta habitat dan ekosistemnya. Selain itu juga bisa terjadi permasalahan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti kesenjangan; belum tuntasnya pembebasan lahan; kesempatan kerja; konflik antar penduduk asli dan pendatang. Masalah penting lainnya adalah penutupan tambang seperti yang akan dilakukan oleh PT. JBG di Jorong. Bila penyiapan penutupan tambang ini tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak negatif baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi.

Masalah lainnya juga adalah illegal mining yang dilakukan oleh sekelompok individu atau masyarakat yang biasanya tidak mengindahkan kaedah dan aturan yang telah ditetapkan. Peran pengawasan di sektor pertambangan dalam lima tahun terakhir dirasa masih belum optimal. Demikian juga dengan aspek penegakan hukum dan aturan yang masih lemah.

Pada bahan galian lain, masih banyak Eksploitasi bahan galian yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan. Pada periode lima tahun yang akan datang harus dapat dipastikan bahwa seluruh pemilik izin usaha pertambangan sudah menempatkan dana reklamasi. Selama ini ketaatan perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi masih kurang.

#### **f. Bidang Industri**

Sesuai dengan arahan RPJPD Kabupaten Tanah Laut maka pembangunan sektor industri dalam lima tahun terakhir telah dititikberatkan pada pengembangan industri kecil dan menengah yang didalamnya termasuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia disamping dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan. Industri kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam mendukung berlangsungnya pertumbuhan industri, produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan peranan ekspor non-migas dalam perekonomian Tanah Laut. Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan dalam menopang perekonomian di daerah. Berdasarkan data yang diperoleh yang membedakan kelompok industri dalam tiga kelompok yaitu : industri logam mesin dan kimia, industri aneka dan industri hasil pertanian dan kehutanan.

Masalah yang dihadapi meliputi daya saing; permodalan, kontinuitas bahan baku dan produksi; teknis kemasan, kualitas Manajemen, wawasan dan pola pikir. Masalah perizinan, sistimnya harus lebih disederhanakan dan layanannya lebih ditingkatkan.

#### **g. Bidang Perdagangan**

Perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Oleh karena itu pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekspor non migas. Untuk mendukung industri perdagangan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, penyediaan sarana perdagangan juga merupakan suatu yang amat penting dalam rangka mempercepat perkembangan perekonomian wilayah. Sarana perdagangan yang meliputi pasar baik itu pasar umum maupun pasar desa memegang peran yang sangat strategis. Jumlah pasar desa yang ada saat ini di wilayah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 90 buah. Sedangkan pasar umum sebanyak 13 buah, dimana aktivitas pasar mampu memberikan peluang bagi hasil bumi di Tanah Laut. Masalah pemeliharaan; peningkatan fasilitas pasar; dan akses kepasar merupakan permasalahan yang harus diatasi periode lima tahun kedepan.

#### **h. Bidang Pariwisata**

Sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Laut mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan. Sektor ini bersama sektor pertanian (secara luas) akan menjadi sektor andalan manakala sektor pertambangan sudah tidak bisa diandalkan lagi. Jumlah kunjungan

wisatawan yang relatif stabil (periode tahun 2009-2011) hanya pada pantai Takisung; Batakan dan Air terjun Bajuin. Sementara pantai Swarangan pada tahun 2011 mengalami penurunan yang sangat drastis. Sektor ini telah didukung oleh 14 buah hotel dengan ketersediaan sebanyak 149 kamar. Beberapa masalah pokok bidang pariwisata Kabupaten Tanah Laut adalah :

- (a) Belum terolahnya secara optimal objek-objek dan kawasan potensial pariwisata terutama objek wisata selain pantai.
- (b) Kualitas infrastruktur pendukung terutama jalan ke objek wisata masih rendah
- (c) Masih belum terbentuknya masyarakat sadar wisata
- (d) Rasa aman dan nyaman bagi pengunjung objek wisata masih belum dirasakan sepenuhnya
- (e) Masih rendahnya peran sektor swasta dalam investasi di sektor pariwisata
- (f) Belum tercapainya keterpaduan berbagai sektor untuk secara bersama mengembangkan pariwisata
- (g) Belum adanya pengembangan sistem informasi kepariwisataan

#### **i. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

##### **Permasalahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

**antara lain :**

- (a) Terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan baik konvensional maupun syariah, teknologi, informasi dan pasar;
- (b) Rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran;
- (c) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi UMKM
- (d) Rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM

## **j. Bidang Lingkungan Hidup**

RPJP Kabupaten Tanah Laut mengamanatkan bahwa aspek berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus tercermin dalam setiap kegiatan pembangunan. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Tanah Laut tentu saja membawa dampak yang akan menurunkan kualitas lingkungan. Selain itu, berbagai masalah juga muncul terkait dengan bidang lingkungan; antara lain :

- (a) Penyimpangan terhadap ketentuan tata ruang
- (b) Belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- (c) Belum efektifnya pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- (d) Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- (e) Masih terbatasnya ruang terbuka hijau
- (f) Kurang tersedianya tempat sampah di lokasi-lokasi padat aktivitas, terbatasnya jumlah TPS serta terbatasnya armada pengangkutan sampah dari TPS ke TPA serta perlunya optimalisasi TPA regional
- (g) Masih belum memadainya kawasan ruang terbuka hijau
- (h) Terjadinya perubahan lingkungan karena aktifitas manusia antara lain penggunaan pestisida yang dapat menimbulkan pencemaran
- (i) Rendahnya tingkat kepedulian dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan
- (j) Masih belum berhasilnya rehabilitasi kawasan hutan dan areal bekas tambang.

#### **4.1.4. Aspek Sosial Budaya**

##### **a. Bidang Pendidikan**

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumberdaya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan akan pasar tenaga kerja. Keberadaan politeknik industri yang memang sesuai dengan amanat RPJPD merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Laut dan nantinya diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi pasar kerja.

Permasalahan di bidang pendidikan antara lain:

- (a) Rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin.
- (b) Masih belum meratanya persebaran tenaga pendidik berkualitas dimana guru-guru yang berkualitas lebih banyak berada di perkotaan. Peningkatan kualitas pendidik juga harus terus dilakukan.
- (c) Masih perlunya peningkatan mutu pendidikan untuk memenuhi kompetensi peserta didik yang dilandasi moral agama sehingga tercipta generasi yang cerdas, menguasai IPTEKS serta berbudi luhur dan berakhlak.
- (d) Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- (e) Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup besar antar kelompok masyarakat.
- (f) Model pendidikan “*boarding*” atau sekolah berasrama harus mulai dirintis pada lima tahun kedepan dengan peserta didik berasal dari putra-putri terbaik di Kabupaten Tanah Laut.

- (g) Pendidikan luar sekolah dan kecakapan hidup (*life skill*) untuk memberikan keterampilan sesuai potensi lingkungan kepada para peserta didik yang tidak lagi menempuh pendidikan formal masih perlu ditingkatkan

Hal yang sama juga terdapat pada pendidikan berbasis agama sehingga tertanamnya nilai-nilai agama kepada para generasi muda / pelajar dan peningkatan pengamalan ajaran agama secara *kaffah* sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan pesantren dan atau “kepesantrenan” yang sudah ada sekarang harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya selain juga pendidikan formal yang berbasis agama seperti MI; MTsN; maupun MAN.

#### **b. Bidang Kesehatan**

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM), selain tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk itu pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan pembangunan kesehatan harus mencakup peningkatan kualitas kelembagaan, sumberdaya manusia, dan tata kelola.

Permasalahan yang ada di bidang kesehatan antara lain:

- (a) Akses masyarakat miskin dan masyarakat berkebutuhan khusus untuk memperoleh pelayanan kesehatan masih rendah
- (b) Masih perlunya menekan angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan
- (c) Masih kurangnya sumberdaya manusia di bidang kesehatan terutama keberadaan dokter spesialis di RS Boeyasin

- (d) Kualitas tenaga medis dan para medis serta penempatannya belum merata
- (e) Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan
- (f) Kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan
- (g) Kondisi kesehatan lingkungan masih rendah;
- (h) Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah
- (i) Peran lintas sektor dalam bidang kesehatan belum optimal;

**c. Bidang Kependudukan**

Permasalahan yang ada di bidang kependudukan antara lain:

- (a) Penyebaran penduduk yang tidak merata pada masing-masing wilayah dimana Kecamatan Pelaihari dan Bati-Bati rata-rata kepadatan penduduknya tinggi sementara Kecamatan lain masih sedikit
- (b) Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka dan terselubung
- (c) Masih belum optimalnya pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan
- (d) Belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.
- (e) Masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana
- (f) Pemakaian alat kontrasepsi masih rendah
- (g) Kurangnya tenaga penyuluh KB

**d. Bidang Sosial**

- (a). Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- (b). Cakupan bantuan sosial bagi PMKS masih rendah dan tumpang tindih;

- (c). Upaya pemberdayaan sosial sebagai upaya membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan optimal;
- (d). Masalah lansia yang semakin bertambah akibat membaiknya bidang kesehatan
- (e). Makin banyaknya pengemis di daerah perkotaan terutama di kota Pelaihari

**e. Bidang Pemuda dan Olah Raga**

- (a). Perlunya peningkatan prasarana dan sarana kegiatan olahraga untuk prestasi
- (b). Perlunya peniungkatan sarana dan prasaran olahraga untuk memfasilitasi kegiatan olahraga masyarakat serta memperluas budaya berolahraga di masyarakat
- (c). Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah ;
- (d).Makin besarnya dampak negatif dan ancaman globalisasi bagi pemuda

**4.2. Isu-isu Strategis**

Seperti telah dikemukakan di awal bahwa isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kabupaten Kabupaten Tanah Laut disusun dari permasalahan serta tantangan yang dihadapi Kabupaten Tanah Laut ke depan. Isu-isu strategis di atas perlu dikorelasikan dengan isu dan kebijakan nasional maupun regional khususnya yang memberikan manfaat atau pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari NKRI dan Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah

Laut perlu memperhatikan isu dan permasalahan yang menjadi juga menjadi penekanan pemerintah pusat dan provinsi pada periode pembangunan yang tengah berlangsung agar program pembangunan yang dijalankan nantinya dapat sejalan dan terintegrasi dengan arah kebijakan dari pusat dan provinsi. Di samping itu, RPJMD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 sehingga juga harus mengacu pada arahan pembangunan yang ada pada RPJPD tersebut. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, terdapat 11 prioritas nasional, beberapa di antaranya sangat relevan dengan isu pembangunan Kabupaten Tanah Laut saat ini yakni pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, energi dan lingkungan hidup.

Adapun fokus perhatian Provinsi Kalimantan Selatan pada periode RPJM Provinsi 2011- 2015 di antaranya adalah peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah serta pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Mengacu pada berbagai isu kebijakan serta permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut , yaitu dalam hal :

- 1. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan**

Aspek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu isu strategis sejak mulai meningkatnya aktivitas sektor pertambangan dalam 10 tahun terakhir. Tidak dipungkiri bahwa pemberlakuan otonomi daerah,

sebagai salah satu dari hasil reformasi; pada batas-batas tertentu telah memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) termasuk kabupaten Tanah Laut untuk menentukan kebijakan pembangunannya. Dengan adanya otonomi daerah ini masing-masing daerah diharapkan mampu untuk menciptakan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, infrastruktur, meningkatkan daya dukung lingkungan dan melakukan konservasi. Pada dasarnya yang diperlukan pada kebijakan lokal dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam adalah yang bersifat *resource friendly* tidak hanya sekedar *market friendly*. Sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumberdaya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus tetap sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*) secara berkelanjutan. Secara umum; dampak negatif pertambangan terutama batubara mengakibatkan hilangnya fungsi proteksi terhadap tanah, hilangnya keanekaragaman hayati (*gene pool*), terjadinya degradasi pada daerah aliran sungai, perubahan bentuk lahan, terjadinya peningkatan erosi, dan terlepasnya logam-logam berat yang dapat masuk ke lingkungan perairan. Dampak yang terjadi tersebut juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Persoalan pengelolaan sumberdaya alam ini juga banyak pada awalnya disebabkan oleh adanya penyimpangan terhadap ketentuan tata ruang. Hal ini berlanjut pada unsur pengawasan yang masih kurang; aspek penegakan hukum yang lemah serta belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan serta belum efektifnya pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam. Rehabilitasi areal bekas tambang dan kawasan hutan juga menjadi isu strategis bagi Kabupaten Tanah Laut. Isu strategis yang

menyangkut lingkungan hidup sesungguhnya tidak hanya pada bidang pertambangan tetapi juga perubahan lingkungan karena aktifitas pada sektor pertanian dan kehutanan. Adanya perkebunan sawit pada satu sisi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian namun pada sisi lain juga memberi tekanan pada kualitas lingkungan hidup mulai dari pelanggaran tata ruang; pencemaran pestisida dan dampak sosial ekonomi lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Tanah Laut dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan, meliputi pembenahan sarana dan prasarana, pembuatan peraturan, dan pedoman pengelolaan lingkungan, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, pemantauan lingkungan. Namun upaya-upaya tersebut harus lebih ditingkatkan lagi pada periode lima tahun kedepan sebagai antisipasi dan jawaban atas isu strategis ini.

## **2. Kesenjangan antar wilayah dan pendapatan**

Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 Kecamatan dengan tipologi wilayah pesisir dan pantai; wilayah dataran rendah dan rawa serta wilayah dataran tinggi. Pada umumnya wilayah penduduk perdesaan di wilayah pesisir dan pantai yang berprofesi sebagai nelayan kecil mempunyai tingkat pendapatan yang rendah. Memang pada daerah-daerah pesisir dan pantai dijumpai juga masyarakat dengan peningkatan pendapatannya tinggi, namun hal tersebut karena terkait dengan aktivitas non perikanan seperti misalnya karena pada daerah pesisir tersebut terdapat aktivitas pertambangan dan masyarakat sekitarnya mampu mendapatkan multiplier effect dari kegiatan-kegiatan tersebut. Umumnya bila daerah pesisir dan pantai tersebut didiami masyarakat dengan mata pencaharian nelayan kecil maka tingkat pendapatan rendah. Demikian pula halnya dengan masyarakat perdesaan yang mendiami dataran rendah dan rawa seperti misalnya di daerah Kecamatan Kurau. Sebagian besar masyarakatnya adalah pertanian pangan yang bila lahan yang

dimilikinya tidak terlalu luas maka umumnya pendapatan rumahtangganya rendah. Ditambah lagi pertanian pangan ini sangat rentan oleh dampak perubahan iklim yang salah satunya banjir atau kekeringan. Sebaliknya; masyarakat perkotaan seperti Pelaihari dan maupun dataran tinggi yang tergolong perdesaan seperti Kecamatan Jorong, masyarakatnya mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Adanya pemusatan ekonomi di Kecamatan Pelaihari dan aktivitas pertambangan seperti yang ada di Kecamatan Jorong memang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kesenjangan tidak hanya pada pendapatan masyarakat namun juga pada kuantitas dan kualitas infastruktur. Pada daerah perkotaan seperti Pelaihari dan Bati-Bati, kuantitas dan kualitas infastruktur jauh lebih baik dibanding wilayah-wilayah lain yang di perdesaan. Hal ini tidak hanya berdampak pada perekonomian tetapi juga pada kualitas hidup masyarakatnya termasuk kesenjangan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Periode lima tahun kedepan, kesenjangan ini harus dapat dikurangi.

### **3. Potensi kawasan pantai dan pesisir yang belum dimanfaatkan secara optimal**

Kabupaten Tanah Laut mempunyai garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Sebagian besar daerah pesisir dan pantai ini masih dihuni oleh masyarakat dengan mata pencaharian utamanya adalah nelayan dengan serba keterbatasannya. Tidak mengherankan bila sebagian besar dari penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut adalah penduduk yang bertempat tinggal di kawasan pesisir dan pantai dengan mata pencaharian nelayan kecil. Selain itu, ketersediaan dan kualitas infastruktur yang ada di kawasan ini masih tertinggal di banding wilayah lain.

### **4. Pelayanan pendidikan dan Kesehatan serta Pencapaian Target Tujuan Millenium (MDG's)**

*Millenium Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan komitmen Indonesia terhadap masyarakat global. Komitmen Indonesia dalam upaya mencapai MDG's adalah komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terdapat 8 program MDG's yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, meliputi 1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2) mencapai pendidikan dasar bagi semua; 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) menurunkan kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) mengendalikan HIV dan AIDS, malaria serta penyakit menular lainnya ; 7) menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan 8) mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global. Dalam upaya mendukung hal tersebut; ada dua urusan wajib yang senantiasa menjadi isu penting di Kabupaten Tanah Laut yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masih diperlukan peningkatan mutu pendidikan untuk memenuhi kompetensi peserta didik yang dilandasi moral agama sehingga tercipta generasi yang cerdas, menguasai IPTEKS serta berbudi luhur dan berakhlak walaupun secara kuantitas sarana pendidikan cukup memadai termasuk keberadaan politeknik industri yang memang sesuai dengan amanat RPJPD merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Laut dan nantinya diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi pasar kerja. Isu strategis dari pelayanan pendidikan lainnya adalah rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat selain masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Hal lain yang juga merupakan isu strategis adalah pelayanan pendidikan luar sekolah dan kecakapan hidup (*life skill*) untuk memberikan keterampilan sesuai potensi lingkungan kepada para

peserta didik yang tidak lagi menempuh pendidikan formal. Tidak semua lulusan SLTA di Kabupaten Tanah Laut yang mampu meneruskan ke bangku kuliah sehingga perlu dibekali dengan keterampilan agar dapat memasuki pasar kerja atau ber wirausaha.

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM), selain tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk itu pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Era jaminan sosial kesehatan masyarakat yang dimulai Januari 2014 harus dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga akses masyarakat miskin dan masyarakat berkebutuhan khusus untuk memperoleh pelayanan kesehatan makin membaik. Hal lain yang juga penting adalah upaya menekan angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan serta kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan

##### **5. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur**

Infrastruktur kewilayahan merupakan hal yang sangat fundamental bagi perkembangan Kabupaten Tanah Laut kini dan mendatang. Infrastruktur sebagai bentuk fundamental dari pelayanan publik maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membangun dan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur dalam upaya mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap daya ungkit ekonomi serta proses perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang mencukupi secara ekonomi akan berbanding lurus dengan daya tarik investasi dan permodalan pada Kabupaten Tanah Laut sehingga akan memberikan dampak pada

meningkatnya daya saing daerah yang tercermin pada keunggulan komparatif yang dimiliki daerah. Dalam prinsip pelayanan publik, infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah tidak hanya yang bersifat menunjang perekonomian daerah tetapi juga terhadap pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Dalam hal ini infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah juga meliputi infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, fasilitas umum dan berbagai fasilitas sosial ekonomi lainnya. Begitu pula dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur lainnya dirasakan belum memadai baik dari sisi kuantitas terlebih dari sisi kualitas serta pemerataan penyebarannya yang berakibat adanya wilayah-wilayah di kawasan kecamatan dan desa yang termarginalkan hak-hak nya untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan.

Isu penting menyangkut persoalan infrastruktur terbatasnya kesesuaian antara infrastruktur yang tersedia terhadap kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan. Panjang jalan kabupaten yang tersedia belum mencukupi dibanding mobilitas kendaraan yang membutuhkan jalan. Pada wilayah kecamatan dan desa masih banyak diperlukan pembukaan jalan baru ataupun peningkatan kualitas jalan yang telah ada. Hal ini terkait dengan upaya untuk membuka akses masyarakat pada wilayah-wilayah terisolir guna meningkatkan potensi perekonomiannya. Keterbatasan dana oleh pemerintah juga menjadi isu penting dalam hal infrastruktur jalan ini termasuk juga masalah pembebasan lahan. Peran serta swasta dalam hal ini juga masih sangat terbatas. Padahal infrastruktur jalan juga memegang peranan penting guna menjadi pengungkit dan pengunci pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi termasuk kepariwisataan

## **6. Kesempatan Kerja dan kemiskinan**

Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memang relatif rendah. Angka IPM Kabupaten juga cukup baik walaupun masih perlu dinaikkan

lagi. Persentase jumlah penduduk miskin sudah di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dibawah persentase nasional. Namun demikian persentase ini tidak tertutup kemungkinan akan meningkat bila sektor-sektor seperti pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian sekaligus memberikan kesempatan kerja yang cukup besar bagi penduduk Kabupaten Tanah Laut tidak mampu lagi berkontribusi terhadap perekonomian. Hal ini bisa saja terjadi karena harga kedua komoditas tersebut sangat terkait dengan harga dunia dan kondisi ekonomi global. Oleh sebab itu, keterkaitan antara kesempatan kerja dan kemiskinan menjadi isu penting di Kabupaten Tanah Laut.

#### **7. Optimalisasi sektor pertanian dan keterkaitannya dengan industri**

Visi dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 adalah “Tanah Laut Sebagai Daerah Industri dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Didasari Nilai-Nilai Agama”. Selanjutnya di dalam misi disebutkan bahwa (a) dalam periode 20 tahun mendatang Kabupaten Tanah Laut berhasil diwujudkan menjadi pusat industri di Kalimantan Selatan berbasis komoditi unggulan daerah yakni industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata; (b) Daerah industri memberikan pengertian perlunya kepastian dan kontinunya suplai bahan baku yang diprioritaskan berasal dari produksi local; (c) Daerah industri memberikan pengertian perlu adanya proses pengolahan yang mampu memberi nilai tambah (*value added*) dalam bentuk yang sesuai dengan permintaan pasar serta sesuai standar mutu yang disyaratkan dengan harga yang bersaing; (d) Daerah industri memberikan pengertian harus adanya sistem distribusi yang baik sehingga mampu mendukung pemasaran produk sampai ke konsumen secara efektif dan efisien.

Berdasarkan visi misi dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut tersebut jelas diinginkan bahwa sektor pertanian tidak hanya mampu meningkatkan produksi dan produktivitas semata tetapi juga mampu memperoleh nilai tambah dari komoditas pertanian tersebut. Keberadaan pabrik pakan ternak dan pabrik pengolah lainnya di Kabupaten Tanah Laut harus mampu dioptimalkan. Dukungan sinergis industri pengolahan ini akan diperkuat lagi dengan dukungan adanya fasilitas pelabuhan yang diarahkan menjadi gerbang masuk maupun keluar produk yang dihasilkan baik oleh Kabupaten Tanah Laut sendiri maupun Kabupaten lainnya yang ada di Kalsel. Kegiatan di sektor perikanan dan kelautan juga harus dilakukan secara terpadu, efisien, profitabilitas dan berkelanjutan serta mendapat dukungan sinergis dari armada kapal dan industri pengolahan skala menengah dan besar guna memperoleh nilai tambah.

Isu strategis terkait pertanian ini adalah ketahanan pangan yang berdasar UU No 18 tahun 2012 tentang pangan meliputi : akses pangan; penyerapan pangan; ketersediaan pangan; serta keamanan pangan. Walaupun dari sisi produksi padi dan jagung; Kabupaten Tanah Laut sudah surplus namun masalah ketahanan pangan tetap akan menjadi isu strategis untuk lima tahun kedepan. Isu lainnya adalah Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap bahan pangan karena rendahnya pendapatan; alih fungsi lahan dan perubahan iklim serta diversifikasi konsumsi pangan dari beras ke non beras.

Selain hal-hal tersebut di atas dalam perumusan isu-isu strategis juga memperhatikan informasi, saran, dan masukan dalam rangkaian kegiatan penyusunan RPJMD ini, yaitu dari hasil Rapat dan pembahasan dalam Tim penyusunan RPJMD, Hasil Forum Konsultasi publik, Masukan dan saran dari DPRD, Hasil Musrenbang RPJMD, Masyarakat, dan sumber lainnya dipandang relevan.

Adapun rangkuman isu strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.
4. Prestasi dan Kreatifitas Pemuda
5. Penanggulangan penduduk miskin
6. Peningkatan ekonomi pertanian dan non pertanian
7. Pasar global dan Pergaulan Investasi skala internasional
8. Penguasaan Informasi dan Teknologi
9. Pengembangan Seni,Budaya dan Destinasi Wisata
10. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur.
11. Pembangunan Pelabuhan
12. Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah
13. Kualitas lingkungan Hidup.
14. Adaptasi dan mitigasi terhadap Bencana dan perubahan iklim.
15. Kualitas demokrasi dan Pemilu nasional Tahun 2014.
16. Modernisasi dan Efektivitas Pemerintahan daerah
17. Penegakan dan harmonisasi produk hukum.
18. Pengelolaan aset daerah.
19. Keterbukaan Informasi Publik dan Kerjasama Daerah
20. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Investasi
21. Penanganan ketertiban, Ketentraman Masyarakat.
22. Penyelenggaraan PORPROV 2017

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada prinsipnya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan memperhatikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten dan memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW Kabupaten lainnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa : RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2018 sebagai berikut :

#### **5.1. VISI**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 adalah : “TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)”.

Terjemahan Visi : Tanah Laut berkemajuan, kampiun, relijius, akuntable, dan terunggul (BerKaRAkTer) memiliki 5 (lima) Frase yang lebih terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu :

### **5.1.1 Berkemajuan :**

Masyarakatnya menjadi lebih maju dari sebelum Visi ini dibuat, baik secara ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Demikian juga lebih tenteram, aman, dan damai.

### **5.1.2. Kampiun :**

Masyarakatnya akan selalu berusaha untuk menjadi pemenang di tengah persaingan global yang sangat kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adanya perdagangan bebas dunia, seperti : AFTA, NAFTA, APEC, dan GATT tidak akan membuat masyarakat menjadi penonton, tetapi harus ikut menjadi pemain dan / atau pelaku yang secara bertahap harus menjadi pemenang.

### **5.1.3. Relijius :**

Masyarakatnya taat menjalankan syariat agama. Beragama tentunya tidak hanya pada tataran simbolisme dan normatif semata, tetapi diusahakan untuk lebih optimal lagi mewarnai praktek-praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.

### **5.1.4. Akuntabel:**

Pelaksanaan Pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah penilaian tata kelola keuangan yang harus secepatnya bergerak dari opini wajar dengan pengecualian (WDP) menuju wajar tanpa pengecualian (WTP).

### **5.1.5. Terunggul:**

Semua kemajuan, kemenangan, kereljiusan, dan keakuntabelan bisa terus dipertahankan di masa-masa yang akan datang untuk menyongsong Tanah Laut menjadi daerah industri dan pelabuhan. Minimal beberapa sarana dan prasarana kearah itu sudah bisa disiapkan sampai dengan tahun 2018.

Penyusunan visi dimaksud tentunya dibuat setelah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025. Begitu juga dengan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2008-2013. Semua regulasi yang berlaku akan dijadikan acuan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk juga dengan memperhatikan kedudukan Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang tidak kalah pentingnya adalah kedudukan Tanah Laut sebagai bagian dari masyarakat global tentu juga memperhatikan millineum development goals (MDG's). yang lebih penting lagi adalah dengan melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan diskusi intensif dengan beberapa pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Tanah Laut, seperti : tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh remaja puteri, dan lain-lain.

Secara sosiologis visi tersebut tentu saja tidak hanya berdimensi ekonomi, namun juga mencakup dimensi sosial, budaya, hukum, pemerataan dan keadilan. Oleh karena itulah maka Tanah Laut berkemajuan, kampiun, religius, akuntable, dan terunggul (BerKaRAkTer) ditandai dengan :

1. Kokohnya ketahanan dan daya saing ekonomi masyarakat, yang berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, usaha kecil menengah (UKM), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri kecil, dan rumah tangga, perdagangan, kelautan dan perikanan. Begitu juga dengan industri berat yang pengelolaannya secara berkelanjutan (*sustainable*), juga dibarengi dengan sikap individu warga Kabupaten Tanah laut yang senantiasa merasa senang, suka, bahagia, dan bangga sebagai warga Kabupaten Tanah Laut serta cinta kepada Kabupaten Tanah Laut ini.

2. Di sisi pemerintahan juga dibarengi dengan semangat pelayanan terbaik, penuh tanggung jawab, bersikap profesional, memiliki keterampilan, baik hard skill maupun soft skill, serta mengembangkan kreasi dan inovasi yang tiada henti.
3. Penyelenggara pemerintahan dan individu mampu memainkan peran yang sinergi dalam posisi dan tanggung jawabnya masing masing.
4. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Tanah Laut berkemajuan, kampiun dan terunggul berarti membangun sumber daya manusia secara integral dan bertahap untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, penuh daya kreasi dan inovasi, berdaya saing tinggi serta memiliki motivasi tinggi untuk senantiasa menjadi yang terbaik. Bukan saja dalam tataran lokal, regional, nasional namun juga dalam tataran global.
5. Nilai - Nilai relijiusitas adalah merupakan fondasi kehidupan yang kokoh sekaligus sebagai pilar pembangunan daerah. Oleh karena itu nilai nilai relijiusitas harus diyakini, difahami, dijunjung tinggi dan dijamin serta diterapkan dalam segenap aspek kehidupan oleh setiap insan anggota masyarakat Kabupaten Tanah laut. Nilai nilai relijiusitas akan membentuk insan masyarakat Tanah Laut yang akhlakul karimah, beriman dan bertaqwa, memiliki kesalehan dan kepedulian sosial serta kecerdasan spiritual yang tinggi . Nilai nilai relijiusitas juga akan dijadikan pedoman, sumber inspirasi dan inovasi oleh masyarakat dalam segenap aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), lingkungan, keamanan dan ketertiban serta penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itulah nilai-nilai relijiusitas yang termaktub dalam visi 2013-2018 tersebut harus menjadi landasan untuk menuju **Tanah Laut berkemajuan, kampiun, relijius, akuntable, dan terunggul (BerKaRAkTer)** melalui penciptaan keseimbangan antara dunia dan akherat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta materiil dan spirituiil.

## 5.2. M I S I

Berdasarkan visi Tanah Laut **berkemajuan, kampiun, religius, akuntable, dan terunggul (BerKaRAkTer)** maka untuk pencapaiannya dapat ditetapkan misi daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.
2. Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.
3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah.
5. Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.
6. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
7. Pengembangan inovasi, tehnologi, budaya, dan kreatifitas daerah.
8. Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah.
9. Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan.
10. Pengentasan kemiskinan.

### 5.3. **Agenda Pembangunan**

Baerdasarkan Visi dan Misi pembangunan Tanah laut tahun 2013-2018 sebagai salah satu tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah laut tahun 2005-2025, maka dapat disusun agenda pembangunan sebagai berikut :

**Agenda 1** : Tertanamnya nilai nilai agama dan peningkatan pengamalan ajaran agama secara kaffah.

**Agenda 2 :** Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampiun, dan terunggul.

**Agenda 3 :** Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan unggul.

**Agenda 4 :** Membangun generasi muda dan kepemimpinan daerah yang unggul

#### **5.4. Arah Kebijakan Pembangunan**

##### **5.4.1 Agenda 1 Tertanamnya nilai nilai agama dan peningkatan pengamalan ajaran agama secara kaffah.**

Agenda 1 ini meliputi pembangunan bidang pendidikan, kesatuan bangsa, kehidupan beragama, peningkatan mental aparatur pemerintah, reformasi birokrasi dan kebudayaan, dengan sasaran :

1. Tumbuh dan berkembangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai nilai agama dalam kehidupan diri individu, keluarga, masyarakat dan aparatur.
2. Tumbuh dan berkembangnya akhlakul karimah kesalehan dan kepedulian sosial.
3. Perilaku kehidupan yang dilandasi nilai nilai agama sehingga kecerdasan spirituiil lebih meningkat lagi.
4. Tersedianya produk hukum daerah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengamalan nilai nilai keagamaan.
5. Tersedianya sarana ibadah yang representatif dan proporsional sesuai dengan pemeluknya.
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah yang akhlakul karimah dan cerdas secara spirituiil.
7. Tumbuh dan berkembangnya lembaga lembaga pendidikan keagamaan baik yang dikelola pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
8. Meningkatnya kualitas lulusan lembaga lembaga pendidikan keagamaan.

#### **5.4.2. Agenda 2 : membangun tanah laut yang berkemajuan , kampiun, dan terunggul.**

Agenda 2 ini secara sektoral meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, koperasi, UKM dan UMKM, perhubungan, penanaman modal, infrastruktur, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan.

Sedangkan secara kewilayahan maka membangun Kabupaten Tanah Laut berkemajuan, kampiun, dan terunggul dibagi kedalam 3 (tiga) koridor pembangunan ekonomi yakni :

##### **1. Koridor 1 : meliputi kecamatan Bati Bati, Tambang Ulang, Kurau, dan Bumi Makmur . Fokus sektor yang dibangun meliputi :**

###### **a. Industri, perdagangan dan jasa :**

Strategi pengembangan yang dilakukan adalah kemudahan pelayanan perijinan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM.

###### **b. Pertanian :**

Strategi yang ditempuh adalah menjaga dan / atau melakukan perlindungan terhadap lahan basah (wetland) dari proses alih fungsi lahan, pengawasan distribusi pupuk dan obat-obatan, teknologi pasca panen, efisiensi biaya produksi dan stabilisasi harga.

###### **c. Perikanan tangkap :**

Strategi yang ditempuh modernisasi alat tangkap, pemeliharaan mangrove, pengembangan industri pengolahan.

##### **2. Koridor 2 : meliputi kecamatan Pelaihari, Bajuin, Takisung dan Panyipatan . Fokus sektor yang dibangun meliputi :**

###### **a. Perkebunan :**

Strategi yang ditempuh pengembangan kawasan perkebunan, teknologi pengolahan, akses permodalan, stabilisasi harga, dan infrastruktur

b. Peternakan :

Strategi yang ditempuh adalah peningkatan populasi, pengembangan nutrisi dan pakan ternak, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengembangan pasar hewan, dan pengembangan rumah potong hewan (RPH).

c. Pariwisata :

Strategi yang ditempuh adalah perbaikan aksesibilitas, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana wisata, pengembangan wisata ekologis, promosi wisata, dan pengembangan adat setempat.

**3. Koridor 3 : meliputi kecamatan Batu Ampar, Jorong dan Kintap**

.

**Fokus Sektor yang dibangun meliputi :**

- a. Pertambangan meliputi perbaikan regulasi terkait administrasi pertanahan, penyelesaian isu lingkungan, perbaikan birokrasi, pengembangan jaringan, transportasi dan peningkatan kualitas SDM
- b. Perkebunan meliputi penyelesaian konflik lahan, kemudahan permodalan dan perbaikan aksesibilitas.
- c. Perikanan (Tangkap dan Budidaya) meliputi perbaikan sarana dan prasarana pendukung, bantuan permodalan dan peningkatan SDM.
- d. Pelabuhan meliputi pengembangan kawasan ekonomi khusus pelabuhan pertanian dan pertambangan, terintegrasi dengan jaringan transportasi darat dan sungai

**5.4.3 Agenda 3 : membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, mandiri dan unggul.**

Agenda 3 ini meliputi pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan dengan sasaran :

**Bidang Pendidikan**

1. Meningkatnya perluasan, pemerataan dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal.
2. Meningkatnya kompetensi dan jumlah guru.
3. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
4. Tuntas wajib belajar 12 tahun.
5. Meningkatnya sistem pembelajaran yang bermutu dan unggul.
6. Mengembangkan sekolah yang berkarakter dan unggul.
7. Meningkatkan budaya baca bagi pelajar dan masyarakat.
8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelulusan.
9. Tumbuh dan / atau berkembangnya Perguruan Tinggi.

#### **Bidang Kesehatan**

1. Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.
2. Menurunnya angka kematian bayi.
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
4. Menurunnya angka prevalensi gizi kurang.
5. Meningkatnya pola hidup sehat.
6. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga miskin.
7. Meningkatnya status RSUD. H. Boejasin menjadi Tipe B.
8. Meningkatkan Puskesmas Perawatan Kecamatan Kintap menjadi Rumah Sakit Tipe D.

#### **5.4.4. Agenda 4 : membangun generasi muda dan kepemimpinan daerah yang unggul**

Agenda 4 ini meliputi :

1. Pengembangan generasi muda dan kemandirian ormas.
2. Peningkatan pendidikan politik masyarakat.
3. Peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.
4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan generasi muda.
5. Peningkatan kesetaraan gender, peranan wanita dan pemberdayaan perempuan.
6. Pengembangan seni, budaya, adat dan tradisi lokal.

## 5.5. Keterkaitan visi, misi, Agenda, Tujuan dan Sasaran

Agar ada kesinambungan pola pikir dari visi sampai dengan sasaran, perlu dibuat alur pikir yang logis sehingga alur pikir ini nantinya dapat terus dihubungkan dengan strategis, arah kebijakan, program prioritas sampai dengan penetapan indikator kinerja. Perlu juga disampaikan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga tetap memperhatikan kebijakan nasional yang dalam hal ini untuk Daerah diberikan kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Agenda Tujuan dan sasaran disajikan dalam matrik berikut ini :

**Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRaKTer)**

Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
1. Peningkatan dan pengembangan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.	Agenda 1 : Tertanamnya nilai nilai agama dan peningkatan pengamalan ajaran agama secara kaffah.	Mewujudkan Masyarakat yang taat menjalankan syariat agama. Beragama tentunya tidak hanya pada tataran simbolisme dan normatif semata, tetapi diusahakan untuk lebih optimal lagi mewarnai praktek-praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat	1. Tumbuh dan berkembangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai nilai agama dalam kehidupan diri individu, keluarga, masyarakat dan aparatur.
			2. Tumbuh dan berkembangnya akhlakul karimah kesalehan dan kepedulian sosial.
			3. Perilaku kehidupan yang dilandasi nilai nilai agama sehingga kecerdasan spirituiil lebih meningkat lagi.
			4. Tersedianya produk hukum daerah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengamalan nilai nilai keagamaan.
			5. Tersedianya sarana ibadah yang representatif dan proporsional sesuai dengan pemeluknya.

<b>Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRaKTer)</b>			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
			6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah yang akhlakul karimah dan cerdas secara spirituiil.
			7. Tumbuh dan berkembangnya lembaga lembaga pendidikan keagamaan baik yang dikelola pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
			8. Meningkatnya kualitas lulusan lembaga lembaga pendidikan keagamaan.
2. Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan peningkatan pembangunan di berbagai sektor yang meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, koperasi, UKM dan UMKM, perhubungan, penanaman modal, infrastruktur, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan	Terwujudnya kemudahan pelayanan perijinan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM

**Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRaKTer)**

Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
			1. Pertanian : Terwujudnya perlindungan terhadap lahan basah (wetland) dari proses alih fungsi lahan, pengawasan distribusi pupuk dan obat-obatan, teknologi pasca panen, efisiensi biaya produksi dan stabilisasi harga
			2. Perikanan tangkap : Terwujudnya modernisasi alat tangkap, pemeliharaan mangrove, pengembangan industri pengolahan
			3. Perkebunan : Terwujudnya pengembangan kawasan perkebunan, teknologi pengolahan, akses permodalan, stabilisasi harga, dan infrastruktur

<b>Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRaKTer)</b>			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
			4. Peternakan : Terwujudnya peningkatan populasi, pengembangan nutrisi dan pakan ternak, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengembangan pasar hewan, dan pengembangan rumah potong hewan (RPH).
3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.	Agenda 3 : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan unggul.	Mewujudkan peningkatan pembangunan disektor Pendidikan dan Kesehatan	<b>Bidang Pendidikan :</b>
			1. Meningkatnya perluasan, pemerataan dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal.
			2. Meningkatnya kompetensi dan jumlah guru.
			3. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
			<b>4. Tuntas wajib belajar</b>

<b>Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)</b>			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
			<b>12 tahun.</b>
			5. Meningkatnya sistem pembelajaran yang bermutu dan unggul.
			6. Mengembangkan sekolah yang berkarakter dan unggul.
			7. Meningkatkan budaya baca bagi pelajar dan masyarakat.
			8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelulusan.
			9. Tumbuh dan / atau berkembangnya Perguruan Tinggi.
			<b>Bidang Kesehatan :</b>
			1. Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.
			2. Menurunnya angka kematian bayi.
			3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
			4. Menurunnya angka prevalensi gizi kurang.
			5. Meningkatnya pola hidup sehat.
			6. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dan

<b>Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)</b>			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
			keluarga miskin.
			7. Meningkatnya status RSU. H. Boejasin menjadi Tipe B.
			8. Meningkatkan Puskesmas Perawatan Kecamatan Kintap menjadi Rumah Sakit Tipe D.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah.	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan peningkatan dan pemenuhan infrastruktur daerah dengan memperhatikan 4 (empat) koridor pembangunan berdasarkan kewilayahan	Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.
			(2) Tersedianya infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air.

<b>Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRaKTer)</b>			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
			(3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.
			(4) Meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur.
			Terwujudnya Pelabuhan meliputi pengembangan kawasan ekonomi khusus pelabuhan pertanian dan pertambangan, terintegrasi dengan jaringan transportasi darat dan sungai
5. Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkembang, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan peningkatan aksesibilitas, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana wisata, pengembangan wisata ekologis, promosi wisata, dan pengembangan adat setempat	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan peningkatan fasilitas layanan kepariwisataan

<b>Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRaKTer)</b>			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
6. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat.	Berjalannya sistem Sasaran kerja pegawai (SKP) secara konsisten
			Menurunnya jumlah hasil temuan dari aparat pemeriksaan
			Menurunnya jumlah Aparatur yang terlibat tindak pidana korupsi
			Ditetapkannya dan diterapkannya SOP dan SPM diseluruh SKPD Lingkup Pemkab Tala secara konsisten
			Terwujudnya penilaian tata kelola keuangan yang harus secepatnya bergerak dari opini wajar dengan pengecualian (WDP) menuju wajar tanpa pengecualian (WTP).
			Peningkatan kesejahteraan PNS

<b>Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)</b>			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
7. Pengembangan inovasi, teknologi, budaya, dan kreatifitas daerah.	Agenda 4 : Membangun generasi muda dan kepemimpinan daerah yang unggul	Mewujudkan Pengembangan seni, budaya, adat dan tradisi lokal.	Terwujudnya fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengembangan inovasi, tehnolog, seni, budaya, adat dan tradisi lokal.
8. Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah.	Agenda 4 : Membangun generasi muda dan kepemimpinan daerah yang unggul	Mewujudkan pembangunan generasi muda dan kemimpinan daerah yang terintegrasi melalui berbagai sektor	Terwujudnya Pengembangan generasi muda dan kemandirian ormas.
			Terwujudnya Peningkatan pendidikan politik masyarakat.
			Terwujudnya Peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.
			Terwujudnya Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan generasi muda.
			Terwujudnya Peningkatan kesetaraan gender, peranan wanita dan pemberdayaan perempuan.

<b>Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRaKTer)</b>			
Misi	Agenda	Tujuan	Sasaran
9. Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan.	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan pembangunan Tanah Laut yang berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pengelolaan pertambangan meliputi perbaikan regulasi terkait administrasi pertanahan, penyelesaian isu lingkungan, perbaikan birokrasi.
10. Pengentasan kemiskinan.	Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampiun, dan terunggul.	Mewujudkan penurunan tingkat kemiskinan	Jumlah RTM Miskin di Tahun 2018 4,0 %

## **BAB VI**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan cara dan bagaimana untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Tujuan dan sasaran ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan sehingga dapat disusun strategi dan arah kebijakan. Sesuai dengan naskah asli visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih juga terdapat agenda pembangunan yang dalam hal ini juga dipandang sebagai rangkaian selanjutnya dari pencapaian misi pembangunan.

Dalam melakukan penyusunan strategi dan arah kebijakan sudah barang tentu mengacu pada visi dan misi yang dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai rangkaian dari penjabaran visi dan misi tersebut. Masing-masing misi akan diuraikan bagaimana cara mencapainya melalui strategi dan arah kebijakan per misi. Adapun uraian dari misi, agenda pembangunan, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan per misi adalah sebagai berikut :

Dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari BAB V sebelumnya yaitu tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga alur pikirnya harus benar-benar berkesinambungan. Adapun setiap strategi dan arah kebijakan adalah merupakan turunan dari sasaran yang telah ditetapkan dalam BAB V dokumen RPJMD ini.

Dalam penyajian strategi dan arah kebijakan ini tetap mencantumkan Visi dan Misi agar terlihat jelas bahwa suatu strategi dan arah kebijakan adalah dalam rangka mendukung misi ke berapa dalam dokumen RPJMD ini.

Adapun keterkaitan strategi dan arah kebijakan per misi dapat dilihat pada matrik berikut ini :

**VISI : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)**

**Misi I : Peningkatan dan pengembangan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Mewujudkan Masyarakat yang taat menjalankan syariat agama. Beragama tentunya tidak hanya pada tataran simbolisme dan normatif semata, tetapi diusahakan untuk lebih optimal lagi mewarnai praktek-praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat	1. Tumbuh dan berkembangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai nilai agama dalam kehidupan diri individu, keluarga, masyarakat dan aparatur.	Menyebarkan pesan-pesan keagamaan melalui berbagai media dan berbagai jenjang pendidikan	Menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang relevan dengan kondisi dan situasi terkini yang berkembang di tengah masyarakat
	2. Tumbuh dan berkembangnya akhlakul karimah kesalehan dan kepedulian sosial.	Melakukan intervensi terhadap pola hubungan berkehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku	Penerapan standar-standar yang ada dalam ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan instrumen pengawasan dan pengendalian.
	3. Perilaku kehidupan yang dilandasi nilai nilai agama sehingga kecerdasan spirituiil lebih meningkat lagi.	Melakukan intervensi terhadap pola hubungan berkehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku	Penerapan standar-standar yang ada dalam ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan instrumen pengawasan dan pengendalian.
	4. Tersedianya produk hukum daerah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengamalan nilai nilai keagamaan.	Pengkajian dan penerapan Perda yang dapat diterapkan di Kabupaten Tanah Laut	Penyusunan rancangan Perda yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaandengan tetap memperhatikan bingkai negara kesatuan republik Indonesia
	5. Tersedianya sarana ibadah yang representatif dan proporsional sesuai dengan pemeluknya.	Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan	Peningkatan alokasi dana secara proporsional untuk mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan dengan terlebih dahulu memperhatikan tingkat kebutuhan dan partisipasi serta kesadaran masyarakat secara mandiri

	6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah yang akhlakul karimah dan cerdas secara spirituuil.	Peningkatan pemahaman Aparatur pemerintah terhadap nilai-nilai keagamaan	Melakukan penyampaian pesan-pesan keagamaan secara periodik terhadap aparatur pemerintah
	7. Tumbuh dan berkembangnya lembaga lembaga pendidikan keagamaan baik yang dikelola pemerintah, swasta, maupun masyarakat.	Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga lembaga pendidikan keagamaan	Memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pemberian insentif terhadap tenaga pengajar dan penceramah dibidang keagamaan
	8. Meningkatnya kualitas lulusan lembaga lembaga pendidikan keagamaan.	Peningkatan alokasi untuk pembiayaan anggota masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan bidang keagamaan	Memberikan beasiswa bagi santri-santri yang berminat dan berbakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan keagamaannya ke lembaga pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri
Misi 2 : Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.			
Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.	Terwujudnya kemudahan pelayanan perijinan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM	Optimalisasi pelayanan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan bidang pertanian dalam arti luas	Penerapan secara kongkrit dan konsisten pelayanan perijinan satu pintu
			penerapan SPM bidang Penanaman Modal

	1. Pertanian :Terwujudnya perlindungan terhadap lahan basah (wetland) dari proses alih fungsi lahan, pengawasan distribusi pupuk dan obat obatan, tehnologi pasca panen, efisiensi biaya produksi dan stabilisasi harga	Penerapan secara konsisten regulasi terkait dengan perlindungan terhadap lahan pertanian	1. Penetapan kebijakan luas areal pertanian dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut 2. Penerapan SPM bidang Ketahanan Pangan 3. Penetapan kebijakan luas areal pertanian dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut 4. peningkatan luas tanam, produksi, pengembangan bibit unggul
			melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk dan obat obatan dan penerapan regulasi yang berlaku secara konsisten
			1. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan khususnya untuk tanaman padi dan jagung.
			mendorong industri pengolahan hasil pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lokal
			Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan
	3.Perkebunan : Terwujudnya pengembangan kawasan perkebunan, tehnologi pengolahan, akses permodalan, stabilisasi harga, dan infrastruktur	Penataan kawasan perkebunan sesuai dengan potensi dan RTRW	Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi dan RTRW
			mendorong industri penglohan hasil perkebunan untuk peningkatan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lokal
			Fasilitasi permodalan bagi masyarakat yang ingin berusaha dibidang perkebunan
			penyelesaian konflik lahan, kemudahan permodalan dan perbaikan aksesibilitas

	4. Peternakan : Terwujudnya peningkatan populasi, pengembangan nutrisi dan pakan ternak, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengembangan pasar hewan, dan pengembangan rumah potong hewan (RPH).	Pemberdayaan pelaku usaha peternakan secara kongkrit dengan memperhatikan potensi lokal	Penyediaan informasi tentang teknologi produksi yang murah dan mudah diakses
			Pengendalian populasi ternak
			Penyebarluasan informasi secara luas dan berkala tentang <b>antisipasi</b> terhadap kondisi yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha peternakan di masyarakat
			Penyediaan sarana dan prasarana produksi peternakan secara selektif dan proporsional sesuai potensi dan didasarkan pada tingkat motivasi serta etos kerja peternak
			Pemberian insentif bagi peternakan dan petugas berprestasi
			Optimalisasi dan peningkatan kapasitas Rumah Potong Hewan
	Kehutanan		
	Terwujudnya pengelolaan kehutanan yang baik dan peningkatan nilai tambah	Interpensi secara kongkrit terhadap kerusakan hutan dan lahan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Peningkatan penanganan terhadap kerusakan hutan dan lahan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
	Kelautan dan Perikanan		
	Terwujudnya pengelolaan kelautan dan perikanan yang baik dan peningkatan nilai tambah	Modernisasi alat tangkap, pemeliharaan mangrove, pengembangan industri pengolahan	Peningkatan teknologi produksi dan pengolahan
			Pemberdayaan masyarakat
<b>Misi 3 : Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.</b>			
	<b>Bidang Pendidikan :</b>		

	1. Meningkatnya perluasan, pemerataan dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas.	Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
			peningkatan pemerataan jumlah guru
	2. Meningkatnya kompetensi dan jumlah guru.	meningkatkan alokasi penerimaan guru dan kualitas	Peningkatan SDM Tenaga pengajar
	3. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	
	<b>4. Tuntas wajib belajar 12 tahun.</b>	Monev perkembangan kondisi pendidikan masyarakat secara berkala melakukan tindakan kongkrit untuk melaksanakannya	Penyediaan beasiswa bagi anak kurang mampu yang akan melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi
			Optimalisasi pendidikan luar sekolah
	5. Meningkatnya sistem pembelajaran yang bermutu dan unggul.	Melakukan pembaharuan (up dating) terhadap pengetahuan para guru	adopsi terhadap sistem pendidikan kurikulum terbaru
	6. Mengembangkan sekolah yang berkarakter dan unggul.	meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang berkualitas	Peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang berkualitas
		Meningkatkan promosi tentang budaya baca	Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang nyaman dan merata disetiap kecamatan

	8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelulusan.	meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang berkualitas	Peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang berkualitas
	9. Tumbuh dan / atau berkembangnya Perguruan Tinggi.	Meningkatkan Fasilitas dan pengembangan Poltri Tanah Laut	Fasilitasi dan pengembangan terhadap Politeknis Industri Tanah Laut
			Penerapan SPM Bidang Pendidikan
	7. Meningkatkan budaya baca bagi pelajar dan masyarakat.	meningkatkan sarana untuk menarik minat baca masyarakat	Penyediaan sumber bacaan yang mudah dan murah untuk diakses masyarakat
	<b>Bidang Kesehatan :</b>		
	1. Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.	Meningkatkan pelayanan secara merata dan berkualitas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut	Melakukan pelayanan secara merata dan berkualitas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Penerapan SPM Bidang Kesehatan
	2. Menurunnya angka kematian bayi.	Peningkatan Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga medis bidan	Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga medis bidan
			Pemberian penghargaan dan insentif bagi kecamatan dengan angka kematian bayi terendah
			Sosialisasi dan intervensi terhadap kondisi kesehatan bayi
	3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.	Peningkatan Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga medis	Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga medis
			Pemberian penghargaan dan insentif bagi kecamatan dengan angka kematian bayi terendah
			Sosialisasi dan intervensi terhadap kondisi kesehatan ibu
	4. Menurunnya angka prevalensi gizi kurang.	Meningkatkan Sosialisasi dan intervensi terhadap kondisi gizi masyarakat	Sosialisasi dan intervensi terhadap kondisi gizi masyarakat

	5. Meningkatnya pola hidup sehat.	Meningkatkan Sosialisasi dan intervensi terhadap PHBS	Sosialisasi dan intervensi terhadap PHBS
	6. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga miskin.	Adopsi secara konsisten terhadap Undang-Undang BPJS	Melaksanakan BPJS terhadap seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	7. Meningkatnya status RSU. H. Boejasin menjadi Tipe B.	Pemenuhan secara bertahap untuk memenuhi kriteria RS Tipe B	Penyediaan secara bertahap untuk memenuhi kriteria RS Tipe B
			Pembangunan Rumah Sakit Baru yang lebih representatif
	8. Meningkatkan Perawatan Puskesmas Kecamatan Kintap menjadi Rumah Sakit Tipe D.	Pemenuhan secara bertahap terhadap Puskesmas Perawatan Kecamatan Kintap sesuai dengan kriteria RS tipe D	Penyediaan secara bertahap terhadap Puskesmas Perawatan Kecamatan Kintap sesuai dengan kriteria RS tipe D
	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat di bidang keluarga berencana	Melaksanakan pelayanan bidang keluarga berencana kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku	Penerapan SPM bidang Bidang keluarga berencana
<b>Misi 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah.</b>			
	Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.	Peningkatan pembangunan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten yang mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.	Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan Pembangunan jalan dan	Pembangunan jalan dan persimpangan strategis

		persimpangan strategis	
	Tersedianya infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air dan gelombang.	Peningkatan kegiatan Normaliasi sungai	Normaliasi sungai
		Peningkatan Pengendalian pencemaran DAS di hulu	Pengendalian pencemaran DAS di hulu
		Peningkatan kegiatan untuk Mengurangi abrasi pantai	Mengurangi abrasi pantai
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi di daerah yang rawan air bersih dan fasilitas sanitasi yang buruk	Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik dan aparatur.	Penataan pasar untuk kegiatan perdagangan masyarakat	Peningkatan kenyamanan pasar dan lingkungannya
		Peningkatan kualitas dan kenyamanan gedung untuk pelayanan masyarakat dan kawasan perkantoran	Pembangunan gedung kawasan perkantoran Pemkab yang Representatif
			pengembangan kawasan ekonomi khusus pelabuhan pertanian dan pertambangan, terintegrasi dengan jaringan transportasi darat dan sungai
	Tertatanya kota keindahan kota	Optimalisasi Ruang terbuka hijau, Taman bermain publik, kebersihan kota	Penambahan ruang terbuka hijau

			Peningkatan kebersihan kota
	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat di bidang Kominfo	Melaksanakan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku	penerapan SPM kominfo
	Terbangunnya pelabuhan	Melakukan percepatan pembangunan pelabuhan	Pembangunan pelabuhan swarangan dan Tanjung Dewa dan peningkatan fasilitas perhubungan laut
	Terbangunnya Terminal Tipe B	Melakukan percepatan Fasilitas pembangunan Terminal	Peningkatan fasilitas terminal
	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat di bidang perhubungan	Melaksanakan pelayanan perhubungan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku	Penerapan SPM Bidang Perhubungan
	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat di bidang perumahan	Melaksanakan pelayanan bidang perumahan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku	penerapan SPM bidang Perumahan,

**Misi 5 : Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.**

	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan peningkatan fasilitas layanan kepariwisataan	Meningkatkan Penataan dan pembangunan kawasan pariwisata sesuai dengan RIPDA	Penataan dan pembangunan kawasan pariwisata sesuai dengan RIPDA
--	---	--	---

**Misi 6 : Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik**

	Berjalannya sistem Sasaran kerja pegawai (SKP) secara konsisten	Penerapan sistem sasaran kerja pegawai (SKP) secara konsisten	Penerapan sistem sasaran kerja pegawai (SKP) secara konsisten
--	---	---	---

	Menurunnya jumlah hasil temuan dari aparat pemeriksaan	pembinaan dan pemeriksaan internal	Optimalisasi pembinaan dan pemeriksaan internal
	Menurunnya jumlah Aparatur yang terlibat tindak pidana korupsi	pembinaan dan pemeriksanaan internal	Optimalisasi pembinaan dan pemeriksanaan internal dan advokasi secara proporsional
	Ditetapkannya dan diterapkannya SOP dan SPM diseluruh SKPD Lingkup Pemkab Tala secara konsisten	Optimalisasi dan monev penerapan SOP dan SPM diseluruh SKPD Lingkup Pemkab Tala secara konsisten	penetapan dan penerapan SOP dan SPM diseluruh SKPD Lingkup Pemkab Tala secara konsisten
	Terwujudnya penilaian tata kelola keuangan yang harus secepatnya bergerak dari opini wajar dengan pengecualian (WDP) menuju wajar tanpa pengecualian (WTP).	Meningkatkan Penanganan dan penataan aset secara konsiten sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penanganan dan penataan aset secara konsiten sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Meningkatnya kualitas LAKIP Daerah	Fasilitasi dam pembinaan penyusunan LAKIP	Peningkatan kualitas laporan kinerja instansi pemerintah
	Penurunan jumlah temuan hasil pemeriksanaan	pembinaan dan pengawasan internal	Peningkatan pembinaan dan pengawasan internal daerah
	Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	membangun sistem administrasi kepegawaian satu pintu	optimalisasi sistem pelayanan administrasi kepegawaian satu pintu
	Meningkatan pembinaan karier PNS secara transparan dan akuntabel	membuat regulasi yang mengatur mengatur promosi / mutasi jabatan dan mutasi umum	Penerapan Regulasi yang mengatur promosi / mutasi jabatan dan mutasi umum
			Peningkatan Kinerja perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatankinerja pengelolaan keuangan daerah
	Peningkatan kesejahteraan PNS	Peningkatan tambahan penghasilan atas beban kerja	Meningkatkan tambahan penghasilan atas beban kerja
	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat di bidang pencatatan sipil	Melaksanakan pelayanan bidang	Penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

		<p> pencatatan sipil kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku</p>	
			<p>Pemberdayaan pemerintahan desa</p>
	<p>Tertib administrasi layanan pengadaan barang dan jasa</p>	<p>penyatuan layanan pengadaan barang dan jasa</p>	<p>Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan</p>
	<p>Tertatanya batas wilayah antar kabupaten, kecamatan dan desa</p>	<p>Fasilitasi penyelesaian Permasalahan Tapal batas</p>	<p>Akselerasi penyelesaian Permasalahan Tapal batas</p>
	<p>Mewujudkan Penataan Hukum, Pengamanan Kebijakan Kepala Daerah serta Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.</p>	<p>fasilitasi Penataan Hukum, pengamanan kebijakan Kepala Daerah dan Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).</p>	<p>Meningkatkan Kualitas Penataan Hukum, pengamanan kebijakan Kepala Daerah dan Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).</p>
	<p>Mewujudkan Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan dan Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur yang rasional, efektif dan efisien.</p>	<p>melakukan penataan organisasi perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran.</p>	<p>Meningkatkan kualitas penataan organisasi perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran.</p>
			<p>Meningkatkan Kualitas Penataan SDM aparatur yang kompeten, proporsional dan profesional.</p>
	<p>meningkatnya ketertiban masyarakat</p>	<p>pemenuhan kebutuhan penegakan perda dan pengendalian ketertiban masyarakat</p>	<p>peningkatan fasilitasi penegakan perda dan pengendalian ketertiban masyarakat</p>
<p>Misi 7 : Pengembangan inovasi, tehnologi, budaya, dan kreatifitas daerah.</p>			
	<p>Terwujudnya fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengembangan inovasi, tehnolog, seni, budaya, adat dan tradisi lokal.</p>	<p>meningkatkan fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengembangan inovasi, tehnolog, seni,</p>	<p>Peningkatan lomba-lomba kreativitas anak-anak dan remaja</p>

		budaya, adat dan tradisi lokal.	
			Peningkatan lomba-lomba dan iven-iven lainnya terkait dengan seni, budaya, adat dan tradisi lokal.
	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat di bidang Kesenian	Melaksanakan pelayanan bidang Kesenian kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku	Penerapan SPM Bidang Kesenian
Misi 8 : Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah.			
	Terwujudnya Pengembangan generasi muda dan kemandirian ormas.	Peningkatan kegiatan kepemudaan dan ormas dengan memperhatikan aspek kemandirian dan swadaya	Fasilitasi terhadap kegiatan kepemudaan dan ormas dengan memperhatikan aspek kemandirian dan swadaya
	Terwujudnya Peningkatan pendidikan politik masyarakat.	Peningkatan Sosialisasi dan pembinaan berkaitan pendidikan politik terhadap masyarakat	Sosialisasi dan pembinaan berkaitan pendidikan politik terhadap masyarakat
	Terwujudnya Peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.		
	Terwujudnya Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan generasi muda.	Peningkatan pembinaan tenaga kerja lokal	penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan
	Terwujudnya Peningkatan kesetaraan gender, peranan wanita dan pemberdayaan perempuan.	penerapan pembangunan berwawasan gender secara proporsional	- Mendorong pengarusutamaan gender di kalangan pemerintah dan masyarakat
			- Memperkuat lembaga dan organisasi perempuan
			- Meningkatkan pelayanan publik yang berkeadilan gender.

			- Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan baik di sektor publik maupun domestik.
	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat di bidang perempuan dan anak korban kekerasan	Melaksanakan pelayanan bidang perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku	Penerapan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
<b>Misi 9 : Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan.</b>			
	Terwujudnya pengelolaan pertambangan meliputi perbaikan regulasi terkait administrasi pertanahan, penyelesaian isu lingkungan, perbaikan birokrasi.	Penerapan Strategi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara bertahap sesuai dengan urgensi.	Pelaksanaan kebijakan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara bertahap sesuai dengan urgensi
			Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup
			Pengelolaan dan pembinaan kegiatan pertambangan secara tepat dan terpadu
<b>Misi 10 : Pengentasan kemiskinan</b>			
	Jumlah RTM Miskin di Tahun 2018 4 %	Penanganan masyarakat miskin sesuai dengan klusternya dengan melibatkan berbagai sektor	Peningkatan Penanganan masyarakat miskin sesuai dengan klusternya dengan melibatkan berbagai sektor
	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat di bidang Sosial	Melaksanakan pelayanan bidang Sosial kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku	penerapan SPM Bidang Bidang Sosial



## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut perlu dituangkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan arah kebijakan pembangunan yang dipilih dengan target indikator kinerja beserta program unggulan menurut urusan. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam RPJMD ini hanya yang bersifat prioritas, sementara untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Rencana Strategis(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Namun demikian, untuk landasan pelaksanaannya agar terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMD dengan Renstra SKPD, maka program yang terkait penyelenggaraan SPM maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Bab VIII Program Pembangunan Daerah yang disertai dengan target capaian program untuk 5 (lima) tahun. Penjelasan kebijakan umum dan program unggulan berdasarkan misi pembangunan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **7.1. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN**

Kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan untuk :

- a) Melaksanakan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.
- b) Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
- c) Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
- d) Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.

- e) Mengedapkan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
- f) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environment, MDG's dan MP3EI) , pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), pendampingan program-program pemerintah pusat,
- g) Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan,

## **7.2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Program unggulan sebagai prioritas pembangunan merupakan penjabaran strategis dari Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Secara garis besar, untuk melaksanakan Visi dan Misi, maka disusun program unggulan yang dikelompokkan berdasarkan Isue - Isue strategis menurut misi.

Adapun matrik Kebijakan Umum dan program prioritas pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1 dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2013-2018 ini.



**BAB VIII**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI**  
**KEBUTUHAN PENDANAAN**

Dalam pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah barang tentu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Masing-masing visi sudah diuraikan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan dan program, prioritas seperti yang telah diuraikan pada bab-bab berikutnya. Pada bagian ini disajikan program-program yang akan dijalankan dalam bentuk matrik per misi.

Setiap misi akan diwujudkan melalui pelaksanaan program-program yang disertai dengan kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan program tersebut. Memang pada kenyataannya program-program antar misi juga saling keterkaitan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga hal ini tidak dapat diterjemahkan secara kaku, namun bagian ini adalah upaya untuk memetakan bahwa misi-misi yang telah ditetapkan akan diimplementasikan melalui program tertentu dengan beberapa SKPD menjadi *leading sector* untuk mewujudkannya.

Pada beberapa bagian kolom yang masih kosong, hal tersebut adalah karena satu program memiliki lebih dari satu outcome dan kesulitan teknis lainnya. RPJMD merupakan acuan bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD sehingga indikasi Rencana Program Prioritas disertai kebutuhan pendanaan ini secara lebih rinci (ouput dan outcome) akan terlihat pada Renstra SKPD. Satu program dapat berhubungan dengan satu sasaran dan bisa jadi beberapa program berhubungan dengan satu capaian sasaran demikian sebaliknya. Intinya adalah kesemua program ini adalah dalam rangka mewujudkan sasaran kinerja yang ada pada BAB IX Dokumen ini.

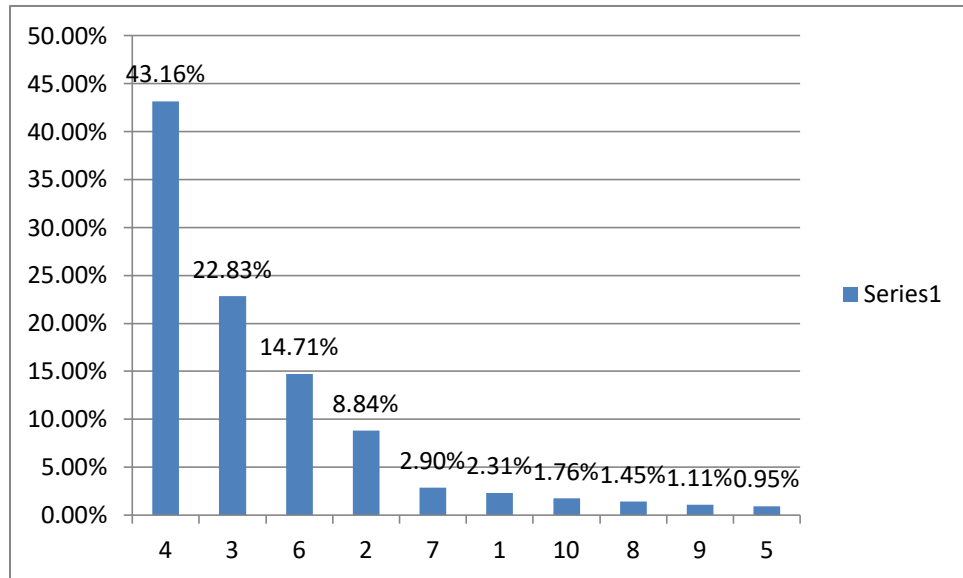
Secara umum rekapitulasi kebutuhan pendanaan per tahun rencana untuk pencapaian per misi dapat disajikan pada table berikut ini :

Tabel 8.1 Rekapitulasi kebutuhan pendanaan per tahun untuk pencapaian misi

No.	Misi	Tahun					Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Peningkatan dan pengembangan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.	20,248,349,000	16,673,400,000	17,550,340,000	19,702,824,000	20,696,206,400	94,871,119,400
2	Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.	57,696,507,850	71,598,474,035	73,205,176,606	79,366,486,106	81,469,634,495	363,336,279,091
3	Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.	133,854,215,436	156,305,198,097	183,505,863,408	213,312,061,405	251,487,156,496	938,464,494,842
4	Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah.	296,912,156,590	369,028,511,250	365,067,161,580	364,786,067,715	378,344,822,666	1,774,138,719,801
5	Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.	8,410,800,000	7,785,600,000	8,099,600,000	7,404,600,000	7,404,600,000	39,105,200,000
6	Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	105,891,226,750	124,640,037,271	116,096,996,883	123,585,269,537	134,722,904,438	604,936,434,878

No.	Misi	Tahun					Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
7	Pengembangan inovasi, teknologi, budaya, dan kreatifitas daerah.	6,337,343,500	7,087,000,000	72,420,000,000	16,610,000,000	16,610,000,000	119,064,343,500
8	Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah.	14,969,276,575	12,519,470,250	10,293,978,000	10,726,436,500	10,927,066,000	59,436,227,325
9	Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan.	7,543,330,670	9,255,536,180	8,805,550,090	9,618,418,210	10,230,401,912	45,453,237,062
10	Pengentasan kemiskinan	13,793,272,800	12,489,777,000	13,518,651,000	15,794,295,000	16,640,402,000	72,236,397,800
	Jumlah	665,656,479,171	787,383,004,083	868,563,317,566	860,906,458,472	928,533,194,407	4,111,042,453,700

Secara grafis gambaran rekapitulasi secara berurutan berdasarkan prosentase alokasi dana secara total dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Dari gambaran di atas terlihat bahwa misi 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah memperoleh alokasi dana terbesar dengan prosentase 43,16 persen disusul untuk misi 3 : Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan dan diurutan ke 3 (tiga) untuk misi 6 yaitu Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun ke depan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang menjadi prioritas. Hal ini tidak bisa diartikan secara terpisah dengan pencapaian misi yang lain, karena dengan infrastruktur, pendikan, dan kesehatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan disektor pertanian dalam arti luas, keparwisataan, pengentasan kemiskinan, dan misi lainnya akan juga ikut terfasilitasi dengan baik.

Adapun Secara rinci indikasi rencana program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2018 dapat dilihat pada bagian lampiran 2 dokumen RPJMD ini.

## BAB IX

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator ini telah melalui serangkaian kegiatan untuk memperoleh saran masukan dan kotreksi. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah forum konsultasi publik, rapat dengar pendapat dengan DPRD untuk memperoleh saran dan masukan, dan yang terakhir adalah Musrenbang RPJMD.

Indikator kinerja daerah ini terdiri dari indikator makro yang dicapai melalui akumulasi pelaksanaan seluruh misi dan program-program prioritas. Indikator lainnya adalah yang lebih rinci yaitu capaian indikator per misi. Adapun Penetapan Indikator Makro Kinerja Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 9.1. Tabel Penetapan Indikator Makro Kinerja Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018**

No.	Indikator	Standar Ideal	Kondisi sekarang	Target Capaian Tahun 2018
1	Pertumbuhan ekonomi	7,5 % – 9 %	6,2	< 7,0
2	Pendapatan Per Kapita	10,6 jt(2015) Provinsi	15 Jt	26 Jt
3	Laju Inflasi	4,5 % (nasional)	-	4%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5-6%	4,2	4,2-3,8%

No.	Indikator	Standar Ideal	Kondisi sekarang	Target Capaian Tahun 2018
5	Tingkat Kemiskinan	8-10% (nasional)	5,2%	< 4,0 %
6	Indeks Pembangunan Manusia		72,00	75 – 80
7	Pertumbuhan penduduk	2,01	2,5	2.00%

Pada penetapan indicator per misi (lampiran 3) masih terlihat adanya bagian-bagian yang masih kosong. Hal ini bukan berarti menghilangkan makna dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Keterbatasan data merupakan kendala yang masih dihadapi oleh tim penyusun. Hal yang paling penting disini adalah adanya sasaran akhir periode di tahun 2018 terhadap indikator tersebut. Sepanjang pelaksanaan RPJMD lima tahun ke depan ketersediaan data akan terus diupayakan secara sungguh-sungguh.

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2013-2018 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 diuraikan pada Lampiran 3 dokumen RPJMD ini :

**10.1 Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Tanah Laut, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Tanah Laut dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Tanah Laut dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Tanah Laut;
- 3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;
- 4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018;
- 5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut;

- 6) Penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
- 7) RKPD Kabupaten Tanah Laut harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- 8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Tanah Laut merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- 9) Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- 10) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil;
- 11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 sebagai berikut:
  - a) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
  - b) Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- c) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
  - d) Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c);
  - e) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

## **10.2 Pedoman Transisi**

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Tanah Laut untuk masa bakti 2018-2023, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

BUPATI TANAH LAUT

H. BAMBANG ALAMSYAH

**Visi : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTAB**

Misi	Agenda

1. Peningkatan dan pengembangan nilai nilai agama Agenda 1 : Tertanamnya nilai nilai agama dan dalam praktek bernegara, berpemerintahan, dan peningkatan pengamalan ajaran agama secara kaffah. bermasyarakat.

2. Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, berkemajuan, kumpiun, dan terunggul. kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.

3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan Agenda 3 : Membangun sumber daya manusia yang pelayanan pendidikan dan kesehatan. berkualitas, mandiri, dan unggul.

4. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang infrastruktur wilayah. berkemajuan, kampuun, dan terunggul.

5. Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan berkemajuan, kampiun, dan terunggul. yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.

6. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. berkemajuan, kampiun, dan terunggul.

7. Pengembangan inovasi, teknologi, budaya, dan Agenda 4 : Membangun generasi muda dan kreatifitas daerah. kepemimpinan daerah yang unggul

8. Peningkatan pembinaan generasi muda dan Agenda 4 : Membangun generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah. kepemimpinan daerah yang unggul

9. Peningkatan penyelamatan dan kelestarian Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang lingkungan. berkemajuan, kampuun, dan terunggul.

10. Pengentasan kemiskinan. Agenda 2 : Membangun Tanah Laut yang berkemajuan, kampuun, dan terunggul.


LE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)	
Tujuan	Sasaran

Mewujudkan Masyarakat yang taat menjalankan syariat agama. Beragama tentunya tidak hanya pada tataran simbolisme dan normatif semata, tetapi diusahakan untuk lebih optimal lagi mewarnai praktek-praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat

1. Tumbuh dan berkembangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai nilai agama dalam kehidupan diri individu, keluarga, masyarakat dan aparaturnya.

2. Tumbuh dan berkembangnya akhlakul karimah kesalehan dan kenedulian sosial.

3. Perilaku kehidupan yang dilandasi nilai nilai agama sehingga kecerdasan spirituuil lebih meningkat lagi.

4. Tersedianya produk hukum daerah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengamalan nilai nilai keagamaan

5. Tersedianya sarana ibadah yang representatif dan proporsional sesuai dengan pemeluknya.

6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparaturnya pemerintah yang akhlakul karimah dan cerdas secara spirituuil

7. Tumbuh dan berkembangnya lembaga lembaga pendidikan keagamaan baik yang dikelola pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Terwujudnya pembangunan gedung BKPRMI yang representatif

8. Meningkatnya kualitas lulusan lembaga lembaga pendidikan keagamaan.

--

<p>Mewujudkan peningkatan pembangunan di berbagai sektor yang meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, koperasi, UKM dan UMKM, perhubungan, penanaman modal, infrastruktur, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan</p>	<p>Terwujudnya kemudahan pelayanan perijinan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM</p>
	<p>1. Pertanian : Terwujudnya perlindungan terhadap lahan basah (wetland) dari proses alih fungsi lahan, pengawasan distribusi pupuk dan obat-obatan, teknologi pasca panen, efisiensi biaya produksi dan stabilisasi harga</p>
	<p>2. Perikanan tangkap : Terwujudnya modernisasi alat tangkap, pemeliharaan mangrove, pengembangan industri pengolahan</p>
	<p>3. Perkebunan : Terwujudnya pengembangan kawasan perkebunan, teknologi pengolahan, akses permodalan, stabilisasi harga, dan infrastruktur</p>
	<p>4. Peternakan : Terwujudnya peningkatan populasi, pengembangan nutrisi dan pakan ternak, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengembangan pasar hewan, dan pengembangan rumah potong hewan (RPH).</p>
<p>Mewujudkan peningkatan pembangunan di sektor Pendidikan dan Kesehatan</p>	<p><b>Bidang Pendidikan :</b></p>

	1. Meningkatnya perluasan, pemerataan dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal.
	2. Meningkatnya kompetensi dan jumlah guru.
	3. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
	<b>4. Tuntas wajib belajar 12 tahun.</b>
	5. Meningkatnya sistem pembelajaran yang bermutu dan unggul.
	6. Mengembangkan sekolah yang berkarakter dan unggul.
	7. Meningkatkan budaya baca bagi pelajar dan masyarakat.
	8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelulusan.
	9. Tumbuh dan / atau berkembangnya Perguruan Tinggi.
	<b>Bidang Kesehatan :</b>
	1. Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.
	2. Menurunnya angka kematian bayi.
	3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
	4. Menurunnya angka prevalensi gizi kurang.
	5. Meningkatnya pola hidup sehat.
	6. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga miskin.
	7. Meningkatnya status RSU. H. Boejasin menjadi Tipe B.
	8. Meningkatkan Puskesmas Perawatan Kecamatan Kintap menjadi Rumah Sakit Tipe D.
Mewujudkan peningkatan dan pemenuhan infrastruktur daerah dengan memperhatikan 4 (empat) koridor pembangunan berdasarkan kewilayahan	Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.

Terwujudnya pembangunan Rumah Sakit Baru yang Representatif

	(2) Tersedianya infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air.
	(3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.
	(4) Meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur.
	Terwujudnya Pelabuhan meliputi pengembangan kawasan ekonomi khusus pelabuhan pertanian dan pertambangan, terintegrasi dengan jaringan transportasi darat dan sungai
Mewujudkan peningkatan aksesibilitas, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana wisata, pengembangan wisata ekologis, promosi wisata, dan pengembangan adat setempat	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan peningkatan fasilitas layanan kepariwisataan
Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat.	Terwujudnya penilaian tata kelola keuangan yang harus secepatnya bergerak dari opini wajar dengan pengecualian (WDP) menuju wajar tanpa pengecualian (WTP).
Mewujudkan Pengembangan seni, budaya, adat dan tradisi lokal.	Terwujudnya fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan seni, budaya, adat dan tradisi lokal.

Terwujudnya pembangunan gedung kawasan perkantoran Pemkab yang Representatif

Mewujudkan pembangunan generasi muda dan kepemimpinan daerah yang terintegrasi melalui berbagai sektor	Terwujudnya Pengembangan generasi muda dan kemandirian ormas.
	Terwujudnya Peningkatan pendidikan politik masyarakat.
	Terwujudnya Peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.
	Terwujudnya Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan generasi muda.
	Terwujudnya Peningkatan kesetaraan gender, peranan wanita dan pemberdayaan perempuan.
Mewujudkan pembangunan Tanah Laut yang berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pengelolaan pertambangan meliputi perbaikan regulasi terkait administrasi pertanahan, penyelesaian isu lingkungan, perbaikan birokrasi.
Mewujudkan penurunan tingkat kemiskinan	Jumlah RTM Miskin di Tahun 2018 4%

**VISI : TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIJIUS, AKUNTABLE, DAN TERUNGGUL (BerKaRAkTer)**

**Misi I : Peningkatan dan pengembangan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Masyarakat yang taat menjalankan syariat agama. Beragama tentunya tidak hanya pada tataran simbolisme dan normatif semata, tetapi diusahakan untuk lebih optimal lagi mewarnai praktek-praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat	1. Tumbuh dan berkembangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai nilai agama dalam kehidupan diri individu, keluarga, masyarakat dan aparaturnya.	Menyebarkan pesan-pesan keagamaan melalui berbagai media dan berbagai jenjang pendidikan	Menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang relevan dengan kondisi dan situasi terkini yang berkembang di tengah masyarakat
	2. Tumbuh dan berkembangnya akhlakul karimah kesalehan dan kepedulian sosial.	Melakukan intervensi terhadap pola hubungan berkehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku	Penerapan standar-standar yang ada dalam ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan instrumen pengawasan dan pengendalian.
	3. Perilaku kehidupan yang dilandasi nilai nilai agama sehingga kecerdasan spirituil lebih meningkat lagi.	Melakukan intervensi terhadap pola hubungan berkehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku	Penerapan standar-standar yang ada dalam ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan instrumen pengawasan dan pengendalian.
	4. Tersedianya produk hukum daerah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengamalan nilai nilai keagamaan.	Pengkajian dan penerapan Perda yang dapat diterapkan di Kabupaten Tanah Laut	Penyusunan rancangan Perda yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dengan tetap memperhatikan bingkai negara kesatuan republik Indonesia

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	5. Tersedianya sarana ibadah yang representatif dan proporsional sesuai dengan pemeluknya.	Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan	Peningkatan alokasi dana secara proporsional untuk mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan dengan terlebih dahulu memperhatikan tingkat kebutuhan dan partisipasi serta kesadaran masyarakat secara mandiri
	6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah yang akhlakul karimah dan cerdas secara spirituil.	Peningkatan pemahaman Aparatur pemerintah terhadap nilai-nilai keagamaan	Melakukan penyampaian pesan-pesan keagamaan secara periodik terhadap aparatur pemerintah
	7. Tumbuh dan berkembangnya lembaga lembaga pendidikan keagamaan baik yang dikelola pemerintah, swasta, maupun masyarakat.	Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan	Memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pemberian insentif terhadap tenaga pengajar dan penceramah dibidang keagamaan
	8. Meningkatnya kualitas lulusan lembaga lembaga pendidikan keagamaan.	Peningkatan alokasi untuk pembiayaan anggota masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan bidang keagamaan	Memberikan beasiswa bagi santri-santri yang berminat dan berbakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan keagamaannya ke lembaga pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri
Misi 2 : Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.			
Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.	Terwujudnya kemudahan pelayanan perijinan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM	Optimalisasi pelayanan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan bidang pertanian dalam arti luas	Penerapan secara kongkrit dan konsisten pelayanan perijinan satu pintu

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			penerapan SPM bidang Penanaman Modal
	1. Pertanian : Terwujudnya perlindungan terhadap lahan basah (wetland) dari proses alih fungsi lahan, pengawasan distribusi pupuk dan obat obatan, teknologi pasca panen, efisiensi biaya produksi dan stabilisasi harga	Penerapan secara konsisten regulasi terkait dengan perlindungan terhadap lahan pertanian	1. Penetapan kebijakan luas areal pertanian dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut 2. Penerapan SPM bidang Ketahanan Pangan 3. Penetapan kebijakan luas areal pertanian dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut 4. peningkatan luas tanam, produksi, pengembangan bibit unggul
			melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk dan obat obatan dan penerapan regulasi yang berlaku secara konsisten
			1. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan khususnya untuk tanaman padi dan jagung.
			mendorong industri pengolahan hasil pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lokal
			Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan
	3.Perkebunan : Terwujudnya pengembangan kawasan perkebunan, teknologi pengolahan, akses permodalan, stabilisasi harga, dan infrastruktur	Penataan kawasan perkebunan sesuai dengan potensi dan RTRW	Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi dan RTRW

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			mendorong industri pengolahan hasil perkebunan untuk peningkatan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lokal
			Fasilitasi permodalan bagi masyarakat yang ingin berusaha dibidang perkebunan
			penyelesaian konflik lahan, kemudahan permodalan dan perbaikan aksesibilitas
	4. Peternakan : Terwujudnya peningkatan populasi, pengembangan nutrisi dan pakan ternak, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengembangan pasar hewan, dan pengembangan rumah potong hewan (RPH).	Pemberdayaan pelaku usaha peternakan secara kongkrit dengan memperhatikan potensi lokal	Penyediaan informasi tentang teknologi produksi yang murah dan mudah diakses
			Pengendalian populasi ternak
			Penyebarluasan informasi secara luas dan berkala tentang <b>antisipasi</b> terhadap kondisi yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha peternakan di masyarakat
			Penyediaan sarana dan prasarana produksi peternakan secara selektif dan proporsional sesuai potensi dan didasarkan pada tingkat motivasi serta etos kerja peternak
			Pemberian insentif bagi peternakan dan petugas berprestasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Optimalisasi dan peningkatan kapasitas Rumah Potong Hewan
	Kehutanan		
	Terwujudnya pengelolaan kehutanan yang baik dan peningkatan nilai tambah	Interpensi secara kongkrit terhadap kerusakan hutan dan lahan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Peningkatan penanganan terhadap kerusakan hutan dan lahan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
	Kelautan dan Perikanan		
	Terwujudnya pengelolaan kelautan dan perikanan yang baik dan peningkatan nilai tambah	Modernisasi alat tangkap, pemeliharaan mangrove, pengembangan industri pengolahan	Peningkatan teknologi produksi dan pengolahan
			Pemberdayaan masyarakat
<b>Misi 3 : Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.</b>			
	<b>Bidang Pendidikan :</b>		
Mewujudkan peningkatan pembangunan disektor Pendidikan dan Kesehatan	1. Meningkatnya perluasan, pemerataan dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas.	Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
			peningkatan pemerataan jumlah guru
	2. Meningkatnya kompetensi dan jumlah guru.	meningkatkan alokasi penerimaan guru dan kualitas	Peningkatan SDM Tenaga pengajar
	3. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	
	<b>4. Tuntas wajib belajar 12 tahun.</b>	Monev perkembangan kondisi pendidikan masyarakat secara berkala melakukan tindakan kongkrit untuk melaksanakannya	Penyediaan beasiswa bagi anak kurang mampu yang akan melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi
			Optimalisasi pendidikan luar sekolah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	5. Meningkatnya sistem pembelajaran yang bermutu dan unggul.	Melakukan pembaharuan (up dating) terhadap pengetahuan para guru	adopsi terhadap sistem pendidikan kurikulum terbaru
	6. Mengembangkan sekolah yang berkarakter dan unggul.	meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang berkualitas	Peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang berkualitas
		Meningkatkan promosi tentang budaya baca	Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang nyaman dan merata disetiap kecamatan
	8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelulusan.	meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang berkualitas	Peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang berkualitas
	9. Tumbuh dan / atau berkembangnya Perguruan Tinggi.	Meningkatkan Fasilitas dan mengembangkan Poltri Tanah Laut	Fasilitasi dan pengembangan terhadap Politeknis Industri Tanah Laut
			Penerapan SPM Bidang Pendidikan
	7. Meningkatkan budaya baca bagi pelajar dan masyarakat.	meningkatkan sarana untuk menarik minat baca masyarakat	Penyediaan sumber bacaan yang mudah dan murah untuk diakses masyarakat
	<b>Bidang Kesehatan :</b>		
	1. Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.	Meningkatkan pelayanan secara merata dan berkualitas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut	Melakukan pelayanan secara merata dan berkualitas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Penerapan SPM Bidang Kesehatan
	2. Menurunnya angka kematian bayi.	Peningkatan Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga medis bidan	Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga medis bidan
			Pemberian penghargaan dan insentif bagi kecamatan dengan angka kematian bayi terendah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Sosialisasi dan intervensi terhadap kondisi kesehatan bayi
	3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.	Peningkatan Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga medis	Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga medis
			Pemberian penghargaan dan insentif bagi kecamatan dengan angka kematian bayi terendah
			Sosialisasi dan intervensi terhadap kondisi kesehatan ibu
	4. Menurunnya angka prevalensi gizi kurang.	Meningkatkan Sosialisasi dan intervensi terhadap kondisi gizi masyarakat	Sosialisasi dan intervensi terhadap kondisi gizi masyarakat
	5. Meningkatnya pola hidup sehat.	Meningkatkan Sosialisasi dan intervensi terhadap PHBS	Sosialisasi dan intervensi terhadap PHBS
	6. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga miskin.	Adopsi secara konsisten terhadap Undang-Undang BPJS	Melaksanakan BPJS terhadap seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	7. Meningkatnya status RSUD. H. Boejasin menjadi Tipe B.	Pemenuhan secara bertahap untuk memenuhi kriteria RS Tipe B	Penyediaan secara bertahap untuk memenuhi kriteria RS Tipe B
			Pembangunan Rumah Sakit Baru yang lebih representatif
	8. Meningkatkan Puskesmas Perawatan Kecamatan Kintap menjadi Rumah Sakit Tipe D.	Pemenuhan secara bertahap terhadap Puskesmas Perawatan Kecamatan Kintap sesuai dengan kriteria RS tipe D	Penyediaan secara bertahap terhadap Puskesmas Perawatan Kecamatan Kintap sesuai dengan kriteria RS tipe D
			Penerapan SPM bidang Bidang keluarga berencana
<b>Misi 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infastruktur wilayah.</b>			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan peningkatan dan pemenuhan infrastruktur daerah dengan memperhatikan 4 (empat) koridor pembangunan berdasarkan kewilayahan	Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.	Peningkatan pembangunan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten yang mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.	Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan Pembangunan jalan dan persimpangan strategis	Pembangunan jalan dan persimpangan strategis
	Tersedianya infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan	Peningkatan kegiatan Normalisasi sungai	Normalisasi sungai
		Peningkatan Pengendalian pencemaran DAS di hulu	Pengendalian pencemaran DAS di hulu
		Peningkatan kegiatan untuk Mengurangi abrasi pantai	Mengurangi abrasi pantai
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi di daerah yang rawan air bersih dan fasilitas sanitasi yang buruk	Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik dan aparatur.	Penataan pasar untuk kegiatan perdagangan masyarakat	Peningkatan kenyamanan pasar dan lingkungannya
		Peningkatan kualitas dan kenyamanan gedung untuk pelayanan masyarakat dan kawasan perkantoran	Pembangunan gedung kawasan perkantoran Pemkab yang Representatif
			pengembangan kawasan ekonomi khusus pelabuhan pertanian dan pertambangan, terintegrasi dengan jaringan transportasi darat dan sungai

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Tertatanya kota keindahan kota	Optimalisasi Ruang terbuka hijau, Taman bermain publik, kebersihan kota	Penambahan ruang terbuka hijau
			Peningkatan kebersihan kota
			penerapan SPM kominfo
	Terbangunnya pelabuhan		Pembangunan pelabuhan swarangan dan Tanjung Dewa dan peningkatan fasilitas perhubungan laut
			Peningkatan fasilitas terminal
			Penerapan SPM Bidang Perhubungan
			penerapan SPM bidang Perumahan,
<b>Misi 5 : Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.</b>			
Mewujudkan peningkatan aksesibilitas, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana wisata, pengembangan wisata ekologis, promosi wisata, dan pengembangan adat setempat	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan peningkatan fasilitas layanan kepariwisataan	Meningkatkan Penataan dan pembangunan kawasan pariwisata sesuai dengan RIPDA	Penataan dan pembangunan kawasan pariwisata sesuai dengan RIPDA
<b>Misi 6 : Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik</b>			
Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat.	Berjalannya sistem Sasaran kerja pegawai (SKP) secara konsisten	Penerapan sistem sasaran kerja pegawai (SKP) secara konsisten	Penerapan sistem sasaran kerja pegawai (SKP) secara konsisten
	Menurunnya jumlah hasil temuan dari aparat pemeriksaan	pembinaan dan pemeriksaan internal	Optimalisasi pembinaan dan pemeriksaan internal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Menurunnya jumlah Aparatur yang terlibat tindak pidana korupsi	pembinaan dan pemeriksanaan internal	Optimalisasi pembinaan dan pemeriksanaan internal dan advokasi secara proporsional
	Ditetapkannya dan diterapkannya SOP dan SPM diseluruh SKPD Lingkup Pemkab Tala secara konsisten	Optimalisasi dan monev penerapan SOP dan SPM diseluruh SKPD Lingkup Pemkab Tala secara konsisten	penetapan dan penerapan SOP dan SPM diseluruh SKPD Lingkup Pemkab Tala secara konsisten
	Terwujudnya penilaian tata kelola keuangan yang harus secepatnya bergerak dari opini wajar dengan pengecualian (WDP) menuju wajar tanpa pengecualian (WTP).	Meningkatkan Penanganan dan penataan aset secara konsiten sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penanganan dan penataan aset secara konsiten sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Meningkatnya kualitas LAKIP Daerah	Fasilitasi dam pembinaan penyusunan LAKIP	Peningkatan kualitas laporan kinerja instansi pemerintah
	Penurunan jumlah temuan hasil pemeriksanaan	pembinaan dan pengawasan internal	Peningkatan pembinaan dan pengawasan internal daerah
	Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	membangun sistem administrasi kepegawaian satu pintu	optimalisasi sistem pelayanan administrasi kepegawaian satu pintu
	Meningkatkan pembinaan karier PNS secara transparan dan akuntabel	membuat regulasi yang mengatur mengatur promosi / mutasi jabatan dan mutasi umum	Penerapan Regulasi yang mengatur promosi / mutasi jabatan dan mutasi umum
			Peningkatan Kinerja perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatankinerja pengelolaan keuangan daerah
	Peningkatan kesejahteraan PNS	Peningkatan tambahan penghasilan atas beban kerja	Meningkatkan tambahan penghasilan atas beban kerja
		Peningkatan pelayanan masyarakat	Penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
			Pemberdayaan pemerintahan desa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Tertib administrasi layanan pengadaan barang dan jasa	penyatuan layanan pengadaan barang dan jasa	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
	Tertatanya batas wilayah antar kabupaten, kecamatan dan desa	Fasilitasi penyelesaian Permasalahan Tapal batas	Akselerasi penyelesaian Permasalahan Tapal batas
	Mewujudkan Penataan Hukum, Pengamanan Kebijakan Kepala Daerah serta Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	fasilitasi Penataan Hukum, pengamanan kebijakan Kepala Daerah dan Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).	Meningkatkan Kualitas Penataan Hukum, pengamanan kebijakan Kepala Daerah dan Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).
	Mewujudkan Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan dan Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur yang rasional, efektif dan efisien.	melakukan penataan organisasi perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran.	Meningkatkan kualitas penataan organisasi perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran.
			Meningkatkan Kualitas Penataan SDM aparatur yang kompeten, proporsional dan profesional.
	meningkatkan ketertiban masyarakat	memenuhi kebutuhan penegakan perda dan pengendalian ketertiban masyarakat	peningkatan fasilitasi penegakan perda dan pengendalian ketertiban masyarakat
<b>Misi 7 : Pengembangan inovasi, teknologi, budaya, dan kreatifitas daerah.</b>			
	Terwujudnya fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengembangan inovasi, tehnolog, seni, budaya, adat dan tradisi lokal.	meningkatkan fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengembangan inovasi, tehnolog, seni, budaya, adat dan tradisi lokal.	Peningkatan lomba-lomba kreativitas anak-anak dan remaja

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan lomba-lomba dan iven-iven lainnya terkait dengan seni, budaya, adat dan tradisi lokal.
			Penerapan SPM Bidang Kesenian
Misi 8 : Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah.			
Mewujudkan pembangunan generasi muda dan kemimpinan daerah yang terintegrasi melalui berbagai sektor	Terwujudnya Pengembangan generasi muda dan kemandirian ormas.	Peningkatan kegiatan kepemudaan dan ormas dengan memperhatikan aspek kemandirian dan swadaya	Fasilitasi terhadap kegiatan kepemudaan dan ormas dengan memperhatikan aspek kemandirian dan swadaya
	Terwujudnya Peningkatan pendidikan politik masyarakat.	Peningkatan Sosialisasi dan pembinaan berkaitan pendidikan politik terhadap masyarakat	Sosialisasi dan pembinaan berkaitan pendidikan politik terhadap masyarakat
	Terwujudnya Peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.		
	Terwujudnya Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan generasi muda.	Peningkatan pembinaan tenaga kerja lokal	penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan
	Terwujudnya Peningkatan kesetaraan gender, peranan wanita dan pemberdayaan perempuan.	penerapan pembangunan berwawasan gender secara proporsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengarusutamaan gender di kalangan pemerintah dan masyarakat</li> <li>- Memperkuat lembaga dan organisasi perempuan</li> <li>- Meningkatkan pelayanan publik yang berkeadilan gender.</li> <li>- Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan baik di sektor publik maupun domestik.</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penerapan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
<b>Misi 9 : Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan.</b>			
Mewujudkan pembangunan Tanah Laut yang berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pengelolaan pertambangan meliputi perbaikan regulasi terkait administrasi pertanahan, penyelesaian isu lingkungan, perbaikan birokrasi.	Penerapan Strategi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara bertahap sesuai dengan urgensi	Pelaksanaan kebijakan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara bertahap sesuai dengan urgensi
			<b>Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup</b>
			Pengelolaan dan pembinaan kegiatan pertambangan secara tepat dan terpadu
<b>Misi 10 : Pengentasan kemiskinan</b>			
Mewujudkan penurunan tingkat kemiskinan	Jumlah RTM Miskin di Tahun 2018 4 %	Penanganan masyarakat miskin sesuai dengan klusternya dengan melibatkan berbagai sektor	Peningkatan Penanganan masyarakat miskin sesuai dengan klusternya dengan melibatkan berbagai sektor
			penerapan SPM Bidang Bidang Sosial

Misi 8 : Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah.

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya Pengembangan generasi muda dan kemandirian ormas.	Peningkatan kegiatan kepemudaan dan ormas dengan memperhatikan aspek kemandirian dan swadaya	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	.....?	75%	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Tenaga kerja
	Terwujudnya Peningkatan pendidikan politik masyarakat.	Peningkatan Sosialisasi dan pembinaan berkaitan pendidikan politik terhadap masyarakat	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	.....?	60%		
	Terwujudnya Peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	.....?	60%	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Tenaga kerja
	Terwujudnya Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan generasi muda.	Peningkatan pembinaan tenaga kerja lokal	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	.....?	70%		
			Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	.....?	50%		
	Terwujudnya Peningkatan kesetaraan gender, peranan wanita dan pemberdayaan perempuan.	penerapan pembangunan berwawasan gender secara proporsional	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	.....?	50%	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewira Usahaan dan Kecakapan Pemuda	Tenaga kerja
			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	.....?	45%		
			Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	.....?	50%		
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Tenaga kerja
			Adanya dasar hukum pengarusutamaan gender	SK Tim Pokja PUG dan Focal Point	0		
			Jumlah Lembaga dan Organisasi perempuan				

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Perda PUG Kabupaten, POKJA PUG dan Focal Point	Perda PUG Kabupaten, POKJA PUG dan Focal Point		
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	50%	50%		
						Moitoring, evaluasi dan pelaporan	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tenaga kerja
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit:	100%	100%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
			Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu		75%	Jumlah	sosial
			Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu:		75%		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;		80%		<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum:		50%	Program pelayanan administrasi perkantoran	
			Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan:		50%	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	
			Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan:		100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
						Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
			Persentase KDRT dan anak terlantar	20%	20%	Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	
			Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	40	10	Program Pemeliharaan Kantramtibmas & Pencegahan Tindak Kriminalitas	
			Terbangunnya gedung P2TP2A		1 unit	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	
						Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
						Program Pendidikan Politik Masyarakat	
						Program Perencanaan Pembangunan	
						Jumlah	
						Program Keluarga Berencana	<b>urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>
						Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
						Program Pelayanan Kontrasepsi	
						Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayananKB/KR Mandiri	
						Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) KRR	
						Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	
						Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu Padu	
						Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	
						Program Kelembagaan PUG dan Anak	
						Program Peningkatan Kualitas Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	
						Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	

SKPD Penanggung Jawab
(9)
Disnakertransos
Disnakertransos
Disnakertransos
Disnakertransos
Disnakertransos
Disnakertransos

SKPD Penanggung Jawab
(9)
Disnakertransos
Disnakertransos
Disnakertransos
Disnakertransos
Disnakertransos



SKPD Penanggung Jawab
(9)
BPPKB
BPPKB
BPPKB
BPPKB
BPPKB
BPPKB
BPPKB
BPPKB



Lampiran 2 : Matrik Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dalam RPJMD Kab. Tanah Laut Tahun 2013-2018

Misi I : Peningkatan dan pengembangan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				2014		2015		2016		2017		2018		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(14)	(15)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Urusan Wajib															
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kegiatan Hari-Hari penting keagamaan, Buka bersama, Safari keagamaan KDH dan Pej. Daerah dengan masyarakat dan bimbingan haji baik ibadah dan fisik		4 kali keg. Hari penting keagamaan, Safari keagamaan 11 Kecamatan dan 300 org Jamaah haji	664,104,000	5 kali keg. Hari penting keagamaan, Safari keagamaan 11 Kecamatan dan 300 org Jamaah haji	720,000,000	5 kali keg. Hari penting keagamaan, Safari keagamaan 11 Kecamatan dan 325 org Jamaah haji	900,000,000	5 kali keg. Hari penting keagamaan, Safari keagamaan 11 Kecamatan dan 325 org Jamaah haji	950,000,000	5 kali keg. Hari penting keagamaan, Safari keagamaan 11 Kecamatan dan 350 org Jamaah haji	1,100,000,000			
		Terlaksananya kegiatan MTQ Tk. Propinsi dan Kabupaten		Kegiatan MTQ Tk. Kabupaten	7,500,000,000	Kegiatan STQ Tk. Kabupaten	1,500,000,000	Kegiatan MTQ Tk. Kabupaten	1,500,000,000	Kegiatan STQ Tk. Kabupaten	1,500,000,000	Kegiatan MTQ Tk. Kabupaten	1,500,000,000			
		Terlaksananya Kerukunan Umat Beragama dan Penataran Khatib dan Bilal, Terlaksananya pengiriman Santri dan Ulama ke Luar Negeri		Sosialisasi dan Pembentukan FKUB di 4 Kecamatan, Seminar FKUB di Kab. Tanah Laut dan Penataran bagi Khatib dan Bilal, Jumlah Santri dan Ulama yang dikirim ke Luar Negeri	195,245,000	Sosialisasi FKUB di Kecamatan, Seminar FKUB di Kab. Tanah Laut dan Penataran bagi Khatib dan Bilal, Jumlah Santri dan Ulama yang dikirim ke Luar Negeri	892,000,000	Sosialisasi FKUB di Kecamatan, Seminar FKUB di Kab. Tanah Laut dan Penataran bagi Khatib dan Bilal, Jumlah Santri dan Ulama yang dikirim ke Luar Negeri	1,106,000,000	Sosialisasi FKUB di Kecamatan, Seminar FKUB di Kab. Tanah Laut dan Penataran bagi Khatib dan Bilal, Jumlah Santri dan Ulama yang dikirim ke Luar Negeri	1,139,000,000	Sosialisasi FKUB di Kecamatan, Seminar FKUB di Kab. Tanah Laut dan Penataran bagi Khatib dan Bilal, Jumlah Santri dan Ulama yang dikirim ke Luar Negeri	1,408,000,000			
	Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Kesejahteraan Guru TKA, Madin dan Ponpes		Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap Guru TKA, Madin dan Ponpes sebanyak 2460 org	7,600,000,000	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap Guru TKA, Madin dan Ponpes sebanyak 2470 org	8,820,000,000	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap Guru TKA, Madin dan Ponpes sebanyak 2485 org	8,874,000,000	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap Guru TKA, Madin dan Ponpes sebanyak 2495 org	10,395,000,000	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap Guru TKA, Madin dan Ponpes sebanyak 2510 org	10,458,000,000			
	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya Kesejahteraan dan Kinerja Penyuluh Agama dan Penghulu		Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap Penyuluh Agama dan Penghulu sebanyak 255 org	630,000,000	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap Penyuluh Agama dan Penghulu sebanyak 260 org	702,000,000	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap Penyuluh Agama dan Penghulu sebanyak 265 org	715,500,000	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap Penyuluh Agama dan Penghulu sebanyak 270 org	810,000,000	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap Penyuluh Agama dan Penghulu sebanyak 275 org	825,000,000			
	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan hibah		150 organisasi	35,000,000	160 organisasi	45,000,000	170 organisasi	55,000,000	180 organisasi	65,000,000	195 organisasi	75,000,000			
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				469,000,000		515,900,000		567,490,000		624,239,000		686,662,900			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				19,000,000		20,900,000		22,990,000		25,289,000		27,817,900			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				415,000,000		456,500,000		502,150,000		552,365,000		607,601,500		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				151,000,000		166,100,000		182,710,000		200,981,000		221,079,100		
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				2,000,000,000		2,200,000,000		2,420,000,000		2,662,000,000		2,928,200,000		
	Program Peningkatan Pemberantasan penyakit (pekat)				250,000,000		275,000,000		302,500,000		332,750,000		366,025,000		
	Program Pengamanan dan penertiban perda				320,000,000		360,000,000		402,000,000		446,200,000		492,820,000		
	Jumlah Satpol PP				3,624,000,000		3,994,400,000		4,399,840,000		4,843,824,000		5,330,206,400		
	<b>Jumlah Kebutuhan Pendanaan Untuk Pelaksanaan Misi 1</b>				20,248,349,000		16,673,400,000		17,550,340,000		19,702,824,000		20,696,206,400		

SKPD Penanggung Jawab
(16)
Bagian Kesra Setda Tanah Laut
Bagian Kesra Setda Tanah Laut
Bagian Kesra Setda Tanah Laut
Bagian Kesra Setda Tanah Laut
Bagian Kesra Setda Tanah Laut
Bagian Kesra Setda Tanah Laut
Bagian Kesra Setda Tanah Laut
Satpol PP
Satpol PP

SKPD Penanggung  
Jawab

(16)

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

**TABEL PENETAPAN INDIKATOR MAKRO KINERJA DAERAH  
DALAM RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013-2018**

No.	Komponen	Standar Ideal	Kondisi sekarang	Target Capaian Tahun 2018
1	Pertumbuhan ekonomi	7,5 % – 9 %	6,2	< 7,0
2	Pendapatan Per Kapita	10,6 jt(2015) Provinsi	15 Jt	26 Jt
3	Laju Inflasi	4,5 % (nasional)	-	4%
4	Tingkat Pengangguran Ternuka	5-6%	4,2	4,2-3,8%
5	Tingkat Kemiskinan	8-10% (nasional)	5,2%	< 4,0 %
6	Indeks Pembangunan Manusia		72,00	75 – 80
7	Pertumbuhan penduduk	2,01	2,5	2.00%